



KONFLIK BERSEJARAH

ENSIKLOPEDI

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

NINO OKTORINO

Konflik Bersejarah

ENSIKLOPEDI PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

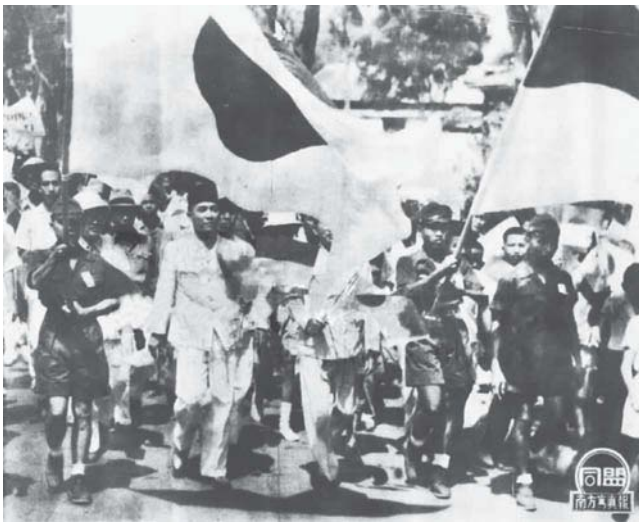
pustaka-indo.blogspot.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Konflik Bersejarah

ENSIKLOPEDI PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA



Nino Oktorino

Penerbit PT Elex Media Komputindo



KOMPAS GRAMEDIA

Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia

Oleh: Nino Oktorino

©2013 Penerbit PT Elex Media Komputindo

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta

777132537

ISBN: 978-602-02-2872-3

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi diluar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Di Bawah Cengkeraman Dai Nippon.....	vii
A.....	1
B.....	10
C.....	18
D.....	21
E.....	27
F.....	29
G.....	31
H.....	36
I.....	42
J.....	46
K.....	49
L.....	61
M.....	66
N.....	80
O.....	83
P.....	86
Q, R.....	98

S.....	102
T.....	120
U, V, W.....	126
X,Y.....	129
Z.....	131
SUMBER FOTO	
133	
DAFTAR PUSTAKA	134



KATA PENGANTAR

Buku *Pintar Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia* ini disusun untuk menyediakan bahan rujukan dengan gambaran yang selengkap dan semudah mungkin bagi guru, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas mengenai salah satu babak terpenting dalam sejarah Indonesia. Untuk memudahkan pembaca awam menggunakan teks ini, Penulis memulai buku ini dengan memberikan suatu ikhtisar mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah itu baru dituangkan sumber informasi dasar yang terdiri atas daftar para tokoh, organisasi, dan peristiwa penting beserta sejumlah istilah yang banyak terdengar dalam babak sejarah pendudukan Jepang di Indonesia ini.

Dalam buku ini, penulis tidak membatasi diri hanya menuliskan para tokoh, organisasi maupun interaksi Indonesia dan Jepang belaka, melainkan juga mencantumkan informasi mengenai para tokoh Belanda dan Sekutu lainnya yang bersinggungan dengan zaman

tersebut serta pengalaman para tawanan perang dan interniran Sekutu di Indonesia.

Adapun nama-nama tokoh maupun organisasi yang tertera dalam buku ini diusahakan masih menggunakan ejaan yang dipakai pada masa itu. Selain itu, nama-nama tokoh Indonesia umumnya dimulai dengan nama kecil, kecuali nama-nama tokoh yang memiliki nama keluarga, sementara nama para tokoh Tionghoa dimulai dengan nama-nama marganya terlebih dahulu.

Buku ini ditulis berkat Klemen Luzar, seorang Slovenia yang tertarik dengan sejarah Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Tanpa masukan dan dorongan darinya, buku ini tidak akan pernah dibuat dan diselesaikan. Rekan lain yang juga patut mendapatkan ucapan terima kasih karena turut memberikan bantuan informasi adalah Dohn Kehn, Jr., dan Eka Hindra.

Buku ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dorongan dan dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, Sharmaya, yang telah dengan sabar mendampingi saat buku ini diselesaikan. Juga kepada dua buah hati kami, Ilai dan Gaby.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada PT Elex Media Komputindo yang telah bersedia menerima tulisan ini dan mendorong untuk mengembangkannya lebih lanjut, terutama untuk Bapak Vincentius S. Hardojo dan Bapak Eko Nugroho. Juga kepada Mas Erson, yang telah membuatkan sampul muka yang inovatif dan menarik, serta Ibu Adriana dan Ibu Erna yang telah membantu kelancaran administrasi. Untuk staf Elex lainnya yang telah membantu penyelesaian buku ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semua.

Dan ucapan terima kasih terbesar dan terutama Penulis panjatkan kepada Allah Yang Mahakuasa. Tanpa seizin dan penyertaan-Nya, buku ini tidak akan pernah terselesaikan.

Jakarta, 30 Desember 2013



DI BAWAH CENGKERAMAN DAI NIPPON

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan udara terhadap pangkalan Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sebagai bentuk solidaritas kepada Sekutu, pemerintah Hindia Belanda kemudian menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian, Indonesia pun terseret dalam kancah Perang Pasifik.

Sebenarnya, Jepang telah lama mengincar Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, yang sangat dibutuhkan oleh industri negeri Matahari Terbit itu. Sebelum perang, beberapa misi diplomatik dan dagang Jepang telah beberapa kali berusaha membujuk pemerintah kolonial Belanda untuk mengizinkan mereka ikut mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Namun, permintaan mereka ditolak. Kini, keikutsertaan Belanda dalam Perang Pasifik memberikan kesempatan emas bagi Jepang untuk menguasai kepulauan Nusantara.

Jepang menyerang Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942 dan mengarahkan serangan awalnya ke berbagai daerah pertambangan minyak di Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan serta Palembang di Sumatra. Mereka kemudian mengucilkan Pulau Jawa, pusat kekuasaan Belanda di Indonesia, dengan merebut berbagai pulau di sekitarnya serta melumpuhkan pelabuhan Darwin di Australia sehingga memutuskan hubungan antara Jawa dengan dunia luar.

Pada akhir Februari 1942, armada laut Jepang berhasil melumpuhkan armada gabungan Sekutu dalam pertempuran di Laut Jawa. Pasukan Jepang kemudian menyerbu Jawa dan melumpuhkan perlawanan pasukan Sekutu di pulau tersebut. Pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal H. ter Poorten, panglima KNIL, terpaksa menandatangani penyerahan seluruh pasukan KNIL dan Sekutu kepada Letnan Jenderal Imamura Hitoshi. Dengan demikian, Indonesia pun jatuh ke tangan Jepang.

Selama pendudukan Jepang, 170.000 orang Eropa dimasukkan ke dalam kamp-kamp tawanan. Sekitar seperempat pria dan seperdelapan wanita serta anak-anak yang ditawan mati akibat kelaparan, penyakit, atau dibunuh selama pendudukan Jepang. Di antara mereka termasuk ribuan tawanan perang KNIL dan Eropa yang dipaksa bekerja membangun jalur kereta api maut lintas Sumatra dan Birma-Siam.

Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut gembira oleh penduduk Indonesia, yang menganggap mereka sebagai pembebas. Namun, ternyata Jepang sama sekali tidak bermaksud memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebaliknya, Indonesia kemudian dibagi menjadi tiga zona pendudukan: Tentara ke-25 menduduki Sumatra, Tentara ke-16 menduduki Jawa dan Madura, sementara sisa wilayah Indonesia dikuasai oleh angkatan laut.

Jepang menerapkan hukum militer dan memaksakan peraturan penjajahan. Mereka melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris serta berusaha mempromosikan bahasa Jepang, tetapi untuk menjangkau rakyat mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Semua kegiatan dan perkumpulan politik dilarang sementara Jepang mensponsori berbagai organisasi bentukannya sendiri, dimulai dengan



Tentara Jepang memasukkan drum-drum minyak mentah ke dalam truk-truk militer di sebuah ladang minyak yang tidak disebutkan lokasinya di Indonesia. Kekayaan alam, terutama minyak bumi, Indonesia merupakan salah satu alasan Jepang menyerang wilayah jajahan Belanda ini.

Gerakan 3A yang menyanjung Jepang sebagai “cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia”. Saat usaha ini gagal, Jepang berpaling kepada para tokoh Indonesia.

Di Pulau Jawa, yang penduduknya padat dan tingkat pendidikannya lebih tinggi, Jepang memberikan cukup banyak konsesi kepada para tokoh pergerakan. Sekalipun anti-fasis, Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang untuk menghindari penangkapan. Bersama dengan Soekarno dan sejumlah tokoh nasionalis lainnya, Hatta bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai Indonesia yang merdeka.

Beberapa tokoh nasionalis seperti Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir menolak untuk bekerja sama dengan Jepang dan membentuk



Ir. Soekarno dan para petinggi militer Jepang mengibarkan bendera merah putih dan matahari terbit dalam sebuah foto propaganda. Selama pendudukan Jepang, kebanyakan tokoh pergerakan memilih bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai Indonesia merdeka.

gerakan bawah tanah. Jepang menindas gerakan ini dan menangkap Amir beserta 53 orang lainnya pada bulan Januari 1943. Beberapa di antara mereka dieksekusi, tetapi Soekarno dan Hatta berhasil membujuk Jepang untuk mengubah hukuman mati terhadap Amir menjadi hukuman seumur hidup.

Pihak Jepang mendirikan Poetera pada bulan Maret 1943 dan menggunakan Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansoer untuk memimpinya. Ketika Poetera mendesak rakyat untuk mendukung pendudukan Jepang karena mereka telah membebaskan orang Indonesia “dari penjajahan berabad-abad”, Jepang memberikan peringatan keras bahwa mereka hanya menginginkan orang Indonesia membantu Jepang untuk memenangkan perang tanpa embel-embel berbau pemberian kemerdekaan. Jepang pun kemudian membubarkan Poetera serta memberlakukan sensor terhadap pers dan pidato-pidato Soekarno.

Untuk memecah-belah pergerakan kemerdekaan serta menandingi kaum nasionalis sekuler, Jepang mendekati para tokoh Muslim.

Kaum Muslim sebelumnya telah menolak menyatakan suatu jihad untuk mendukung Jepang dan bersikeras menggunakan tulisan Arab di sekolah-sekolah mereka. Untuk menarik hati mereka, Jepang memberikan sejumlah konsesi, termasuk meniadakan aturan penghormatan terhadap Kaisar di Tokyo dengan cara membungkuk dalam pertemuan-pertemuan agama. Jepang kemudian membentuk sebuah organisasi yang disebut Masjoemi pada tahun 1943 untuk mewadahi seluruh kaum Muslim di Jawa dan Madura.

Di Sumatra, pemerintah militer setempat melarang pembentukan sebuah organisasi yang terpusat sebagai wadah bagi golongan nasionalis. Alasannya, Sumatra terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat-istiadat sehingga yang diizinkan hanyalah organisasi-organisasi lokal. Karena itu, ketika Mohammad Sjafe'i dan Chatib Sulaiman mengajukan permohonan untuk membentuk organisasi semacam Poetera di Sumatra, pemerintah militer di sana menolaknya.

Di Indonesia Timur, karena Angkatan Laut Jepang bermaksud menggabungkannya ke dalam Kekaisaran Jepang, organisasi-organisasi nasionalis sangat dikekang. Baru pada tahun 1945 pemerintahan militer di sana mulai bersikap lunak dengan mengizinkan pembentukan sebuah badan yang disebut sebagai Sudara.

Untuk mendukung usaha-usaha perangnya, Jepang membentuk sejumlah organisasi semimiliter dan militer yang direkrut di kalangan orang Indonesia. Di antara mereka terdapat *Keibodan*, *Seinendan*, *Heiho*, dan Peta. Berkat kebijakan ini, jutaan pemuda Indonesia mendapatkan bekal latihan kemiliteran.

Keinginan Jepang untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia bagi kepentingan negerinya terhalang saat kapal-kapal selam dan angkatan udara Sekutu memblokade kepulauan Jepang. Guna memampukan tentaranya di Indonesia bertahan, Jepang memprioritaskan produksi bahan pangan di Indonesia dan mengabaikan komoditas pertanian lainnya. Untuk keperluan militernya, Jepang pun tidak segan-segan menyita bahan pangan dan mengerahkan pekerja paksa, yang sebenarnya lebih dibutuhkan untuk mengerjakan



Salah satu warisan penting dari zaman pendudukan Jepang di Indonesia adalah militerisasi bangsa Indonesia, sebagaimana diperlihatkan dalam barisan Peta. Di kemudian hari, para pemuda yang mendapatkan pelatihan militer dari Jepang ini memainkan peranan besar dalam perang kemerdekaan Indonesia.

pertanian rakyat. Akibatnya, timbul wabah kelaparan pada tahun 1944 dan 1945, yang menelan korban sekitar 2.400.000 orang.

Jepang sendiri mengirimkan 270.000 orang petani untuk dipekerjakan sebagai *romusha* ke luar kampung halaman mereka, bahkan hingga ke Birma. Diperkirakan hanya 70.000 orang di antara mereka yang berhasil selamat saat perang usai.

Kekejaman dan sikap sewenang-wenang Jepang mendorong terjadinya sejumlah pemberontakan rakyat, seperti di Tasikmalaya dan Indramayu. Bahkan pemberontakan juga menyebar ke sejumlah organisasi militer bentukan Jepang, seperti yang dilakukan oleh sebuah batalyon Peta di Blitar.

Pada tanggal 7 September 1944, saat Sekutu semakin mengancam kepulauan Jepang sendiri, Perdana Menteri Koiso Kuniaki menjanjikan agar memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, kelak di kemudian hari asalkan bangsa Indonesia mau membantu Jepang. Sebagai tindak lanjut dari Janji Koiso itu, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Tentara ke-16 Jepang di Jakarta membentuk BPUPKI. Badan ini bertugas mempersiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan sebagai prasyarat berdirinya suatu negara yang merdeka.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan apa yang disebut sebagai Pancasila bagi filosofi negara Indonesia yang hendak dibentuk. Dengan suara 55:6, BPUPKI memberikan suara bagi pembentukan sebuah republik, bukan sebuah monarki. Lembaga ini juga memasukkan seluruh Malaya, Kalimantan, Timor, dan Papua sebagai bagian Indonesia. Pihak Muslim mendesak agar konstitusi yang hendak dibentuk mencantumkan ketentuan agar kaum Muslim menjalankan syariah, di mana sebuah kompromi dicapai dalam bentuk Piagam Jakarta.

Ketika BPUPKI digantikan oleh PPKI, Soekarno, Hatta, dan Radjiman diterbangkan ke Dalat, Saigon. Di sana, Marsekal Terauchi Shiraichi berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang tidak lama, tetapi menolak memasukkan Malaya dan Kalimantan Utara serta Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia yang hendak dibentuk.

Soekarno dan Hatta pulang ke Indonesia dengan memegang janji dari Terauchi. Namun, sikap mereka ditentang oleh para pemuda yang menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat mungkin dan tanpa peran serta Jepang mengingat Jepang sendiri sudah menyerah kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945.

Sempat terjadi penculikan terhadap kedua tokoh itu oleh golongan pemuda. Namun, atas jasa baik dari Laksamana Madea, kepala penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta, akhirnya kaum pemuda dan golongan tua sepakat bahwa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, suatu babak baru dalam sejarah Indonesia pun dimulai.



ABDACOM. Merupakan singkatan *American-British-Dutch-Australian Command*. Digunakan sebagai nama komando Sekutu yang mempertahankan Malaya dan Hindia Belanda dari serangan Jepang. Didirikan pada tanggal 15 Januari 1942 di bawah Marsekal Sir Archibald Wavell dari Inggris. Letnan Jenderal Brett dari Amerika Serikat diangkat sebagai panglima angkatan udara dan wakil Wavell, sementara Jenderal Sir H.R. Pownall dari Inggris ditunjuk sebagai kepala staf. Letnan Jenderal H. ter Poorten memegang kendali atas pasukan darat sedangkan Laksamana Hart diangkat menjadi panglima Angkatan Laut.

Rapat pertama Komando ABDA. Duduk mengelilingi meja dari sebelah kiri: Laksamana Layton, Laksamana Helfrich, dan Laksamana Hart, Jenderal ter Poorten, Kolonel Kengen (di ujung meja), Marsekal Wavell, Jenderal Brett, dan Jenderal Brereton.



Namun, sejak awal ABDACOM dirundung permasalahan, terutama karena pasukan dari masing-masing bangsa cenderung mementingkan dirinya sendiri dan sering kali lupa memberitahukan sekutu mereka mengenai perkembangan yang ada untuk memperoleh bantuan.

Sebagai komando gabungan sendiri, ABDACOM merupakan pekerjaan tambal sulam. Kesulitan komunikasi dan bahasa tidak pernah terpecahkan, sementara suatu sistem isyarat gabungan tidak pernah dirancang. Akhirnya, karena gagal menunaikan tugasnya, ABDACOM dibubarkan pada tanggal 23 Februari 1942.

Abdoelrahim Pratalykrama, Raden (l. 1898). Ia menjabat sebagai wakil residen Kediri pada awal masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI maupun residen Kediri.

Abdoel Abbas, Mr. (l. 1906). Lulusan Sekolah Hukum di Jakarta, pada masa pendudukan Jepang ia menjabat sebagai anggota *Sumatra Chuo Sangi-In*. Ia kemudian ditunjuk mewakili Sumatra dalam PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, ia menjadi residen Lampung yang pertama.

Abdoel Djalil, Teungku (?– 1942). Guru dan pemimpin sekolah agama yang terkenal di Cot Plieng, dekat Lhok Seumawe, Abdoel Djalil sangat menentang kehadiran Jepang di Aceh maupun unsur-unsur pro-Jepang di dalam PUSA, yang dianggapnya mengundang Jepang masuk ke Aceh. Kegiatan anti-Jepangnya segera diketahui oleh penguasa Jepang berkat informasi yang disampaikan oleh mata-mata mereka. Ketika Djalil menolak memenuhi panggilan *Kempeitai*, Jepang melancarkan serangan terhadap kubu ulama itu di Cot Plieng dan membunuhnya bersama ratusan pengikutnya.

Abdoel Fatah Hasan, K.H. (l. 1912). Lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, K.H. Abdoel Fatah Hasan dikenal sebagai anggota Pergerakan Organisasi Pelajar Indonesia Malaya. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Abdoel Halim, K.H. (l. 1887). Bernama asli Mohammad Sjatari, ia adalah seorang anggota *Chuo Sangi-In Jakarta*. Ulama ini kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Abdoel Kadir, Raden (l. 1906). Seorang administratur pada zaman kolonial, Abdoel Kadir kemudian bergabung dengan Peta pada tahun 1943 dan memperoleh pangkat perwira. Ia kemudian ditunjuk untuk menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.

Abdoel Kaffar (l.1913). Seorang bekas kapten yang memimpin sebuah kompi dalam tentara kolonial yang disebut Barisan Madura. Pada masa pendudukan Jepang, ia ditunjuk sebagai seorang anggota BPUPKI.

Abdoel Kahar Moezakir (1907–1973). Seorang tokoh Partai Islam Indonesia (PII) dan Muhammadiyah, ia pernah berkunjung ke Jepang pada tahun 1939 untuk menghadiri Konferensi Kebudayaan Islam mewakili Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, ia bekerja sebagai pegawai Kantor *Kooti Zimu Kyoku Yogra* bagian Ekonomi di Yogyakarta. Ia kemudian diangkat menjadi wakil kepala Kantor Pusat *Shūmubu* di Jakarta. Ia terlibat aktif dalam BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta ikut mencanangkan Piagam Jakarta.

Abdoel Latif Hendraningrat (1911–1983). Seorang guru pada masa kolonial Belanda, Abdul Latief Hendraningrat aktif dalam *Seinen Kunrenshoo* (Pusat Latihan Pemuda) pada masa pendudukan Jepang. Ia kemudian bergabung dengan Peta dan ditunjuk menjadi seorang *Chudancho*. Saat kemerdekaan RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Tirnur, Jakarta, ia ditunjuk menjadi penanggung jawab keamanan upacara serta bertugas sebagai pengibar bendera



Merah Putih. Ia kemudian aktif dalam TNI dan bidang pendidikan di Indonesia.

Abdul Madjid, K.H. (1887–1947). Seorang tokoh ulama di Jakarta, pada masa pendudukan Jepang, Abdul Madjid dipercaya menjadi salah satu pimpinan Masjoemi sebagai wakil dari Nahdlatul Ulama. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota *Chuo Sangi In*.

Abdoel Wachid Hasjim, K.H. (1914–1953). Ketua Pengurus Besar NU. Pada zaman Jepang, ia diangkat menjadi ketua MIAI. Setelah MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masjoemi oleh Jepang, ia secara *de facto* memimpin organisasi yang di atas kertas dikepalai oleh ayahnya, K.H. Hasjim As'ari. Setelah menjadi anggota *Chuo Sangi-In*, ia kemudian diangkat menjadi anggota PPKI dan menduduki sejumlah jabatan negara setelah Indonesia merdeka.



Abikoesno Tjokrosoejoso, Raden Mas (1897–1969). Adik H.O.S Tjokroaminoto, ia aktif dalam SI dan PSII selama zaman kolonial Belanda. Percaya bahwa Jepang akan membebaskan Jawa, segera setelah penyerahan Hindia Belanda, dengan antusias ia menyerahkan suatu rancangan pemerintahan sementara Indonesia. Dalam rancangan itu, pemimpin PSII tersebut mengajukan diri sebagai perdana menteri dari pemerintahan sementara itu. Jepang mengabaikan usulannya dan hanya mempercayakan Abikoesno untuk mengurus sejumlah gedung di Jakarta.



Saat Poetera didirikan, ia ditunjuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan organisasi tersebut. Menjelang kekalahan Jepang, ia diangkat menjadi wakil golongan Islam dalam BPUPKI dan PPKI.

Aboe Hanifah (1906–1980). Dokter, jurnalis, dan tokoh pergerakan. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi tokoh Barisan Pemoeda Asia Raja.

Adam Malik (1917–1984). Seorang wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan, pada tahun 1945 ia menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama sejumlah pemuda, ia membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia juga menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Ia kemudian menjadi wakil presiden Indonesia yang ketiga.



Agoes Moechsin Dasaad (l.1905). Seorang pengusaha dan pemimpin NV Pabrik Tenun, pada masa pendudukan Jepang Dasaad ditunjuk sebagai wakil ketua *Jakarta Tokubetu Si Sangi Kai*. Ia kemudian duduk menjadi anggota BPUPKI.

Agoes Salim, K.H. (1884–1954). Tokoh SI dan ketua PSII. Pada masa pendudukan Jepang, ia ditunjuk menjadi anggota Majelis Pertimbangan Poetera. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI. Aktif dalam pemerintahan setelah Indonesia merdeka.

Ahmad A. Sanoesi, K.H. (1888–1950). Seorang ulama dan pendiri *al-Ittihadiat al-Islamiyah*, pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Sanoesi ditunjuk menjadi salah seorang instruktur latihan yang mempropagandakan kebijakan mereka di kalangan umat Islam. Pada tahun 1944, ia diangkat oleh Jepang sebagai wakil residen di Bogor. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI.

Ahmad Soebardjo Djojoadisoerjo (1896–1978). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Leiden ini, aktif dalam dunia pergerakan sejak masa mudanya. Ikut mendirikan dan pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1935, ia pergi ke Jepang dan menjadi koresponden surat kabar *Matahari* yang diterbitkan di Semarang.

Selama pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor penyelidikan yang dikelola *Gunseikanbu*, sebelum bekerja di *Kaigun Bukanfu* yang dipimpin Laksamana Maeda. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan aktif dalam panitia pembentukan UUD, Piagam Jakarta, dan penetapan lagu kebangsaan. Saat Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok, ia membantu pembebasan kedua tokoh itu sehingga membuka jalan bagi pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Ia beberapa kali diangkat menjadi menteri luar negeri RI.



Ali Hasjmi (l.1917). Seorang pemimpin organisasi kepanduan PUSA, ia turut mengobarkan pemberontakan melawan Belanda di Seulimeum yang disulut oleh *F-Kikan*. Ia kemudian bekerja sebagai redaksi harian *Aceh Shinbun*.

Anang Abdul Hamidhan (l. 1909). Seorang wartawan, selama pendudukan Jepang Anang menjadi penanggung jawab surat kabar *Kalimantan Raja*, dan kemudian *Borneo Shimbun*. Pada tahun 1945, ia ditunjuk Jepang menjadi anggota PPKI.

Andi Pangerang (1903–1975). Seorang bangsawan Bone, pada masa pendudukan Jepang ia menjabat sebagai kepala *Bunkenkanrikan* sekaligus *Kenkanrikan* Bone. Aktif dalam pergerakan Sudara, yang diketuai oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 1945, ia diangkat men-

jadi anggota PPKI mewakili Sulawesi. Ia hadir dalam penyusunan naskah proklamasi, Proklamasi Kemerdekaan, dan pengesahan UUD 1945.

Andjar Asmara (1902–1961). Penulis sandiwara, sutradara film, dan wartawan, tokoh yang memiliki nama asli Abisin Abbas ini selama masa pendudukan Jepang mendirikan grup sandiwara Tjahja Timoer dan Matahari, yang sering kali digunakan sebagai alat propaganda. Sejumlah tulisannya, seperti “Kartinah” dan “Noesa Penida” dimuat dalam harian *Asia Raja*. Setelah kemerdekaan RI, ia aktif di dunia penerbitan buku dan surat kabar di Indonesia.

Angkatan Moeda Indonesia. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Namun kemudian berkembang menjadi organisasi pemuda yang anti-Jepang.

Aris, Mas (l. 1901). Pimpinan Jawatan Kehutanan (*Eirin Syo Tyoo*) daerah Cepu pada masa pendudukan Jepang, Aris kemudian ditunjuk menjadi anggota *Chuo Sangi-In*. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Ashar Soetedjo Moenandar, Raden (l. 1914). Seorang pegawai pekerjaan umum di wilayah Mangkunegaraan Solo, ia kemudian ditunjuk menjadi kepala kantor pekerjaan umum di Bogor oleh Jepang. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Asikin Natanegara, Raden (l. 1902). Seorang polisi karier sejak zaman Belanda, Natanegara bertugas sebagai pejabat di *Keimubu* (Departemen Kepolisian) Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Ia diangkat menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945.

Asrama Angkatan Baroe Indonesia. Didirikan atas sponsor *Sendenbu*, asrama yang juga dikenal dengan nama Asrama Menteng 31 ini dimaksudkan sebagai pusat pendidikan politik untuk menggembleng

para pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Pimpinan asrama dipegang oleh Soekarni.

Kebanyakan anggota berasal dari berbagai organisasi yang ada sebelumnya, seperti Gerindo, Indonesia Muda, Suryawirawan, dan Parindra. Mereka memperoleh berbagai ceramah dan kursus tentang politik, ekonomi, tata negara, hukum, sosiologi, bahasa, agama, dan sejarah. Di antara para pengajarnya terdapat Soekarno, Mohammad Hatta, Amir Sjarifuddin, dan Shimizu Hitoshi.

Pada pertengahan tahun 1943, asrama ini dibubarkan oleh Jepang karena kegiatannya dianggap terlalu mengedepankan nasionalisme Indonesia. Sekalipun demikian, para pemuda secara diam-diam tetap menggunakan fasilitas asrama sebagai tempat berkumpul mereka.

Asrama Fakultas Kedokteran Prapatan 10 Jakarta. Salah satu badan ‘gerakan bawah tanah’ pada masa akhir pendudukan Jepang, asrama ini lebih merupakan tempat berdiskusi para mahasiswa mengenai masa depan Indonesia. Anggotanya lebih condong berorientasi ke Barat daripada kelompok-kelompok sejenis karena pengaruh Soetan Sjahrir. Di antara tokoh-tokohnya adalah Syarif Thayeb, Djohar Nur, Darwis, dan Tadjuludin.

Asrama Indonesia Merdeka. Dibentuk atas perintah Laksamana Maeda dalam kapasitasnya sebagai kepala *Bukanfu* pada bulan Oktober 1944 sebagai tanggapan terhadap “Janji Koiso”. Di bawah pengawasan Yoshizumi Tomegoro dan Nishijima Shigetada, asrama ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi kepemimpinan baru di kalangan pemuda Indonesia.

Sekalipun tidak disukai oleh Angkatan Darat Jepang, Maeda mempersilakan para pemimpin Indonesia untuk mengajarkan apa pun yang diinginkannya kepada para peserta. Para peserta gelombang pertama (sekitar 30 orang) lulus pada bulan April 1945. Peserta gelombang kedua, yang jumlahnya 80 orang, memulai pendidikannya pada bulan Mei 1945, tetapi pelatihannya tidak pernah diselesaikan karena penyerahan Jepang.

Asrama Menteng 31. *Lihat Asrama Angkatan Baru Indonesia.*

Asia Raja. Surat kabar berbahasa Indonesia pertama yang boleh terbit pada masa pendudukan Jepang. Dibiayai oleh perusahaan penerbitan Asahi di Osaka, *Asia Raja* terbit antara tahun 1942–1945 dan menjadi salah satu sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa.

Alat propaganda utama Jepang di Jawa ini pada mulanya dipimpin oleh orang Jepang, tetapi kemudian jabatan pemimpin umum diserahkan kepada R. Soekardjo Wirjopranoto, sementara R.M. Winarno ditunjuk menjadi pemimpin redaksi. Di antara anggota redaksinya terdapat Anwar Tjokroaminoto, Burhanuddin Muhammad Diah, Asmara Hadi, dan Rosihan Anwar. Oplahnya 18.000 eksemplar.



B

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan yang memiliki nama Jepang *Dokuritsu Zyunbi Tjoosa Kai* ini lebih dikenal dengan singkatannya, BPUPKI. Dibentuk sebagai tindak lanjut dari Janji Koiso pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang tokoh Indonesia serta 7 orang anggota Jepang dan minoritas non-Indonesia tanpa hak suara. Pada sidang yang kedua (10 Juli–17 Juli), Jepang menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Badan ini terdiri atas ‘Badan Perundingan’, atau ‘Persidangan’, dan kantor Tata Usaha (Sekretariat). Badan Perundingan terdiri atas seorang *kaico* (ketua), dua orang *fuku kaico* (ketua muda), dan 60 orang *iin* (anggota).

BPUPKI bertugas mempersiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan sebagai prasyarat berdirinya suatu negara yang merdeka. Lembaga ini kemudian digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau (PPKI).

Badan Kebudayaan Kanak-kanak Indonesia. Lebih dikenal dengan singkatannya, Kekindoi, badan ini dibentuk pada awal 1945. Bertugas menyelenggarakan pelajaran kesenian Asia Timur Raya kepada penduduk Indonesia.

Bagoes Hadikoesoemo, Ki (1890–1954). Selama pendudukan Jepang, Ki Bagoes Hadiekoesomo diangkat menjadi ketua Pengurus Besar Muhammadiyah menggantikan K.H. Mas Mansjoer yang ditunjuk

menjadi salah seorang pemimpin Poetera. Ia juga aktif dalam Masjoemi dan *Chuo Sangi-In*. Pada bulan November 1943, ia pergi bersama Soekarno dan Hatta ke Jepang mewakili *Chuo Sangi-In* untuk menyampaikan rasa terima kasih penduduk Jawa karena diizinkan ikut duduk dalam pemerintahan. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI sebagai salah satu perwakilan golongan Islam.

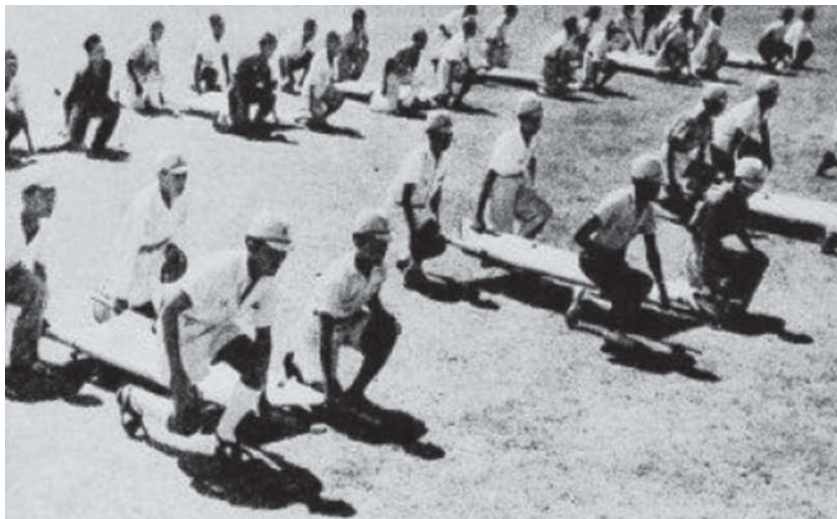


Bangka, Pembantaian. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan pasukan Jepang terhadap puluhan tawanan Sekutu, termasuk 21 orang perawat militer Australia yang terjadi pada tanggal 16 Februari 1942. Para korban adalah orang-orang yang selamat dari sebuah kapal rumah sakit yang ditenggelamkan Jepang. Para korban pria ditembak dan ditusuki bayonet di tepi pantai, sementara 22 orang juru rawat wanita dipaksa masuk ke dalam air dan diberondong tembakan.

Salah satu juru rawat, Letnan Suster Vivian Bullwinkel, selamat sekalipun terluka berat karena pura-pura mati. Selama 10 hari, ia berhasil menghindari penangkapan, sebelumnya akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Ia selamat hingga akhir perang dan memberikan kesaksian mengenai kejahatan tersebut dalam sebuah pengadilan kejahatan perang di Tokyo pada tahun 1947.

Barisan Pelopor. Memiliki nama Jepang *Suishintai*, barisan ini didirikan pada tanggal 1 November 1944 sebagai sayap militer dari *Djawa Hoko Kai*. Barisan yang beranggotakan 60.000 orang pemuda yang berusia 20 tahun ke atas ini dipimpin oleh para tokoh nasionalis di bawah tuntunan Soekarno. Orang Jepang duduk sebagai penasihat.

Tugas utama Barisan Pelopor adalah menggerakkan massa rakyat, memperkuat pertahanan lokal dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Jepang sendiri mengerahkan anggota barisan ini untuk mendengarkan pidato dari para pemimpin nasionalis dan kemudian meneruskan apa yang mereka dengar kepada rekannya yang tidak hadir.



Anggota Barisan Pelopor dilatih untuk memainkan peranan sebagai anggota Palang Merah.

Dalam barisan ini dibentuk pula sebuah kelompok elite yang disebut Barisan Pelopor Istimewa. Anggotanya terdiri atas sekitar 100 orang pemuda yang terpilih di bawah pimpinan Soediro.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Barisan Pelopor berganti nama menjadi Barisan Banteng, dengan dr. Muwardi sebagai pemimpinnya.

Barisan Perlawanan Cina. Sebuah kelompok bawah tanah di bawah pimpinan seorang mahasiswa yang diutus ke Medan oleh pemerintahan Chiang Kai Shek. Organisasi itu terutama berhubungan dengan gerakan perlawanan di kamp-kamp tawanan Sekutu dan menerbitkan selebaran gelap yang menyiarkan berita-berita yang dilarang penguasa pendudukan. Pada pertengahan Februari 1945, *Kempeitai* berhasil mengguling organisasi itu dan menghukum mati para pemimpinnya.

Barisan Srikandi. Barisan Wanita Istimewa dari *Fujinkai*. Anggotanya dilatih di asrama-asrama dan mendapatkan pelajaran praktik baris-

berbaris, bercocok tanam, memanah, tata krama dan adat kewanitaan, bahasa Jepang, hingga cara memimpin *Tonari Gumi*.

Baswedan, Abdurrachman (1908–1986). Pencetus Sumpah Pemuda keturunan Arab, Baswedan adalah pendiri Partai Arab Indonesia yang menyatakan tanah air keturunan Arab bukanlah Hadramaut, melainkan Indonesia. Ia juga seorang wartawan dari surat kabar *Sin Tit Po*. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat ditangkap *Kempetai* saat mendengarkan radio luar negeri yang terlarang dan divonis mati. Namun ia dibebaskan berkat intervensi Mr Singgih, seorang anggota Poetera.

Ia kemudian diangkat sebagai staf Mr. Sartono dalam bagian Persaudaraan Bangsa-bangsa dari *Djawa Hokokai* dan kemudian menjadi pengurus *Chuo Sangi In*. Pada saat pembentukan BPUPKI,



ia ditunjuk untuk mewakili komunitas Arab dalam badan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif di bidang diplomasi.

Beppan. Singkatan dari *Isamu Butai Tokumu Kikan Bunjitsu*, atau unit Khusus Isamu. Merupakan jawatan intelijen militer Jepang yang memiliki staf Indonesia. Tugas mereka adalah mengumpulkan informasi mengenai keadaan moral masyarakat Indonesia.

Markas besar *Beppan* terdapat di Jakarta dan memiliki cabang di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada akhir tahun 1943 dan selama tahun 1944, tugas utama *Beppan* adalah melatih barisan Peta. Setelah tahun 1944, *Beppan*, yang berganti nama menjadi *Nan-seitai*, semakin berfungsi sebagai sebuah organisasi pertahanan.

Berita Gunseikanbu. Warta berisi undang-undang dan beberapa maklumat dari pemerintahan pendudukan militer. Disebarkan

hingga ke pelosok Jawa dengan kereta api melalui cabang-cabang barisan propaganda dan agen-agen surat kabar yang dikontrol *Djawa Shinbunkai*.

Bima, Pemberontakan. Pemberontakan yang diorganisasikan sekelompok prajurit KNIL di bawah D. Saja dan Aritonang terhadap aparaturnya kolonial Belanda pada tanggal 5 Mei 1942. Pemberontakan ini juga didukung oleh berbagai perkumpulan pemuda lokal serta Sultan Bima. Usaha Belanda untuk memadamkan pemberontakan gagal dan para pegawai kolonial ditangkapi. Beberapa hari kemudian, Sultan Bima mengundang pasukan Jepang untuk memasuki daerahnya, yang kemudian diduduki pasukan penyerbu tanpa insiden.

Bintoro, B.P.H. (l. 1914). Seorang pejabat di Kesultanan Yogyakarta, Bintoro adalah pemimpin Barisan Pelopor di Yogyakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Black Force. Sebuah unit Sekutu yang terdiri atas dua batalyon bermotor Australia yang sebelumnya pernah bertempur di Syria, sebuah kompi tank Inggris, dan dua baterai meriam medan Amerika Serikat. Unit yang disebut menurut nama komandannya, Brigadir Arthur S. Blackburn, itu berhasil menahan serangan Jepang di kawasan Bogor-Tangerang dan mengakibatkan kerugian besar di pihak musuh sebelum akhirnya dipaksa meletakkan senjata akibat penyerahan umum tentara Sekutu di Hindia Belanda pada tanggal 11 Maret 1942.

Blitar, Pemberontakan Peta. Pemberontakan yang dilakukan sebuah batalyon Peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan yang dipimpin oleh *Shodanco* Soeprijadi ini terjadi akibat keprihatinan para pemberontak terhadap nasib rakyat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh Jepang serta diskriminasi rasial yang terjadi di dalam Peta sendiri.

Dalam peristiwa itu, para pemberontak membunuh sejumlah pelatih Jepang mereka dan melarikan diri ke hutan dengan membawa



Pembacaan vonis hukuman mahkamah militer Jepang terhadap para anggota Peta yang ikut dalam pemberontakan Daidan Blitar.

serta perlengkapan mereka. Namun, kebijakan Jepang yang tidak membentuk suatu komando gabungan untuk Peta dan memisahkan masing-masing *daidan* di wilayah operasinya bekerja dengan baik. Jepang bukan hanya berhasil mencegah pemberontakan itu menyebar ke *daidan* lainnya, tetapi juga dapat mengerahkan beberapa *daidan* Peta untuk memadamkan pemberontakan dalam waktu beberapa hari.

Sebuah pengadilan militer kemudian diadakan di Jakarta untuk mengadili 68 orang pemberontak, di mana delapan orang di antaranya dihukum mati—dua orang di antaranya kemudian mendapatkan keringanan dari pihak Jepang. Soeprijadi sendiri menghilang tanpa jejak, entah tewas dalam pertempuran ataupun telah dihukum mati secara rahasia.

Boentaran Martoatmodjo, Raden (1896–1972). Seorang dokter, Boentaran menjadi pimpinan *Djawa Izi Hokokai* (Perkumpulan Dokter Jawa) serta direktur rumah sakit di Semarang pada masa pendudukan

Jepang. Ia kemudian menjadi wakil ketua *Syuu Hookoo Kai* Semarang dan *Cuo Sangi-In*. Setelah itu, ia ditunjuk untuk menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.

Boerhanuddin Mohamad Diah (1917–1996).

Seorang wartawan, pada masa pendudukan Jepang ia diangkat menjadi pemimpin surat kabar *Asia Raja* di Jakarta sekaligus komentator radio. Ia juga memimpin Gerakan Angkatan Baroe, yang dibentuk pada 3 Juni 1945.

Ia sempat ditahan selama beberapa hari oleh *Kempeitai* karena dianggap melakukan tindakan perlawanan. Ia merupakan orang yang melakukan pencetakan kilat teks proklamasi untuk disebar ke seluruh Indonesia.



Bogaardt, A.Th. (?). Seorang Indo yang pernah menjabat sebagai walikota Batavia sebelum pecahnya Perang Pasifik, Bogaardt ditunjuk oleh pemerintahan militer Jepang di Jawa untuk mengelola Kantor Oeroesan Peranakan. Tidak seperti P.F. Dahler, ia tidak terlalu terang-terangan mendukung Indonesia selama pendudukan Jepang sehingga dihormati oleh komunitas Indo, yang kebanyakan bersikap pro-Belanda.

Bompa. Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia. Didirikan pada bulan November 1943, Bompa merupakan organisasi propaganda ciptaan Jepang yang dimaksudkan untuk membangkitkan dukungan penduduk Sumatra bagi tujuan-tujuan perang Jepang, terutama dalam merekrut tenaga *Heiho* dan *Giyû-gun* serta bantuan logistik. Di Sumatra Timur, kaum nasionalis—yang terutama terdiri atas para pendatang—menggunakan organisasi ini untuk mengobarkan sentimen anti-Melayu dan anti-Kerajaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, badan ini dinamakan kembali sebagai “Panitia Penolong Pengangguran *Heiho* dan *Giyû-gun*.”

Borneo Simboen. Surat kabar yang awalnya bernama *Kalimantan Raya* ini dipimpin oleh A.A. Hamidhan dan berpusat di Banjarmasin. Surat kabar berukuran tabloid ini berisi empat halaman, di mana dua halaman menggunakan bahasa Indonesia beraksara Latin sementara sisanya ditulis dengan huruf kanji.

Brereton, Lewis Hyde (1890–1967). Seorang penerbang dan jenderal Pasukan Udara Angkatan Darat AS, Brereton ditunjuk menjadi wakil panglima angkatan udara ABDACOM pada awal tahun 1942. Saat kejatuhan Jawa tidak terelakkan, ia diungsikan ke India. Ia kemudian memimpin angkatan udara taktis Sekutu di Eropa dan memegang komando atas Satuan Lintas Udara Sekutu ke-1 hingga berakhirnya perang di Eropa.

Bundanco. Komandan regu dalam kepangkatan Peta.

Bunkakai. Kelompok kerja. Bagian dari sidang BPUPKI.

Buchō. Kepala departemen.



Chairoel Saleh (1916–1967). Seorang tokoh pergerakan, pada masa pendudukan Jepang ia menjadi anggota *Seinendan* dan ikut membentuk Barisan Banteng, yang kemudian dijadikan inti Barisan Pelopor. Ia kemudian menjadi wakil ketua Gerakan Angkatan Baroe dan Pemoeda. Chairoel Saleh turut mempersiapkan proklamasi kemerdekaan RI dan kemudian menduduki sejumlah jabatan dalam pemerintahan, termasuk salah seorang wakil perdana menteri selama Masa Demokrasi Terpimpin. Seorang loyalis Soekarno, ia ditahan setelah peristiwa G-30-S dan meninggal dalam tahanan.



Chatib Soelaeman (1906–1949). Seorang politisi dan seniman Minangkabau, menjelang serangan Jepang ke Sumatra, Chatib Soelaeman ditangkap Belanda karena menentang aksi bumi hangus dan dibuang ke Kotacane, Aceh. Dibebaskan oleh Jepang dan dipulangkan ke Sumatra Barat, ia membantu pembentukan organisasi Pemuda Nippon Raya. Ia juga merupakan anggota *Syu Sangi Kai*, sejenis Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatra Tengah dan salah satu aktivis yang menganjurkan para pemuda di Sumatra Barat untuk bergabung dengan *Giyûgun*. Ia gugur dalam suatu sergapan Belanda pada awal tahun 1949.

Chokai. Rukun Kampung, terdiri atas lima atau enam *tonarigumi*. Merupakan alat Jepang untuk mengontrol keadaan setiap kampung

serta memobilisasi sumber daya alam dan manusia guna kepentingan perang mereka.

Cirebon, Pemberontakan Petani. Pemberontakan yang diakibatkan penderitaan rakyat karena begitu tingginya kuota padi yang harus diserahkan petani untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang. Dimulai dari Desa Cidempet pada 30 Juli 1944, dalam pemberontakan yang menyebar ke beberapa desa lainnya di Cirebon tersebut, rakyat bukan hanya menyerang para pejabat Jepang tetapi juga pejabat Indonesia yang, sebagai kaki tangan Jepang, melaksanakan perintah sewenang-wenang tersebut. Pemberontakan dipadamkan oleh pasukan Jepang, di mana jatuh banyak korban yang tewas dan terluka di pihak pemberontak.

CORO. *Corps Opleiding Voor Reserve Officieren*, atau Sekolah Perwira Cadangan. Terdiri atas tiga unit: satu unit untuk orang Eropa; sebuah unit untuk orang pribumi; dan sebuah unit untuk orang pribumi

Para kadet CORO berkebangsaan Belanda dan Indonesia berpose bersama di barak mereka di Bandung.



dengan pangkat calon perwira. Sekolah tersebut berlokasi di Bandung dan dipimpin oleh Mayor Van Oyen. Ada kira-kira 200 orang yang mengikuti pendidikan tersebut, termasuk beberapa orang Indonesia, seperti T.B. Simatupang, Alex E. Kawilarang, A.H. Nasution, dan G.P.H. Djatikoesoemo. Banyak anggotanya tewas selama pertempuran di Ciater melawan pasukan Jepang.

Cudan. Kompi

Cudanco. Pangkat dalam Peta yang mengacu pada komandan kompi.

Cuo Sangi-In. Badan Pertimbangan Pusat. Didirikan pada 5 September 1943, badan yang berada di bawah *Saiko Shikikan* ini bertugas mengajukan usul kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan pemerintah militer

D

Dahlan Jambek (1917–1961). Anak Syekh Mohammad Djamil Djambek, seorang ulama besar Minangkabau. Selama masa pendudukan Jepang, ia mempunyai hubungan yang baik sekali dengan penguasa. Ia menjadi salah seorang perwira *Giyugun* dan bertanggung jawab atas pelatihan para *Seinendan* di Sumatra Barat.

Setelah Proklamasi, ia menyusun para pemuda yang dilatih Jepang di Sumatra Barat menjadi Divisi Banteng TNI sementara ia sendiri menjadi panglima TNI se-Sumatra. Namun selama dasawarsa 1950-an, ia bersitegang dengan pemerintah pusat dan kemudian memimpin PRRI di Sumatra. Ia terbunuh dalam suatu kontak senjata dengan TNI.

Dahler, P. F. (1883–1947). Seorang kontrolir pada masa kolonial



Belanda, Dahler merupakan tokoh Indo yang menginginkan peleburan kaumnya ke dalam bangsa Indonesia. Ia pernah menjadi anggota *Volksraad* mewakili Indische Partij dan aktif mengajar di sekolah-sekolah Indonesia, seperti Perguruan Rakyat dan Kesatriaan. Selama pendudukan Jepang, ia aktif mendorong kaum Indo untuk mendukung Jepang. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI mewakili golongan Indo. Pada saat Perang Kemerdekaan, ia memihak Republik Indonesia.

Daidan. Batalyon.

Daidanco. Pangkat dalam Peta yang mengacu pada komandan batalyon.

Dai Nippon. Jepang Raya.

Dai Nippon Teikoku. Kekaisaran Jepang Raya.

Dai Toa. Asia Timur Raya.

Dai Tooa Sensoo. Perang Asia Timur Raya. Sebutan Jepang untuk Perang Pasifik.

Desa Majang, Perang. Perlawanan suku Dayak terhadap Jepang yang berlangsung antara bulan April hingga Agustus 1945 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang di kabupaten Sanggau. Dipicu oleh pemukulan yang dilakukan seorang mandor terhadap pekerja Dayak di sebuah perusahaan penebangan kayu Jepang. Beberapa orang tewas dari kedua belah pihak.

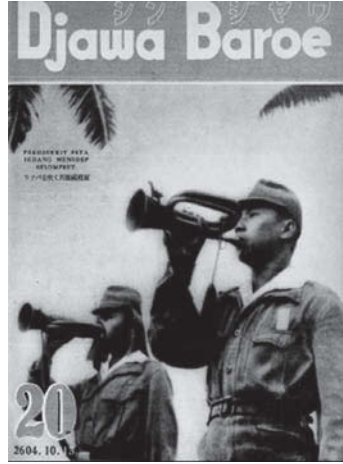
Djamaluddin Adinegoro (l. 1903). Tokoh pers nasional dari Sumatra Barat yang pernah menjadi editor kepala *Pewartu Deli* pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia ditunjuk sebagai pemimpin redaksi *Sumatora Simbun* (kemudian menjadi *Kita Sumatora Simbun*) dan diangkat menjadi wakil ketua *Shu sangi kai Sumatera Timur*.

Djawa Baroe. Diterbitkan di Jakarta oleh *Djawa Shinbun Sha* bekerja sama dengan harian *Asia Raja*. Majalah yang awalnya dipimpin oleh H. Nomoera, yang kemudian digantikan oleh S. Higashiguchi, ini diterbitkan antara awal Januari 1943 hingga awal Agustus 1945. Merupakan majalah propaganda yang sangat mengandalkan gambar daripada teks, yang bertujuan menampilkan kekuatan dan kehebatan

tentara Jepang dalam peperangan di Pasifik.

Majalah ini juga menampilkan berbagai artikel mengenai bentuk kerja sama politik antara kaum nasionalis Indonesia di Jawa, perekrutan para pemuda Indonesia ke dalam mesin perang Jepang, kebudayaan Jepang serta penerapannya di Indonesia, dan beberapa berita tentang para kolaborator Jepang lainnya di Asia. Selain itu, ada pula kolom cerita pendek serta beberapa ruang karikatur yang berisi propaganda Jepang.

Djawa Baroe diterbitkan dua kali sebulan tiap-tiap tanggal 10 dan 25. Memiliki oplah 20.000 eksemplar.



Djawa Bo Ei Giyugun Kanbu Rensetai. Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Biasa disebut juga sebagai *Renseitai*. Tempat pendidikan dan pelatihan yang diadakan bagi para kader Peta di Bogor, Jawa Barat. Nama ini kemudian diganti menjadi *Djawa Bo Ei Giyugun Kanbu Kyokutai* (Korps Pendidikan Pimpinan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa).

Djawa Eiga Kôsha. Perusahaan film Jawa. Dibentuk pada Oktober 1942 oleh *Sendenbu* dan dikepalai oleh Oya Sôichi, seorang kritikus film Jepang. Jawatan ini bertugas menerapkan kebijakan film di Jawa.

Djawa Engeki Kyokai. Perserikatan Oesaha Sandiwara di Jawa (POSD). Sebuah wadah yang dibentuk *Sendenbu* pada tanggal 1 September 1944 untuk mengawasi kelompok-kelompok teater di Jawa. Dipimpin oleh Hinatsu Eitaroo.

Djawa Hôkôkai. Himpunan Kebaktian Jawa. Dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1944 sebagai pengganti Poetera. Pemimpin tertinggi



Ir. Soekarno memberikan pengarahan kepada para pegawai di sebuah kantor pemerintahan di Bojonegoro Shu sebagai bagian program penerangan Jawa Hōkōkai.

perkumpulan ini adalah *Gunseikan*, dan Soekarno menjadi penasihat utamanya.

Organisasi ini merupakan kumpulan dari *Hōkōkai* atau jenis pekerjaan (profesi), antara lain *Izi Hōkōkai* (Himpunan Kebaktian Dokter), *Kyoiku Hōkōkai* (Himpunan Kebaktian Pendidik), *Fujinkai* (Organisasi Wanita), dan *Keimin Bunka Shidoso* (Pusat Budaya). Anggotanya mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Tionghoa, Arab, dan Indo-Eropa.

Dikontrol secara langsung oleh Jepang, *Jawa Hōkōkai* memiliki cabang hingga ke tingkat *tonarigumi* dan bertugas sebagai pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang. Hal ini sendiri memberikan keuntungan bagi Jepang maupun kaum nasionalis sendiri untuk menciptakan saluran komunikasi hingga tingkat desa.

Djawa Hōsō Kanrikyoku. Biro Pengawas Siaran Jawa. Didirikan pada bulan Oktober 1942 di bawah pimpinan Tomabechi. Tugasnya melakukan siaran domestik yang pengelolaannya dipercayakan kepada NHK, Siaran Radio Jepang. Biro ini memiliki cabang di kota-kota besar

di Jawa yang disebut *Hoso Kyoku*, seperti di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Djawa Kyodo Bo Ei Giyugun Tokubetsu Yugekitai. Gerilya Istimewa Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Unit khusus dalam Peta yang dilatih sebagai kesatuan intelijen. Seragam resmi anggotanya berwarna biru, tetapi dalam bertugas mereka sering kali mengenakan pakaian preman. Ditempatkan di bawah kepala bagian intel Tentara ke-16. Markas besarnya berada di Bandung, sementara kantor cabangnya berada di Malang, Salatiga, dan Lembang.

Djawa Shinbun. Surat kabar berbahasa Jepang yang diterbitkan pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942. Dipimpin oleh Suzuki Bunshiro. Merupakan salah satu sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa.

Djawa Shinbunkai. Serikat persuratkabaran di bawah pemerintahan militer Jepang di Jawa yang didirikan pada bulan Desember 1942. Ketuanya adalah Suzuki Bunshiro sementara ketua mudanya adalah Soekardjo Wirjopranoto. Tugasnya mengelola dan mengatur penerbitan surat kabar di Jawa.

Djenal Asikin Widjaja Koesoema, Raden (l. 1891). Seorang dokter karier, Koesoema merupakan pengajar di *Jakarta Ika Daigaku*. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945.

Doktor Moechtar, Peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada bulan November 1944, ketika suatu wabah tetanus menimpa ratusan *romusha* Jawa akibat vaksin yang terkontaminasi. Profesor Doktor Moechtar dari Eijkman Institute, yang merawat banyak korban wabah itu, menuduh para dokter militer Jepang sebagai penyebab tragedi tersebut karena mempersiapkan vaksin secara gegabah.

Pihak *Kempeitai* turun tangan, dan balik menuduh Dr. Moechtar sengaja menyebarkan vaksin yang terkontaminasi untuk mencegah para

romusha bekerja bagi Jepang. Ia ditangkap dan dipenjarakan selama sembilan bulan, sebelum akhirnya dipenggal. Jenazahnya kemudian dilindas dengan sebuah mesin giling. Soekarno menerima cerita versi *Kempeitai* mengenai peristiwa tersebut dan melebih-lebihkan jumlah korban hingga “ribuan” orang dalam memoarnya.

Dokuritu Zyunbi Iin Kai. *Lihat* Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai. *Lihat* Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dômei. Kantor berita pemerintah pendudukan Jepang. Didirikan pada bulan Oktober 1942. Fungsinya lebih ditekankan pada masalah korespondensi di bawah asuhan organisasi propaganda Jepang.

Doorman, Karel Willem Frederik Marie (1889–1942). Berasal dari sebuah keluarga militer, ia bergabung dengan Angkatan Laut



Belanda pada tahun 1906. Ia merupakan salah satu perwira Angkatan Laut Belanda yang memperoleh wing penerbang. Pada tahun 1938, setelah menduduki sejumlah jabatan di staf komando maupun memimpin kapal perang Angkatan Laut Belanda, ia diangkat menjadi Panglima Penerbangan Angkatan Laut di Hindia Belanda.

Ketika Jepang menyerbu Indonesia, ia ditunjuk untuk memimpin Armada Penyerang Gabungan ABDACOM. Sebagaimana tradisi pelaut lama, ia memilih tenggelam saat kapal komandonya ditenggelamkan dalam Pertempuran di Laut Jawa.

Eiga Haikyûsha. Perusahaan Pendistribusian film. Didirikan pada bulan April 1943 dengan tugas mendistribusikan film selama masa pendudukan Jepang.

Eitaroo, Hinatsu (1907–1952). Seorang Korea yang memiliki nama asli Hue Yong, Eitaroo ditugaskan oleh *Sendenbu* untuk memimpin *Jawa Engeki Kyokai* atau Perserikatan Oesaha Sandiwara di Djawa (POSD).

Ia banyak menulis naskah drama yang dipentaskan oleh berbagai kelompok sandiwara Indonesia untuk mendukung kebijakan militer Jepang. Karya terpopulernya, “Fadjar Telah Menjingsing”, dipentaskan di Jakarta dan Surabaya untuk menyambut Janji Koiso.

Ia juga membuat film “Calling Australia” (*Goshu no Yobigoe*, 1944). Dibuat sebagai film propaganda yang menampilkan kehidupan para tawanan Sekutu yang baik di kamp-kamp tawanan Jepang, pada akhirnya film tersebut menjadi bahan bukti yang memberatkan para pemimpin Jepang dalam pengadilan kejahatan perang di Tokyo.

Setelah Perang Pasifik berakhir, Eitaroo menolak dipulangkan ke Korea karena takut diadili sebagai antek Jepang. Ia memilih tetap tinggal di Indonesia dan mengganti namanya menjadi Dr Huyung serta menikahi seorang wanita Indonesia. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk membangun dunia teater dan film Indonesia yang sedang berkembang.

Empat Serangkai. Julukan yang diberikan kepada empat pemimpin Poetera, yaitu Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan



Anggota Empat Serangkai. Dari kiri ke kanan: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansoer.

K.H. Mas Mansoer. Mereka dianggap mewakili semua aliran politik dan Pergerakan Nasional.

F

F-Kikan. *Fujiwara Kikan*, atau Unit Fujiwara. Sebuah unit intelijen Jepang di bawah Mayor Fujiwara Iwaichi yang bertugas memperlancar serangan Jepang ke Malaya dengan merekrut penduduk setempat sebagai agen Jepang. Sejumlah agen Acehnya di Malaya kemudian merintis hubungan dengan PUSA, sebuah organisasi Islam yang berpengaruh di Aceh. Kolaborasi itu mencetuskan pemberontakan anti-Belanda di Kutaraja pada malam hari tanggal 11 Maret 1942 sehingga memudahkan pasukan Jepang menguasai Aceh. Banyak orang Indonesia yang menjadi anggota *F-Kikan* kemudian bekerja di berbagai instansi pemerintahan selama pendudukan Jepang di Sumatra Utara.

Bekas anggota F-Kikan berpose bersama pemimpin Jepang mereka, Masabuchi. Banyak di antara mereka kemudian menjadi pegawai pemerintahan pendudukan Jepang.



Latihan semimiliter bagi anggota Fujinkai.



Fujinkai. Perkumpulan Wanita. Awalnya merupakan Bagian Wanita dari Poetera. Setelah Poetera dibubarkan, Jepang mengalihkannya ke dalam *Fujinkai*. Selain beranggotakan para ibu, *Fujinkai* memiliki Bagian Pemuda yang disebut sebagai *Josi Saimentai* dan beranggotakan para gadis yang sudah berusia 15 tahun.

Awalnya, anggota *Fujinkai* dilatih untuk menyelenggarakan dapur umum dan P3K serta melakukan *kinrohoshi* di sawah dan ladang karena tenaga para pria banyak yang dipergunakan untuk keperluan militer. Kemudian, pada bulan April 1944, *Fujinkai* membentuk Barisan Wanita Istimewa yang disebut sebagai Barisan Srikandi.

Fuku Kaityoo. Wakil ketua.

G

Gakkutotai. Barisan Pelajar, terdiri atas para pelajar sekolah lanjutan. Setiap sekolah lanjutan dijadikan sebagai markas *chutai* (kompi) sementara tiap kelas merupakan *shotai* (seksi). Setiap *shotai* kemudian dibagi lagi menjadi *butai* (regu). Para pelajar putra mendapatkan

Anak-anak yang dihimpun dalam barisan Gakkutotai berlatih baris berbaris sebagai bentuk pelatihan semimiliter Jepang.



pelatihan dasar militer agar dapat menjadi bibit-bibit bagi berbagai barisan militer buatan Jepang. Setiap pelajar putra dilengkapi dengan bedil kayu yang dinamakan *mokuju*, sedangkan wakil kelas atau pemimpin regu membawa pedang dari kayu jati yang disebut *katana*.

Sementara itu, selain mendapatkan pelatihan dasar militer yang lebih ringan, para pelajar putri memperoleh latihan untuk menyelenggarakan dapur umum, P3K, dan sebagainya.

Gatot Mangkoepradja (1898–1968). Seorang tokoh nasionalis sejak zaman kolonial Belanda, Gatot Mangkoepradja didorong oleh Jepang untuk mengajukan usul pembentukan sebuah tentara sukarela Indonesia yang akan membantu pertahanan Pulau Jawa. Usulnya itu kemudian dijadikan pembenaran bagi Jepang untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air (Peta).

Dalam kapasitasnya sebagai tokoh Muhammadiyah, ia juga menyarankan kepada Jepang untuk memobilisasi para santri ke dalam sebuah formasi Muslim murni. Usulnya itu kemudian diterima oleh pemerintahan pendudukan Jepang dan hasilnya adalah pembentukan barisan Hizbullah.

Gerakan Angkatan Baroe Indonesia. Dibentuk dari pertemuan para pemuda radikal pada tanggal 15 Juni 1945, terutama para pemuda dari Asrama Menteng 31. Tujuannya adalah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat.

Gerakan Bawah Tanah. Kegiatan yang dilakukan para pemimpin nasionalis Indonesia yang menolak bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang, seperti Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin.

Gerakan mereka tidak menjurus perlawanan bersenjata, tetapi lebih bertujuan menggalang solidaritas dan memperteguh cita-cita perjuangan. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang saling berkomunikasi dan bekerja sama di sejumlah kota di Jawa. Salah satu kegiatannya adalah mendengarkan siaran radio Sekutu secara

diam-diam dan menyebarkan informasi yang diperoleh di antara mereka, serta melakukan diskusi.

Gerakan Rakjat Baroe. Didirikan pada tanggal 2 Juli 1945 berdasarkan hasil sidang ke-8 *Cuo Sangi In* dengan tujuan untuk mengobarkan semangat perang dan cinta tanah air. Pengurus pusat beranggotakan 80 orang, terdiri atas penduduk asli Indonesia, bangsa Jepang, golongan Tionghoa, Arab, dan Indo. Di antara tokohnya terdapat Chairael Saleh, Soekarni, B.M. Diah, Wikana, Harsono Tjokroaminoto, Soediro, dan S.K. Trimoerti.

Organisasi ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1945. Namun, perintah Jepang agar setiap pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk sepenuhnya kepada *Gunseikanbu* dan bekerja di bawah pengawasan para pejabat Jepang membuat para tokoh pemuda radikal menolak menduduki kursi yang telah disediakan.

Gerakan 3A. Organisasi yang disponsori oleh Jawatan Propaganda *Sendenbu* yang dipimpin oleh Shimizu Hitoshi dan Ichiki Tatsuo, dua orang Jepang yang mahir berbahasa Indonesia. Ketua umumnya adalah Mr. R. Samsedin.

Organisasi ini terkenal dengan slogan “Cahaya Asia Nippon! Pelindung Asia Nippon! Pemimpin Asia Nippon!”. Namun usianya singkat karena tidak didukung oleh para tokoh nasionalis Indonesia maupun pemerintahan militer Jepang sendiri. Akhirnya, organisasi ini dibubarkan pada bulan September 1942.



Gityoo zyumbi Sangi-in. Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan dalam BPUPKI.

Giyû-gun. Lasykar Rakyat. Dibentuk pada akhir September 1943, hampir bersamaan dengan pembentukan Peta di Jawa dan dibentuk

untuk mempertahankan Sumatra dari kemungkinan invasi Sekutu. Namun tidak seperti Peta, Giyû-gun hanya diperbolehkan menyusun unit terbesarnya setingkat kompi.

Giyuhei. Prajurit sukarela. Pangkat prajurit dalam Peta.

Gull Force. Pasukan ekspedisi Australia yang berpartisipasi dalam mempertahankan Ambon. Pasukan pimpinan Kolonel L.N. Roach, kemudian Mayor Scott, ini terdiri atas 1.170 orang prajurit yang didukung oleh sejumlah meriam anti-tank dan kendaraan lapis baja ringan. Mereka bertempur dengan begitu gigih dalam mempertahankan lapangan terbang Laha sehingga ratusan orang di antaranya kemudian dibunuh oleh pasukan Jepang yang murka saat orang-orang Australia itu menyerah.

Gumilir, Pemberontakan Peta. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 21 April 1945, di Gumilir, di luar kota Cilacap. Pada saat itu, sebuah kompi Peta merampas senjata dan amunisi dari gudang mereka di bawah pimpinan Budanco Koesaeri. Mereka kemudian melarikan diri menuju Gunung Srandil, yang akan digunakan sebagai basis gerakannya.

Pemberontakan yang menewaskan seorang kopral Jepang itu berhasil dipadamkan berkat bujukan Soedirman, Daidanco Peta Kroya, setelah Jepang berjanji tidak akan menghukum kampung-kampung yang menyembunyikan para pemberontak dan para prajurit Peta yang menyerah tidak boleh disiksa.



Budanco Koesaeri, pemimpin pemberontakan kompi Peta di Gumilir.

Sembilan belas orang otak pemberontakan kemudian dijatuhi hukuman berat, termasuk Koesaeri yang dijatuhi hukuman mati. Namun hukuman mati itu tidak pernah dilakukan karena Jepang keburu menyerah.

Gun. Kewedanaan.

Gunseibu. Pemerintah militer Angkatan Darat Jepang di daerah Jawa, yang berpusat di Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Gunseikan. Kepala pemerintahan militer di bawah *Saiko Sikikan*, panglima Tentara. Dipimpin oleh kepala staf dari Satuan Darat yang bersangkutan.

Gunseikanbu. Kantor *Gunseikan*. Instansi ini membawahi sejumlah *bu* (departemen), yaitu *Somubu* (Departemen Urusan Umum), *Naimubu* (Departemen Dalam Negeri), *Sangyobu* (Departemen Perekonomian), *Zaimubu* (Departemen Keuangan), *Shidobu* (Departemen Kehakiman), *Keimubu* (Departemen Kepolisian), *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), dan *Sendenbu* (Departemen Propaganda).

Gunseikan Kakka. Paduka Tuan Kepala Pemerintahan Militer.

Guntyo. Kepala *gun*, wedana.

Gunsireikan. Sebutan bagi Panglima Tentara ke-16. Disebut juga *Saiko Sikikan*.



Haga, Kasus. Peristiwa yang dilatari tuduhan Jepang mengenai suatu konspirasi anti-Jepang berskala besar di Banjarmasin pada tahun 1943. Pihak Jepang kemudian menangkap ratusan orang di dalam dan di luar kamp-kamp interniran di Kalimantan Selatan antara bulan Mei dan September 1943. Salah satu orang yang ditangkap adalah dr. B.J. Haga, bekas gubernur Belanda di Kalimantan, yang diseret dari kamp interniran di Banjarmasin. Ia meninggal dunia karena serangan jantung saat ditahan. Pada tanggal 20 Desember 1943, 25 orang yang dijatuhi hukuman karena dituduh terlibat dalam konspirasi dipenggal di lapangan terbang Banjarmasin. Lebih dari 200 orang mati karena Kasus Haga.

Hakko Ichiu. Istilah yang berarti “Delapan benang di bawah satu atap” ini dipopulerkan oleh Perdana Menteri Konoe Fumimaro pada tanggal 8 Januari 1940. Sekalipun propaganda Jepang menyatakannya sebagai suatu kebijakan “persaudaraan universal”, tetapi intisari dari *Hakko Ichi-u* adalah pembentuk an suatu kawasan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia, terutama Asia.

Harada, Kumakichi (1888–1947). Seorang perwira Jepang yang berpengalaman di Cina, baik sebagai perwira intelijen maupun panglima divisi dalam Tentara Kwangtung dan Tentara Ekspedisi Wilayah Cina Tengah Jepang.

Pada tahun 1945, Harada diangkat menjadi Panglima Tentara ke-16 di Jawa. Ia menjabat selama beberapa bulan sebelum dipindahkan ke Jepang untuk menyusun pertahanan di Shikoku. Ditangkap oleh Sekutu setelah perang berakhir, ia dieksekusi pada tahun 1947 sebagai seorang penjahat perang.

Harahap, Amir Sjarifoeddin (1907–1948). Politisi sayap kiri



Indonesia dan ketua Gerindo. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir menjalankan garis Komintern (Komunis Internasional) agar kaum Kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan Fasisme. Ia menerima dana dan instruksi dari Belanda untuk mengadakan gerakan bawah tanah selama pendudukan Jepang. Pada bulan Januari 1943, *Kempeitai* berhasil membongkar jaringannya dan menangkap Amir beserta sejumlah rekannya.

Ia dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup berkat campur tangan Soekarno dan Hatta.

Setelah kemerdekaan, kegiatan anti-Jepang Amir membuatnya menjadi salah satu dari sedikit tokoh Republik yang diterima baik oleh Sekutu untuk berunding. Sempat menjadi menteri pertahanan dan perdana menteri RI, pengaruh Amir merosot pasca-Persetujuan Renville. Ia kemudian ditangkap dan ditembak mati karena dituduh terlibat dalam Pemberontakan PKI di Madiun.

Harahap, Parada (1899–1959). Seorang wartawan dan pengusaha, Parada Harahap pernah pergi ke Jepang dengan memimpin sebuah rombongan misi dagang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Selama kunjungan itu, Jepang memberikan penghormatan kepadanya dengan menjuluki Parada sebagai “Raja Persuratkabaran dari Jawa”. Ia sendiri kemudian menulis sebuah buku mengenai perjalanannya ke Jepang, *Berhubung Perjalanan ke Dai Nippon*.

Selama pendudukan Jepang, ia menjadi pegawai kantor *Gun-seikanbu*. Ia memimpin harian *Sinar Baroe* di Semarang dan menulis sejumlah bahan propaganda untuk Jepang, termasuk buku *Nippon dimasa Perang*. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

Heiho. Pembantu tentara. Diperkenalkan pertama kali di wilayah jajahan Jepang di Korea pada tahun 1938, sistem *Heiho* mulai diber-

lakukan di Indonesia pada tanggal 22 April 1943. *Heiho* terutama bertugas sebagai pekerja transportasi, logistik, dan konstruksi. Yang lainnya bertugas dalam unit-unit penangkis serangan udara, tank, dan transportasi.

Perekrutan *heiho* untuk unit-unit Angkatan Darat Jepang kemudian diikuti oleh perekrutan *kempeiho* bagi *Kempeitai* maupun *Kaigun heiho* bagi Angkatan Laut Jepang, yang terutama bekerja dalam unit penyapu ranjau maupun penjaga pangkalan. Banyak *heiho* Indonesia yang dikirim ke garis depan untuk menghadapi pasukan Sekutu, seperti di front Birma, Rabaul, Morotai, dan Balikpapan.

Pada awalnya, *heiho* dibentuk terutama dari para tawanan perang bangsa Indonesia yang pernah bertugas dalam KNIL. Kemudian, perekrutan dilakukan di antara masyarakat umum.

Sebuah poster yang menggambarkan kesediaan Heiho Indonesia untuk berperang demi kejayaan Kekaisaran Jepang.



Pasukan *heiho* tidak memiliki komandan bangsa Indonesia sendiri, tetapi berada di bawah komando tentara Jepang. Adapun pangkat tertinggi untuk seorang *heiho* adalah sersan. Jumlah *heiho* diperkirakan ada 42.500 orang, di mana 25.000 orang di antaranya berasal dari Jawa, 2.500 dari Timor, sementara 15.000 dari daerah lainnya.

Heiho Amat. Kisah propaganda rekaan *Sendenbu* untuk merekrut *heiho*. Bercerita tentang kepahlawanan seorang *heiho* bernama Amat yang ber-*jibaku* (melancarkan serangan bunuh diri) untuk menghancurkan kubu musuh dengan menjinjing bom.

Helfrich, Emil Lambert (1886–1962). Seorang tokoh utama Angkatan Laut Belanda selama Perang Dunia II, Helfrich terlibat dalam pengembangan sebuah rencana Armada untuk Hindia Belanda di staf Angkatan Laut Belanda antara tahun 1919 hingga 1922. Saat Perang Pasifik pecah, ia memegang komando atas Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda. Keberhasilan armada kapal selamnya pada awal perang membuatnya dijuluki “Ship-a-day Helfrich”.



Laksamana Helfrich berusaha keras untuk membangun kerja sama dengan angkatan laut Sekutu di Asia Tenggara karena tahu Belanda tidak bisa mempertahankan Hindia Belanda sendirian. Ia kemudian ditunjuk untuk memimpin Armada Gabungan ABDACOM menggantikan Laksamana Thomas C. Hart dari Amerika Serikat. Namun, setelah hampir semua kapalnya ditenggelamkan dalam Pertempuran di Laut Jawa, ia diperintahkan mengungsi ke Srilanka. Di sana ia mempersiapkan kedatangan kembali Belanda ke bekas jajahannya.

Ia memimpin Angkatan Laut Belanda antara tahun 1945 hingga 1949.

Hindromartono, Raden, Mr. (l. 1908). Seorang tokoh buruh pada masa kolonial, Hindromartono merupakan pegawai *Shokuin Naimobu Rodo Kyoku*, Jakarta, pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, ia ditunjuk untuk menjadi anggota BPUPKI.

Hirohito (1901–1989). Dikenal juga sebagai Kaisar Shōwa, merupakan kaisar ke-124 Jepang yang memerintah antara tahun 1926 hingga 1989. Di atas kertas ia memimpin Jepang selama Perang Pasifik, di mana demi namanya pasukan Jepang menaklukkan banyak wilayah di Asia-Pasifik. Pada tahun 1943, ia menerima Soekarno, Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang sedang mengunjungi Jepang dan memberikan memberikan Bintang Kekaisaran (Ratna Suci) kepada ketiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri.



Hirohito menggunakan pengaruhnya secara pribadi untuk mengakhiri perang lewat pidato radionya pada tanggal 15 Agustus 1945. Sekalipun ada desakan untuk mengadilinya sebagai penjahat perang, panglima pasukan pendudukan Sekutu di Jepang, Jenderal MacArthur, hanya melucuti aspek kedewaan dalam jabatan kaisarnya. Sang jenderal lebih memilih menggunakan Hirohito sebagai alat mempersatu untuk membantu demokratisasi bangsa Jepang dan menjadi “simbol” negara baru itu.

Hizbullah. Nama lengkapnya adalah Barisan Hizbullah Sabilillah, atau *Kaikyo Seinen Teishintai*. Dibentuk atas saran Gatot Mangkoepradja

pada awal bulan September 1944. Anggotanya direkrut dari para santri yang berusia antara 17-25 tahun dari hampir seluruh daerah di Jawa dan Madura. Markas besar Hizbullah berkedudukan di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Masjkoer. Jabatan panglima barisan itu dipegang oleh K.H. Zainul Arifin.

Hoesein Djajadiningrat, P.A.A. (1886–1960). Putra bupati Serang



ini adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor dan profesor. Ia pernah menjadi anggota *Raad van Indie* (semacam dewan penasihat) pada zaman kolonial Belanda. Semasa pendudukan Jepang, ia ditunjuk menjadi kepala *Shūmubu* (departemen agama dalam pemerintahan militer Jepang di Jawa) dan *Chuo Sangi-In Pusat*. Pada tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI yang menyusun UUD 1945.

Hōsō Kanrikyōku. Jawatan yang mengurus dan menyelenggarakan radio di Jawa. Dipimpin oleh Tomabeci, jawatan ini memiliki delapan cabang radio di daerah-daerah yang disebut sebagai *Hōsōkyōku*, yaitu di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Surakarta.



I Goesti Ketut Pudja (1908–1977). Sarjana hukum pertama di Bali, pada awal pendudukan Jepang ia ditugaskan untuk mengaktifkan kembali pemerintahan sipil di Bali. Diangkat sebagai seorang penasihat dan kepala pemerintahan Sunda Kecil, pada bulan Agustus 1945 ia ditunjuk sebagai perwakilan Sunda Kecil dalam PPKI. Ikut serta dalam kegiatan menjelang dan selama pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia kemudian menjadi gubernur Sunda Kecil dan aktif dalam pemerintahan RI setelah kemerdekaan.

Ika Daigakku. Sekolah Tabib Tinggi. Merupakan gabungan dari bekas STOVIA yang berkedudukan di Jakarta dan NIAS yang berkedudukan di Surabaya. Dibuka pada tahun 1943, *Ika Daigaku* berkedudukan di Jakarta sedangkan cabangnya ada di Surabaya, yaitu di bekas NIAS. Pada tanggal 5 Mei 1943, di Surabaya dibuka *Ika Daigaku Sika Senmenbu*, atau Sekolah Dokter Gigi.

Selama pendudukan, terjadi sejumlah insiden di mana para mahasiswa menentang intervensi Jepang dalam kehidupan kampus. Yang terkenal adalah aksi penolakan terhadap instruksi agar mahasiswa pria harus digunduli rambutnya dan mengenakan topi pet. Akibatnya, sejumlah mahasiswa ditangkap *Kempeitai*, di mana beberapa di antaranya dikeluarkan atau diskors.

Indonesia Goseibi Iinkai. Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Didirikan Kantor Pengajaran Jepang di Jawa pada tanggal 20 Oktober 1943. Bertugas menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata

yang umum bagi bahasa Indonesia. Selama masa hidupnya, komisi ini berhasil menetapkan sekitar 7.000 istilah.

Di antara para anggota komisi ini terdapat Mr. R. Soewandi, Mr. S. Takdir Alisjahbana, Dr. R. Ng. Purbatjaraka, Sanusi Pane, dan Ir. Soekarno. Komisi ini sendiri dipimpin oleh dua orang Jepang, Mori (Kepala Kantor Pengajaran) dan Iciki.

Iwa Koesoemasoemantri, Raden (1899–1971). Salah seorang ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda dan aktif dalam pergerakan nasional, ia sempat dibuang oleh pemerintah kolonial ke Banda Neira dan Makassar. Selama pendudukan Jepang, ia sempat menjadi sekretaris Badan Pengawas Keamanan di Makassar sebelum kembali ke Jawa dan bekerja di kantor riset *Kaigun* cabang Jakarta. Diangkat sebagai anggota PPKI, ia pernah memegang sejumlah jabatan menteri dalam pemerintahan RI setelah kemerdekaan.

Imamura, Hitoshi (1886–1968). Veteran perang Cina-Jepang, Imamura memimpin Tentara ke-16 Jepang yang menyerbu Pulau Jawa

Letnan Jenderal Imamura Hitoshi (kedua dari kiri) berfoto bersama para petinggi militer Jepang di Saigon, Vietnam. Perwira paling kanan adalah Marsekal Terauchi, panglima Jepang di Asia Tenggara.



pada bulan Maret 1942. Setelah menerima penyerahan tentara Belanda di Kalijati, ia menjabat sebagai gubernur militer di Jawa antara bulan Maret–November 1942. Setelah itu, ia memimpin Tentara Wilayah ke-8 yang membawahi Kepulauan Solomon dan Papua hingga perang berakhir. Didakwa terlibat dalam pembunuhan terhadap sejumlah tawanan Sekutu di Jawa, ia dipenjarakan antara tahun 1946–1954.

Indramayu, Perlawanan Rakyat. Perlawanan yang dilakukan penduduk Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Terjadi sebagai bentuk protes terhadap kesewenang-wenangan pamongpraja yang bertindak atas perintah Jepang. Perlawanan ditumpas oleh Jepang dan beberapa penduduk terbunuh.

Interniran. Sebutan bagi penduduk sipil yang merupakan warga dari negara-negara Sekutu yang ditawan oleh Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, sekitar 100.000 orang sipil Belan-

Para wanita dan anak-anak Belanda yang berada di sebuah kamp interniran Jepang di Pulau Jawa.



da (termasuk beberapa orang Indonesia) dan warga Sekutu lainnya ditawan di kamp-kamp interniran di berbagai tempat di Indonesia.

Secara umum, Jepang memperlakukan para interniran dengan sangat buruk. Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya kebijakan dari Tokyo mengenai cara mengelola kamp-kamp maupun menangani para interniran. Akibatnya, nasib para interniran bergantung pada sikap para komandan kamp masing-masing, yang berbeda-beda di setiap kamp. Mereka memiliki kekuasaan yang nyaris tak terbatas dan tak terkontrol untuk membuat kehidupan menjadi demikian buruk bagi para interniran ataupun memperbaiki keadaan mereka sebisa mungkin.

Biasanya, para interniran dibiarkan mengurus kamp di bawah pengawasan ketat Jepang. Namun, umumnya mereka menderita akibat kekurangan gizi, wabah penyakit, disiplin yang keras, dan kebrutalan para penjaga. Beberapa interniran ditawan di kamp yang sama dari awal hingga akhir peperangan, sementara yang lainnya dipindahkan ke berbagai tempat.

Selama penawanan, kaum pria biasanya dipisahkan dari kaum wanita dan anak-anak. Sejak tahun 1944, anak-anak lelaki yang usianya dianggap cukup besar ditawan di kamp-kamp pria atau kamp-kamp anak-anak lelaki yang terpisah. Selain itu, ada juga kamp-kamp yang dipisah menurut garis rasial.

Menurut perkiraan, 16.000–25.000 orang interniran kehilangan nyawanya selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, sementara orang-orang Belanda yang selamat menghadapi ketidakpastian akan nasib mereka karena berkobarnya perang kemerdekaan Indonesia.



Jamiyah Islamiyah. Organisasi payung atau federasi kaum Muslim di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia Timur. Dipimpin oleh Tetsuo Kobayashi, Kepala Masalah Islam di pemerintahan AL Jepang. Organisasi ini tidak diperkenankan berurusan dengan masalah politik dan hanya dibiarkan melakukan kegiatan keagamaan. Setelah kematian Kobayashi pada tahun 1943, Jamiyah Islamiyah mengalami kemunduran.

Janji Koiso. Pernyataan politik yang dikeluarkan Perdana Menteri Jenderal Koiso Kuniaki pada tanggal 7 September 1944 dalam Sidang Istimewa *Teikoku Ginkai* ke-85 di Tokyo. Isinya pengumuman bahwa Indonesia diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Setelah pengumuman ini, Jepang mulai melonggarkan pengawasan terhadap

Kepala berita dari surat kabar Warta Bogor-Shū yang memberitakan Janji Koiso mengenai kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.

Kamis 14 September 1944 Tahun ke I—No. 3 24 Rabiulhita 1365 (1975)

Pengarang: "Awa-Ren"
Yamato Red Kite Club & Editors
Tel. 834-875-334

Dikeluarkan & Diterbitkan oleh:
Dewan Red Kite Club & Editors
Ditulis

Warta Bogor-Shū

Dikeluarkan seminggu sekali

Indonesia bakal Merdeka!

KALANGKANG KAMOELJAAN

Keterangan Perdana Mantri Koiso

Tokio, 7/9 (Domei).

Dina tanggal 7 September Perdana Mantri Koiso geus biantara dina sidang-istimewa Teikoku Ginkai ke-85 diantarana seperti dihandap ieu:

"Di wewengkon Hindia Timur dina taunoe ayeuk kaliwat, Dai Nippon Teikoku geus agadjalankeun tindakan tina hal miao-tjamper kana pamarentahan nagara ke rajai di wewengkon anoe berangkoeitan, tjoelag djeung penjelutan rajat sakomna.

Ti wangkid harita, sakoemna rajat sakoeitah eta wewengkon, geus norekkeun usaha anoe polara gedana pikeun ngarampommeun Peperangan Asia Timur Raja, kalawan bentu ngarobah ailep ti mimiti nepi ka ayeuna, sarta kalawan inasap sakrup-keurana kana makasor djeung toedjoan Dai Nippon Teikoku anoe sabenerna, djeung sadjaha ti eta dina lakoeing digawe baharengan sakoemna rajat, pikeun neendjang Pamarentahan Ralastantara di saha wewengkon anoe berangkoeitan, katijida tjoegomakomana.

Diblohor, di dina diomomkeun, jen Dai Nippon Teikoku agdilan kaserdi-kan sakomna bahana Indonesia engke kharosp, sopoja ke dijalan kito, sopoja-moga kana moerana sakabeh

Langkah anoe Kadeco

Waktor Tojo-san ngomomkeun ka postoesan Pamarentah Agung di Tokyo jen rajai di Djawa dipasihan hak pikeun ngiring-tjamper kana oerosan pama-ntahan, kamos ditegeskeun ogé, jen lalakon eta teh mangrupkeun langkal anoe mimiti, anoe bari diom- sol ke hak-hak anoe langkong leuek leut.

Nya eta pisan anoe kedah ditempoel ke rajat Indonesia, minangka lathar serep oedjasaana.

Sakoemaha anoe parantos kaseroni tjo, hak ngiring-tjamper tek parantos sawangwang ke ajana Chuoou Bangi la Sangi Kai serep pangangkatan-pang serepina Sa-ryo.

Penyusunan: Jen Chuoou Bangi la



Tumali djeung kaayaan anoe kasebet kana sakomna bahana Indonesia engke

kaum nasionalis dan mendirikan sejumlah organisasi yang “menghidupkan” aspirasi bangsa Indonesia. Harapannya, bangsa Indonesia akan membalas janji ini dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan rasa terima kasih.

Jibakutai. Barisan Berani Mati, dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 menurut contoh penerbang *kamikaze* Jepang. Diperkirakan beranggotakan 50.000 orang. Anggotanya mendapatkan pelatihan selama dua bulan di Ciburusa, Bogor, di bawah pengawasan Kapten Yanagawa.

Jugun Ianfu. Berarti “wanita penghibur yang mengikuti tentara”. Nama resminya adalah *teishintai*, atau “barisan sukarela penyumbang tubuh.” Didirikan pertama kali oleh Jepang di Shanghai pada tahun 1932, awalnya para wanita penghibur itu merupakan PSK Jepang yang secara sukarela memberikan pelayanan bagi tentara Jepang. Namun, saat terjadi peningkatan permintaan atas jasa mereka, militer Jepang juga merekrut ratusan ribu wanita dari wilayah kekuasaannya secara paksa untuk dijadikan budak seks bagi tentaranya, termasuk dari Indonesia.

Cuplikan sebuah film semidokumenter yang menggambarkan kekejaman pasukan Jepang terhadap kaum wanita Asia yang dijadikan Jugun Ianfu.



Pada tahun 1948, Mahkamah Militer Batavia membuka sebuah sidang pengadilan untuk mengadili kejahatan yang berkenaan dengan pemerkosaan dan pemaksaan terhadap para wanita Belanda untuk menjadi *jugun ianfu* oleh Jepang. Ini merupakan satu-satunya pengadilan kejahatan perang yang diketahui untuk menyidangkan kasus pelacuran di bawah paksaan. Mahkamah itu menjatuhkan hukuman mati dan penjara terhadap sejumlah petinggi militer Jepang Namun karena alasan yang tidak dijelaskan, nama-nama para korban dan pelaku tidak bisa dibukakan kepada publik hingga tahun 2025.

Kasus *jugun ianfu* asal Indonesia tidak disertakan dalam tuntutan mahkamah militer tersebut. Nasib bekas *jugun ianfu* Indonesia sendiri hingga kini masih terkatung-katung karena Jepang menolak tuntutan mereka untuk memperoleh kompensasi atas penderitaan mereka.

Jumpo. Sebutan bagi para informan Indonesia yang memata-matai masyarakat demi kepentingan Jepang.

Junyo Maru, Tragedi. *Junyo Maru* adalah sebuah kapal barang Jepang yang ditugaskan untuk mengangkut 2.300 orang tawanan Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia, serta 4.200 orang *romusha* dari Jawa yang akan dipekerjakan di Jalur Kereta Api Sumatra yang panjangnya 220 km dari Pekan Baru ke Muaro. Pada bulan September 1944, dalam perjalanannya ke Sumatra, kapal tersebut ditorpedo oleh sebuah kapal selam Inggris yang tidak mengetahui isi kapal itu di perairan Samudra Hindia di sebelah barat daya Sumatra dekat Mukomuko. Dari 6.500 penumpang non-Jepang di kapal itu, sekitar 5.620 mati tenggelam, menjadikannya sebagai bencana maritim terbesar selama Perang Dunia II.

Jurokugun. Panglima Tentara ke-16.

K

Kaigun Bukanfu. Kantor Penghubung Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang di Jakarta, yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan kedua angkatan. Dipimpin oleh Laksamana Maeda, kantor ini memiliki peranan besar dalam perkembangan nasionalisme Indonesia selama masa pendudukan Jepang.

Kaikyō Kyōshi Kōshu-chō. Pusat Pelatihan Islam. Dibentuk di Jakarta sebagai tempat pelatihan para ulama yang dibina oleh *Shūmubu*.

Kakyō Keibotai. Barisan semacam *Keibōdan* yang dibentuk di kalangan masyarakat Tionghoa di Jawa.

Kalidjati, Penyerahan. Perjanjian penyerahan pasukan Sekutu di Hindia Belanda kepada Jepang. Dilakukan oleh Panglima KNIL,



Letnan Jenderal Ter Poorten (kiri) menandatangani penyerahan pasukan KNIL di Hindia Belanda kepada Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Letnan Jenderal Hein Ter Poorten, kepada panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Imamura, pada tanggal 8 Maret 1942 di lapangan terbang Kalidjati, Subang, Jawa Barat. Pihak Belanda sengaja mendesain agar penyerahan itu hanya berisi kesepakatan penyerahan militer dengan mengajukan Ter Poorten sebagai penandatanganan penyerahan, bukannya Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborough-Stachouwer. Di kemudian hari, Belanda mengklaim bahwa bukan Hindia Belanda yang menyerah kepada Jepang, melainkan hanya angkatan bersenjataanya.

Kamp Interniran. Kamp-kamp tahanan bagi penduduk sipil yang merupakan warga negara Sekutu. Sebagaimana kamp-kamp tawanan perang lainnya, kamp-kamp interniran berada di bawah pengawasan Biro Tawanan Perang di Kementerian Peperangan Jepang. Namun, selama bulan-bulan pertama pendudukan di Indonesia, kamp-kamp ini berada di bawah kontrol langsung para panglima wilayah pendudukan sehingga ada perbedaan yang cukup besar mengenai cara bagaimana para tawanan diperlakukan di setiap daerah.

Di Jawa dan Sumatra, kamp-kamp ini pada awalnya berada di bawah pengawasan departemen kepolisian dari pemerintahan pendudukan militer Jepang. Hingga bulan April 1943, pengawasan terhadap kamp-kamp wanita di beberapa daerah di Jawa diberikan kepada para pejabat Indonesia yang berada di bawah pengawasan Jepang. Namun pada tanggal 1 April 1944, atas perintah dari Tokyo, seluruh pengawasan diambil alih secara langsung oleh pemerintahan militer. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah para interniran berhubungan secara langsung dengan penduduk pribumi atau membantu musuh dalam keadaan apa pun setelah kedudukan Jepang semakin didesak oleh pasukan Sekutu.

Sebaliknya, pada awalnya, kamp-kamp interniran di Indonesia Timur dikontrol secara langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Baru pada tahun 1943, pengawasan terhadapnya diambil alih oleh *Minseibu*.

Saat penawanan dimulai, ada banyak kamp kecil, tetapi kemudian Jepang mulai mengkonsentrasikan tawanan. Pada tahun 1944, sejumlah

besar kamp interniran dibubarkan dan para interniran dikirimkan ke kamp-kamp yang lebih besar. Apabila pada tahun 1942 ada 155 kamp interniran di seluruh Indonesia, pada bulan Agustus 1945 jumlahnya berkurang hingga sekitar 43.

Jepang menggunakan berbagai bangunan untuk menawan para interniran, seperti sekolah, gudang, rumah sakit, dan penjara. Jumlah tawanan di kamp-kamp interniran sendiri berbeda-beda. Pangkal Pinang di Sumatra hanya menahan empat orang, sementara Cipahit di Bandung menampung 14.000 orang.

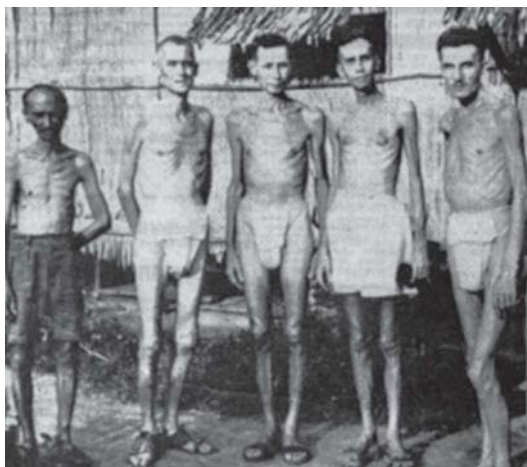
Kamp-kamp interniran biasanya dipimpin oleh para perwira cadangan ataupun pejabat sipil yang ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut. Terutama selama periode pemerintahan militer, para komandan kamp dan bawahannya biasanya orang-orang yang berpikiran sederhana: para prajurit rendahan (bintara bahkan prajurit biasa) yang tidak terlatih untuk menangani pekerjaan semacam ini. Demikian pula dengan para penjaga kamp yang terdiri atas orang-orang Korea maupun *Heiho* Indonesia.

Setelah administrasi kamp-kamp interniran dipindahkan ke bawah pengawasan langsung pemerintahan militer, kehidupan para interniran agak membaik. Alasannya, dibandingkan pemerintahan sipil, tentara Jepang lebih mampu menyediakan peraturan dan bahan pangan serta sandang yang diperlukan di kamp-kamp interniran.

Pembebasan kamp-kamp interniran sendiri tidak berlangsung secara serentak. Sejumlah kamp dibebaskan ketika pasukan Sekutu menyerbu wilayah di mana kamp-kamp itu berada, terutama di bagian timur Indonesia. Namun kebanyakan baru dibebaskan berbulan-bulan setelah penyerahan Jepang.

Kamp Tawanan Perang. Kamp-kamp yang digunakan untuk menahan para tawanan militer Sekutu yang berada di bawah pengawasan Biro Tawanan Perang di Kementerian Peperangan Jepang. Ada dua jenis kamp tawanan perang yang didirikan Jepang. Pertama, kamp-kamp “reguler”, yaitu kamp-kamp yang tetap beroperasi hingga penyerahan Jepang, seperti beberapa kamp besar di Jawa. Kedua, kamp-kamp kerja

Bekas anggota KNIL Belanda yang kurus kering berpose setelah dibebaskan Sekutu dari sebuah kamp tawanan perang Jepang pada saat Perang Pasifik berakhir.



sementara, misalnya kamp-kamp yang didirikan untuk pembangunan lapangan terbang di Maluku maupun Jalan Kereta Api Pekanbaru di Sumatra.

Kampung Biduk-biduk, Perlawanan. Sebuah perlawanan rakyat di Kalimantan pada bulan Juli dan Agustus 1945. Dilatari oleh penangkapan dan pembunuhan terhadap sejumlah pemuka masyarakat oleh Jepang. Akibatnya, masyarakat Kampung Biduk-biduk menyerang dan menewaskan tiga orang Jepang dalam sebuah acara minum-minum. Perlawanan yang dilakukan kampung tersebut kemudian menyebar ke sejumlah kecamatan di sekitarnya.

Kana Djawa Shinbun. Surat kabar berbahasa Jepang yang menggunakan huruf *katakana*. Bertujuan menyebarkan penggunaan bahasa Jepang dan meningkatkan kemampuan baca-tulis penduduk Jawa.

Kan Po. Surat kabar resmi yang dikeluarkan *Gunseikanbu* di Jawa.

Kantor Oeroesan Peranakan. Jawatan yang mengurus orang Indo selama pendudukan Jepang di Jawa. Tokohnya yang terkemuka adalah P.F. Dahler dan A.Th. Bogaardt.

Kasman Singodimedjo, Raden, Mr. (1904–1982). Seorang guru agama Islam serta pernah menjadi ketua pengurus besar Jong Islamiten Bond dan Muhammadiyah pada masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang ia bergabung dengan Peta. Ia ditunjuk menjadi komandan *Daidan* Peta di Jakarta dan mewakili golongan muda di BPUPKI dan PPKI. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia sempat menjadi ketua BKR sebelum ditunjuk sebagai Jaksa Agung Indonesia dan Menteri Muda Kehakiman. Selain itu, ia juga adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR.

Kayadoe, J. (1901–1943). Seorang dokter dan aktivis Sarekat Ambon, J. Kayadoe memimpin organisasi Badan Pertolongan Ambon–Timor (Bototi) di Jakarta, yang bertujuan meringankan penderitaan orang Indonesia Timur di Jawa yang dicap pro-Belanda selama masa pendudukan Jepang. Namun Kayadoe dan Mr. J. Latoeharhary kemudian ditangkap Jepang karena dianggap sebagai mata-mata dan bekerja sama dengan Sekutu. Dibawa ke Bogor dan disiksa oleh *Kempeitai*, Kayadoe meninggal dunia pada bulan Agustus 1943.

Keibōdan. Korps Kewaspadaan, dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Bertugas sebagai barisan pembantu polisi untuk mengamankan desa, mengatur lalu lintas, dan berbagai pekerjaan polisi lainnya. Di seluruh Jawa, *Keibōdan* dilaporkan memiliki anggota lebih dari satu juta orang.

Selain di Jawa, *Keibōdan* dibentuk pula di Sumatra dan daerah Indonesia lainnya yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Jepang. Di Sumatra, *Keibōdan* dikenal dengan nama *Bōgōdan* sementara di Kalimantan disebut sebagai *Borneo Konan Hōkōkudan*.





Staf Keimin Bunka Shidōsō berpose bersama. Sosok di tengah adalah Shimizu Hitoshi, yang diapit oleh Mr. R. Samsuudin sedangkan di belakangnya adalah Mr. M. Yamin.

Keimin Bunka Shidōsō. Pusat Kebudayaan. Didirikan pada 1 April 1943, merupakan badan yang mengawasi dan mengarahkan agar karya-karya seniman Indonesia (seperti roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film) tidak menyimpang dari kebijakan Jepang. Badan ini memiliki lima bagian, yaitu bagian film, musik, sandiwara, seni tari, serta seni lukis dan ukiran.

Kelompok Menteng 31. Terdiri atas para anggota Asrama Angkatan Baroe Indonesia, sebuah kelompok “generasi baru” yang dibentuk oleh *Sendenbu*. Dikenal sangat anti-Belanda.

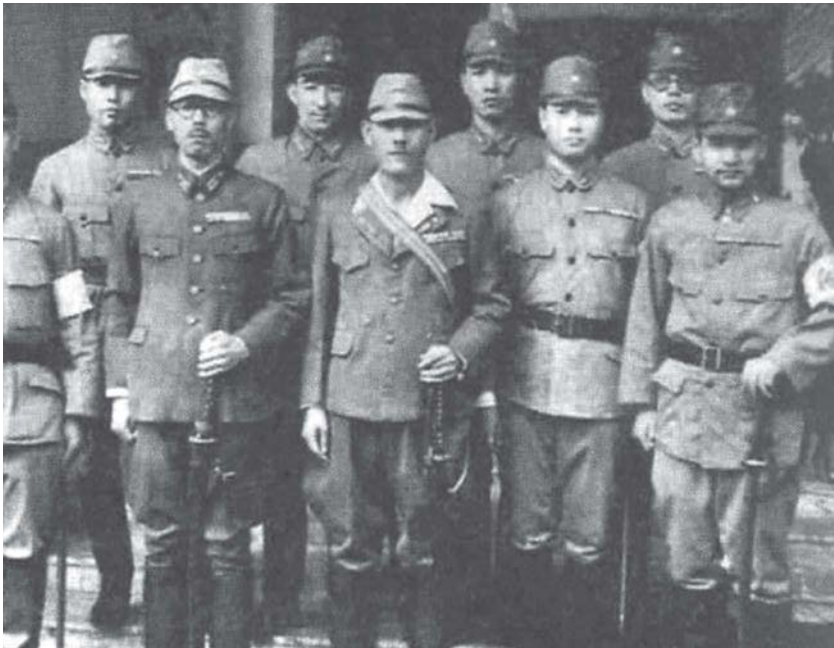
Kempeitai. Polisi militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang antara tahun 1881 hingga 1945. Secara organisasi, memiliki sebuah markas besar di setiap Wilayah Angkatan Darat, yang dipimpin oleh seorang mayor jenderal dengan seorang kolonel sebagai perwira eksekutif. Setiap markas besar terbagi atas dua atau tiga kantor lapangan, yang dipimpin oleh seorang letnan kolonel. Masing-masing kantor lapang-

an rata-rata beranggotakan 375 orang. Selama Perang Dunia II, diperkirakan terdapat sekitar 75.000 orang anggota *Kempeitai*.

Sebagaimana wilayah pendudukan Jepang lainnya, di Jawa dan Sumatra, *Kempeitai* memiliki unit-unit pembantu yang terdiri atas para sukarelawan lokal yang disebut *Kempei-ho* maupun unit-unit kepolisian setempat. Mereka terdiri atas orang Indonesia, Tionghoa, Arab, dan beberapa orang Belanda. Selain bekerja sebagai penerjemah, banyak di antaranya yang bertindak sebagai sel mata-mata.

Kempeitai ditakuti karena terkenal sangat kejam dalam memperlakukan tahananannya. Sebenarnya, menurut hukum internasional, penduduk sipil di wilayah pendudukan wajib diadili atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya di hadapan sebuah mahkamah militer secara adil. Namun *Kempeitai* mengabaikannya, dan biasanya memilih melakukan *kikōsaku*. Hal ini dimungkinkan karena para pemimpinnya juga merangkap tugas sebagai ketua majelis mahkamah militer.

Anggota Kempeitai berpose bersama. Polisi militer angkatan darat Jepang ini sangat ditakuti karena kekejamannya.



Jadi, mereka dapat saja memilih untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa melalui proses pengadilan sehingga vonis hukuman mati dilaksanakan secara diam-diam dan rahasia. *Kempeitai* sendiri kemudian menyalahkan Belanda atas praktik *kikōsaku* di Indonesia dengan alasan Belandalah yang mendorong berbagai kegiatan yang dihukum mereka sehingga hal tersebut tidak bisa diselesaikan melalui saluran hukum yang normal.

Kempeitai juga bertanggung jawab mengatur pelacuran di kawasan yang diduduki Jepang. Tugas ini termasuk mendaftarkan dan memeriksa kesehatan para pelacur. Mereka juga memainkan peranan penting dalam merekrut “wanita penghibur” di rumah-rumah bordil Angkatan Darat di seluruh wilayah pendudukan Jepang.

Ken. Kabupaten.

Kenkōku Gakuin. Akademi Pamongpraja. Berkedudukan di Jakarta.

Kerukunan Minangkabau. Organisasi bentukan Jepang di Sumatra Barat yang didirikan sebagai jembatan personal antara Gubernur Yano Kenzo dengan orang-orang Sumatra Barat. Badan konsultasi ini antara lain beranggotakan Chatib Suleiman, Mohammad Sjafei, Dr. Madjo Urang, dan Syekh Djamil Djambek.

Ki Hadjar Dewantara (1889-1959). Memiliki nama asli R.M. Soewardi Soeryaningrat, salah satu tokoh pendiri Indische Partij ini pada masa pendudukan Jepang pernah ditunjuk menjadi salah seorang pucuk pimpinan Poetera. Ia juga aktif sebagai anggota Panitia Adat dan Tata Negara serta anggota *Chuo Sangi-In* dan *Soomu Jawa Hokookai* Yogyakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Ia kemudian menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan pertama RI.

Kikōsaku. Arti harafiahnya adalah “seni neraka”. Mengacu pada praktik *Kempeitai* untuk langsung mengeksekusi orang-orang yang

dicurigai menentang Jepang tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi biasanya dilakukan dengan cara memenggal kepala korban.

Kimigayo. Lagu kebangsaan Jepang.

Kinrohoshi. Kerja bakti untuk kepentingan umum. Meliputi pekerjaan dari membersihkan selokan, memperbaiki jembatan dan jalan hingga membantu pembangunan lapangan terbang.

Kipas Hitam. Istilah yang mengacu kepada orang Indonesia yang menjadi mata-mata Jepang. Selain itu, juga mengacu pada kelompok ekstremis anti-orang kulit putih yang dibentuk oleh Shimizu Hitoshi dari kalangan para pemuda Indonesia.

Kita Sumatera Simbun. Surat kabar yang diterbitkan di Bukit-tinggi pada masa pendudukan Jepang. Pemimpin redaksinya adalah Djamaluddin Adinegoro, bekas editor kepala *Pewarta Deli*.

KNIL. *Koninklijk Nederlands Indische Leger*, Tentara Kerajaan untuk Hindia Belanda. Menurut catatan Belanda sebelum Perang Dunia

Sebuah tim meriam anti-tank KNIL sedang berlatih. Minimnya pelatihan dan senjata modern membuat KNIL dengan mudah disapu bersih tentara Jepang.



II, komposisi rasial KNIL adalah kira-kira 70% orang Indonesia dan 30% Eropa. Pada awal 1942, KNIL berkekuatan 122.600 orang. Namun hanya sedikit di antara mereka yang dilatih dan dipersenjatai dengan baik. Karena itu, sekalipun di beberapa tempat menunjukkan kemampuan tempur yang baik, secara keseluruhan KNIL tidak mampu menghadapi pasukan Jepang yang lebih terlatih dan dipersenjatai dengan baik.

Kochi. Daerah Istimewa. Di Jawa terdapat dua *kochi*, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Kōgyō Daigaku. Perguruan Teknik Tinggi. Berkedudukan di Bandung.

Koiso, Kuniaki (1880–1950). Seorang prajurit karier, Koiso menduduki berbagai posisi militer terkemuka dan pemerintahan selama dasawarsa 1920-an dan 1930-an, termasuk wakil menteri peperangan, panglima Tentara Kwantung di Manchuria, dan menteri luar negeri. Antara tahun 1942–1944, ia menjabat sebagai gubernur jenderal Korea.



Pada tahun 1944, Koiso diangkat menjadi perdana menteri menggantikan Tojo. Dalam pidatonya tanggal 7 September 1944, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di Indonesia, ia memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia.

Sekalipun dijuluki “Macan Korea” karena kekasaran pemerintahannya di negeri itu, Koiso dijadikan “Macan Ompeng” oleh para perwira Angkatan Darat Jepang yang lebih radikal. Ia akhirnya dicopot dari kedudukannya sebagai perdana menteri karena gagal mengupayakan perdamaian dengan Sekutu. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Sekutu setelah perang dan meninggal dunia di penjara.

Kokumin Gakko. Sekolah Rakyat. Sekolah dasar enam tahun.

Konan Hokokudan. Barisan Patriotik untuk Pembangunan Selatan. Barisan pemuda yang dibentuk di Kalimantan pada bulan November 1943. Beranggotakan 300-an pemuda berusia 20–35 tahun. Mendapatkan pelatihan militer, barisan ini bermarkas besar di Banjarmasin dan berada di bawah komando direktur Seksi Masalah Politik *Borneo Minseibu*. Pada bulan Mei 1945, barisan ini dinamakan kembali sebagai *Boei Teisin Tai*.

Kongres Pemoeda Seluruh Djawa. Kongres yang dipelopori oleh Angkatan Moeda Indonesia ini berlangsung pada tanggal 16–19 Mei 1945 di Vila Isola, Bandung. Dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa. Kongres menghimbau para pemuda di Jawa agar bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah Jepang.

Dua resolusi dikeluarkan, yaitu agar semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda, dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional serta dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Juga dikeluarkan dukungan sepenuhnya untuk bekerja sama erat dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kiristoy Ko Rengokai. Dewan Kristen. Organisasi payung atau federasi gereja-gereja Kristen di Minahasa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Maluku yang berada di wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Didirikan pada bulan Maret 1943 dan dipimpin oleh para pendeta yang didatangkan dari Jepang, seperti Shusho Miyahira dan Shirato. Organisasi ini bertujuan menarik dukungan dari orang Kristen Indonesia dan menghilangkan isu bahwa Jepang ingin memusnahkan penganut Kristen yang dicurigainya bersikap pro-Belanda dan pro-Sekutu.

Koci. Daerah istimewa, yakni Surakarta dan Yogyakarta.

Ku. Desa.

Kumiai. Koperasi gaya Jepang. Tujuan resmi pembentukannya adalah melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesi yang terancam oleh orang Tionghoa serta memperkuat perkembangan industri nasional. Namun *kumiai* bertindak sebagai dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian, baik pribumi maupun Tionghoa, yang dikendalikan semasa perang.

Kung Yung Pao. Surat kabar berbahasa Cina di Jakarta. Dipimpin oleh Oey Tiang Tjoei. Memiliki oplah 5.000 eksemplar.

Laha, Pembantaian. Peristiwa pembunuhan terhadap sekitar 300 orang tawanan perang asal Australia dan Belanda di lapangan terbang Laha setelah jatuhnya Ambon ke tangan Jepang pada bulan Februari 1942. Mereka dibunuh sebagai pembalasan atas tenggelamnya sebuah kapal penyapu ranjau Jepang.

Pada tahun 1946, 93 orang anggota tentara Jepang yang terlibat dalam kejahatan itu diadili oleh sebuah mahkamah militer Australia. Empat orang di antaranya, termasuk Letnan Kolonel Hatakeyama Kunito yang memimpin eksekusi, dijatuhi hukuman gantung. Namun orang yang memerintahkan pembantaian tersebut, Laksamana Madya Hatakeyama meninggal dunia sebelum sempat diadili.

Sebuah potongan surat kabar Australia yang melaporkan pembunuhan terhadap 300 tawanan perang Australia di Ambon oleh pasukan Jepang.

MASSACRE OF 300

By WARWICK COSTIN

CHILLING new facts have emerged about the cold-blooded World War II mass execution of more than 300 Australian POWs which even to this day remains relatively untold.

The story is that of the men of the AIF's 2/21st Battalion, known as Gull Force, who were sent to defend the small Dutch island of Ambon, now part of Indonesia.

A total of 1131 troops and officers left Darwin in December 1941. They were in combat in less than two months.

Within four days of intense fighting against a Japanese invasion force, they were forced to

ANZAC DAY '87

Some knelt blindfolded on the ground, their hands tied behind their backs. There they were

40 were put to death in the same manner.

Among this group was the Australian commanding officer at Laha, Major M. W. Newbury, who had led a surrender party of about 10 men down from the island's heavily-timbered hills during the previous 48 hours.

An attempt by Australian and Dutch forces to hold the airstrip against

In fact, the entire force was probably the loneliest and most isolated group of Australia's defence machine.

Those who survived spent almost four years in one or two prison camps - locked in seclusion from the outside world.

Between 300 and 700 died while serving as prisoners of war.

The Australian War Cri-

"Perhaps because the information has been hard to obtain or because of the trauma it may have created, many people have been denied knowledge of the circumstances in which loved ones suffered and died," he said.

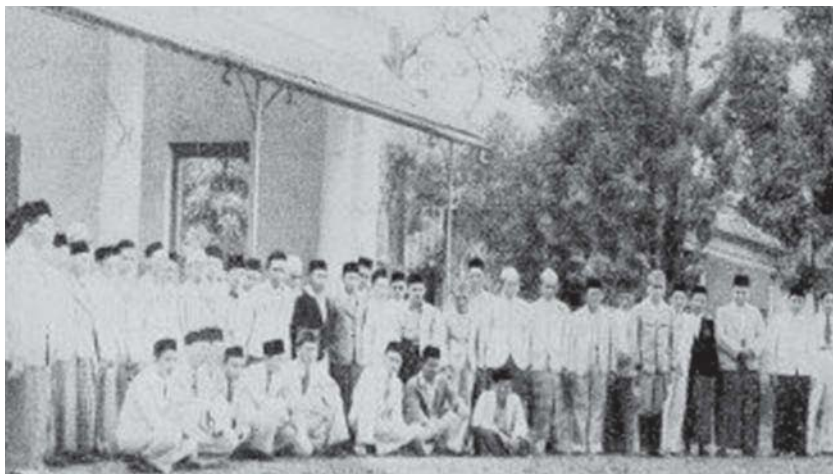
He and other researchers say different chapters from Australia's war history - the Kokoda Trail,

Landwacht. Pengawal Negeri. Sebuah jawatan bela diri yang dibentuk oleh Belanda di daerah perkebunan dan terdiri atas para pemilik perkebunan dan stafnya serta beberapa orang lokal yang “terpercaya”. Berada di bawah komando KNIL, tugas utamanya adalah mempertahankan perkebunan mereka sendiri dan, jika diperlukan, membantu perkebunan-perkebunan di sekitarnya. Dipersenjatai dengan senapan berburu.

Landstorm. Unit pertahanan darurat yang terdiri atas para wajib militer Eropa yang berusia 32 tahun ke atas. Ada beberapa batalyon Landstorm yang bertugas dengan KNIL di Jawa. Anggota *Landstorm* lainnya bertugas dengan unit meriam pantai atau unit-unit kecil lainnya di berbagai pulau di Indonesia.

Latihan kijaji. Kursus indoktrinasi yang dilakukan Jepang untuk berhubungan langsung dengan para guru agama Islam di pedesaan. Praktik Jepang yang juga bersifat *divide et impera* ini memberikan konsesi penting yang cenderung meningkatkan status dan kekuatan para pemimpin agama di pedesaan berhadapan dengan golongan priyayi.

Para peserta program Latihan Kijaji berpose bersama para instruktur Jepang mereka.



Latoeharhary, Johanes (1900–1959). Seorang pegawai kolonial yang



aktif dalam dunia pergerakan nasional, terutama dalam Jong Ambon dan Parindra, Latoeharhary sempat ditangkap Jepang pada masa awal pendudukan *Dai Nippon* di Malang. Ia kemudian dibebaskan dan pindah ke Jakarta, di mana ia diangkat sebagai kepala kantor Urusan Penduduk Maluku di Jawa.


Latoeharhary juga aktif di organisasi Gerakan Pemuda Maluku yang bekerja sama dengan mahasiswa *Ika Daigaku*. Ia kemudian diangkat sebagai perwakilan Maluku dalam BPUPKI maupun PPKI.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Latoeharhary diangkat menjadi gubernur Maluku dan aktif dalam pemerintahan RI.

Laut Jawa, Pertempuran. Rangkaian pertempuran laut antara armada Sekutu dan Jepang di perairan sebelah utara dan barat Pulau Jawa antara tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 1942. Pertempuran itu dimulai oleh usaha armada Laut Sekutu di bawah Laksamana Karel Doorman untuk menghancurkan konvoi yang membawa pasukan pendarat Jepang. Usaha untuk menemukan konvoi itu gagal dan sebagian besar armada Sekutu, bersama Doorman sendiri, ditenggelamkan di perairan Laut Jawa.

Dua kapal utama Sekutu yang tersisa, *Houston* dan *Perth*, berhasil menemukan konvoi Jepang yang mendarat di Banten, melakukan serangan yang menyebabkan panglima pasukan penyerbu Jepang, Letnan Jenderal Imamura, nyaris tenggelam setelah kapal yang ditumpanginya ditenggelamkan, sebelum akhirnya ditenggelamkan armada Jepang.

Hanya dalam waktu tiga hari saja, angkatan laut dan pasukan udara Jepang telah menghancurkan lebih banyak kapal Sekutu daripada yang mereka capai di Pearl Harbor. Di dasar perairan tenang Laut Jawa yang menipu, bersemayam bangkai lima kapal penjelajah dan



Kapal penjelajah Belanda De Ruyter sedang digempur oleh serangan udara Jepang di lepas pantai Kangean, 4 Februari 1942. Dalam pertempuran di Laut Jawa tersebut, hampir semua kapal perang armada gabungan Sekutu ditenggelamkan oleh Jepang.

tiga belas kapal perusak Sekutu beserta mayat ribuan perwira dan pelautnya. Sebaliknya, Jepang tidak kehilangan satu pun kapalnya. Kerugian yang dideritanya hanyalah kerusakan yang tidak berarti pada sebuah kapal perusak.

Lawang, Kecelakaan Kereta Api. Kecelakaan yang menimpa sebuah rangkaian kereta api yang mengangkut Resimen Penangkis Serangan Udara Berat ke-77 (Welsh) dari Jakarta ke Surabaya. Dalam kecelakaan yang terjadi di Lawang pada 6 Februari 1942 itu, 26 orang prajurit tewas sementara banyak lagi yang terluka.

Liem Koen Hian (1897–1952). Seorang tokoh wartawan dan nasionalis Indonesia, Liem Koen Hian adalah tokoh Partai Tionghoa Indonesia yang mendukung gerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1930-an, ia aktif melakukan propaganda anti-Jepang sehingga sempat ditahan selama masa pendudukan Jepang. Namun ia kemudian dibebaskan berkat koneksinya yang berkebangsaan Jepang.

Pada tahun 1945, Liem dipilih menjadi anggota BPUPKI sebagai wakil minoritas Tionghoa. Ia kemudian aktif membantu perjuangan Indonesia selama Perang Kemerdekaan, tetapi kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan RI karena ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Soekiman selama beberapa waktu atas tuduhan menjadi simpatisan kiri.

Liga Anti-Fasis. Organisasi perlawanan bawah tanah yang terdiri dari orang-orang Tionghoa Komunis di Medan. Giat melakukan

propaganda anti-Jepang dan berupaya mengumpulkan dana bagi gerilyawan Komunis Cina yang beroperasi di Malaya. Pada tahun 1943, *Kempeitai* berhasil mengetahui keberadaan mereka dan menggulung organisasi ini.

Longnawang, Pembantaian. Peristiwa pembunuhan oleh pasukan Jepang terhadap para pria, wanita, dan anak-anak berkebangsaan Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat di Longnawang, Kalimantan Timur. Dalam peristiwa yang terjadi antara 26 Agustus hingga 23 September 1942 itu, sekitar 41 orang terbunuh.

M

MacArthur, Douglas (1880–1964). Jenderal Amerika dan marsekal mandala Tentara Filipina. Pernah menjadi kepala staf Angkatan Darat AS pada dasawarsa 1930-an, ia memainkan peranan penting dalam mengalahkan Jepang di arena Pasifik selama Perang Dunia II. Pada awalnya, Indonesia dimasukkan ke dalam lingkup komandonya, tetapi saat Jepang menyerah ia mengalihkan tugas untuk melucuti pasukan Jepang di Indonesia ke tangan komando SEAC pimpinan Lord Mountbatten. Ia kemudian bertugas menjadi panglima pasukan pendudukan Sekutu di Jepang dan memimpin pasukan PBB dalam Perang Korea, sebelum akhirnya dicopot oleh Presiden Harry S. Truman akibat pertikaian mengenai masalah strategi.

Maeda, Tadashi (1898–1977). Perwira Angkatan Laut Jepang, pernah bertugas sebagai atase Angkatan Laut di Belanda dan mengumpulkan bahan intelijen selama kunjungan misi Kobajashi di Batavia pada bulan Oktober 1940. Pada bulan Agustus 1942, ia diangkat menjadi kepala *Kaigun Bu-kanfu* (kantor penghubung Angkatan Laut dengan Tentara ke-16 Jepang di Jawa).



Berdasarkan “Janji Koiso” untuk memerdekakan Indonesia, Maeda mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk mempersiapkan kader pemuda bagi suatu Indonesia merdeka. Bahkan ia beberapa kali melakukan intervensi untuk mencegah *Kempeitai* bersikap keras terhadap aktivitas

yang dianggap subversif di kalangan kaum nasionalis yang berada di bawah payung organisasi *Bukanfu*.

Ia juga memberikan dukungan dana dari kas angkatan laut bagi beberapa perjalanan muhibah yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta ke berbagai wilayah Indonesia.

Maeda adalah orang Jepang pertama yang mengonfirmasikan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Soekarno-Hatta. Melanggar perintah komando Angkatan Perang Sekutu untuk mempertahankan *status quo*, ia juga menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat pembuatan teks proklamasi sekaligus perlindungan dari sikap tidak bersahabat pemerintahan militer Angkatan Darat yang memilih menjaga *status-quo* hingga kedatangan Sekutu di Indonesia.

Sikap pro-Indonesia ini membuat Maeda ditangkap oleh Sekutu pada tahun 1946 dan ditahan selama setahun sebelum ia dikembalikan ke Jepang pada tahun 1947. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia menganugerahkannya bintang *Jasa Nararya* atas jasa-jasanya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Mahkamah Militer Sementara Belanda. Mahkamah yang diadakan Belanda untuk mengadili para penjahat perang Jepang di Indonesia. Lebih dari 3.000 orang Jepang di Indonesia dicurigai terlibat dalam kejahatan perang. Sekitar 1.000 di antaranya, beserta 43 orang penjaga kamp asal Korea dan Taiwan, diadili oleh Belanda di Indonesia.

Dua belas Mahkamah Militer Sementara diadakan Belanda untuk mengadili para tertuduh. Pengadilan pertama diadakan di Batavia pada bulan Agustus 1946 dan hukuman terakhir dijatuhkan pada bulan Juni 1949. Mahkamah Militer Sementara di Jawa dan Sumatra berfokus pada kejahatan perang yang dilakukan terhadap penduduk Eropa di kedua wilayah tersebut, sementara mahkamah-mahkamah militer yang diadakan di Kalimantan dan Indonesia Timur terutama difokuskan pada kejahatan perang yang dilakukan Jepang terhadap penduduk Indonesia.

Dari sekitar 1.000 orang Jepang yang diadili, 55 di antaranya diampuni sementara 983 orang lainnya dijatuhi hukuman. Hampir seperempat terhukum, yaitu 236 orang, dijatuhi hukuman mati.



Pemeriksaan terhadap para tersangka penjahat perang Jepang oleh interogator KNIL setelah berakhirnya Perang Pasifik.

Kerasnya sikap mahkaman militer Belanda di Indonesia menyebabkan beberapa terdakwa bunuh diri, sementara 20 orang lainnya berusaha melarikan diri—di mana setengah di antaranya berhasil lolos sedangkan enam orang tewas dalam usaha pelariannya.

Saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, masih ada ratusan penjahat perang Jepang yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Cipinang di Jakarta. Akhirnya, diputuskan bahwa para tahanan dipulangkan ke Jepang untuk menyelesaikan masa hukumannya di Penjara Sagumo di Tokyo.

Pada musim panas 1956, Belanda memberikan pengampunan terhadap para penjahat perang Jepang terakhir yang dijatuhi hukuman di Indonesia. Akhirnya, pada bulan Desember 1958, Belanda membebaskan para tahanan lebih awal dari masa hukuman yang seharusnya mereka jalani.

Maibkatra. Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya, atau *Aceh-shu-kaikyo-kyoryoku-kai*. Organisasi ini dibentuk Jepang untuk memperoleh kepercayaan penduduk Aceh melalui para pemimpin Islam, sekaligus untuk menyebarkan pandangan hidup

Jepang ke dalam pikiran penduduk setempat. Dipimpin oleh Tuanku Abdul Aziz, para tokohnya terkemuka termasuk Tengku Moehamad Hasbi, seorang tokoh pembaru Islam, dan Tengku Moehamad Daoed Beureu'eh, ketua PUSA.

Makalehi, Pemberontakan. Peristiwa perlawanan rakyat di Makalehi, Sangir Talaud, pada bulan Mei 1944. Pemberontakan yang dipimpin Salmon Labaeng ini dipicu oleh tuduhan Jepang bahwa penduduk setempat membantu Sekutu. Penderitaan ekonomi serta tekad untuk tidak mati sia-sia kemudian mendorong penduduk Makalehi memberontak. Pemberontakan ditindas dengan kejam oleh *Tokkeitai*, di mana Salmon Labaeng gugur dalam pertempuran yang berlangsung sementara 30 orang pengikutnya yang tertangkap kemudian dieksekusi.

Malaya Barrier. Rintangan Malaya, sebuah istilah yang digunakan para ahli strategi Sekutu yang mengacu pada wilayah Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa, dan kepulauan yang memanjang ke timur hingga barat laut Australia sebagai posisi pertahanan dasar pertahanan Sekutu di Asia Tenggara. Birma serta Australia dijadikan sebagai posisi pendukung yang sangat penting bagi garis pertahanan itu.

Mandor, Tragedi. Peristiwa pembantaian massal di Kalimantan Barat. Peristiwa ini dipicu oleh laporan dua orang Indonesia yang pro-Jepang dari Banjarmasin mengenai akan adanya pemberontakan rakyat yang berkolaborasi dengan Sekutu untuk melawan Jepang sekitar Januari 1943. Laporan tersebut memperkuat kecurigaan Jepang terhadap gerak-gerik tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang dianggap dapat mengganggu eksistensi maupun legitimasi pendudukan Jepang di Kalimantan.

Pada 23 April 1943, *Tokkeitai* melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para pemuka masyarakat lokal. Mereka terutama dibawa ke Desa Mandor, yang terletak 88 kilometer di sebelah utara

Pontianak. Di sana, mereka dibunuh dengan cara dipancung atau dimasukkan ke dalam karung goni dan dikubur hidup-hidup.

Diperkirakan 1.614 orang terbunuh dalam peristiwa itu. Di antara para korban terdapat beberapa penguasa pribumi di Kalimantan Barat, termasuk Sultan Pontianak dan dua orang anaknya, beberapa pejabat Belanda, dan banyak tokoh Tionghoa serta Indonesia.

Maramis, Alexander Andries (1897–1977). Seorang sarjana hukum, adik kandung Maria Walanda Maramis ini ditunjuk menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945. Ia adalah salah satu tokoh yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.



Ketika delegasi Indonesia Timur memprotes isi Piagam Jakarta, setelah berkonsultasi dengan Teuku Mohammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, ia memberikan usulan mengenai perubahan butir pertama Pancasila kepada Mohammad Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia

aktif berkecimpung dalam bidang diplomasi.

Mardiyem (1928–2007). Salah satu bekas *jugun ianfu* yang memperjuangkan nasib bekas budak seks Jepang, ia terbujuk untuk mendaftarkan diri sebagai pemain sandiwara yang akan dikirimkan Jepang ke Kalimantan. Ternyata ia kemudian dijadikan *jugun ianfu* dengan nama “Momoye” dan ditempatkan di sebuah asrama di Telawang, Kalimantan, sebuah “rumah bordil” khusus bagi tentara Jepang. Kisah hidupnya banyak dijadikan referensi mengenai kisah *jugun ianfu* Indonesia.

Margono Djojohadikoesoemo, R.M. (1894–1978). Seorang tokoh koperasi Indonesia, pada masa pendudukan Jepang, Margono Djojohadikoesoemo menjadi juru tulis bagian koperasi kantor pusat

Syomin Kumiai Tyuo Zimusho (Kantor Pusat Koperasi Perdagangan Dalam Negeri) di Jakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Maria Ulfah Santoso, Raden Ayu (l. 1911). Seorang tokoh pergerakan wanita, selama pendudukan Jepang ia merupakan pegawai *Sjhobu* Jakarta dan aktif di *Fujinkai*. Ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945. Setelah Proklamasi, aktif bertugas dalam pemerintahan RI.

Marine Luchtvaart Dienst. Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda, disingkat MLD.

Martokoesoemo, Mas Besar (l. 1893). Seorang pegawai kolonial Belanda, pada zaman Jepang, Martokoesoemo ditunjuk menjadi wali kota Tegal. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Masjkoer, K.H. (l. 1902). Seorang tokoh politik dan pergerakan Islam. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, beberapa kali menjabat sebagai menteri agama.

Masjoemi. Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia, didirikan pada tanggal 22 November 1943 sebagai wadah untuk memobilisasi umat Islam. Secara resmi, ketuanya adalah K.H. Hasjim Asj'ari, tetapi secara *de facto* yang memimpinnya adalah anak pendiri NU itu, K.H. Wachid Hasjim.

Masjoemi dipercayakan untuk mengorganisasikan pelatihan terhadap para guru agama desa yang sebelumnya dilakukan oleh para pejabat Jepang dari *Shūmubu*. Lebih penting lagi, pada tahun 1944 para pemimpin Masjoemi ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting di *Shūmubu*, satu-satunya departemen dalam pemerintahan militer yang dikepalai oleh orang Indonesia sejak akhir tahun 1943. Pengaruh Masjoemi semakin membesar ketika cabang *Shūmubu* di

daerah (*Shūmuka*) dibentuk di seluruh Jawa dan Madura pada bulan Agustus 1944.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Masjoemi mengubah dirinya menjadi sebuah partai politik.

Mas Mansoer, K.H. (1896–1946). Seorang tokoh Muhammadiyah, selama masa pendudukan Jepang Mas Mansoer aktif dalam organisasi Masjoemi. Ia termasuk salah satu pemimpin Poetera dan bersama dengan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara dijuluki sebagai “Empat Serangkai”. Pada tahun 1944, ia mengundurkan diri dari kegiatan politik yang disponsori Jepang karena alasan kesehatan. Namun, ia kemudian menerima penunjukan sebagai anggota PPKI. Ia meninggal di sebuah penjara Belanda di Surabaya karena dianggap mendukung RI.

MIAI. Majelis Islam A’la Indonesia, sebuah organisasi perhimpunan yang mewadahi berbagai organisasi Islam yang terbentuk sejak zaman kolonial. Pada awalnya, Jepang menggunakan MIAI sebagai alat untuk memobilisasi umat Islam bagi kepentingan mereka. Namun, pada bulan Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI karena menganggap organisasi yang terutama dipimpin oleh para elite Muslim perkotaan dari PSII itu tidak efektif lagi. Peran MIAI kemudian diambil alih oleh Masjoemi.

Militaire Luchtvaart. Dinas Penerbangan KNIL, disingkat ML-KNIL.

Minseifu. Kantor Pemerintahan Sipil yang berada di bawah Angkatan Laut Jepang. Di Jepang, jawatan ini dipimpin oleh sebuah Biro Masalah Umum di bawah Laksamana Madya Ito Kenzo, kemudian Laksamana Madaya Tominaga Shozo.

Di Indonesia, wilayahnya meliputi kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, serta Nusa Tenggara, dan berpusat di Makassar. Kepala pemerintahannya disebut sebagai *sokan* (inspektur jenderal). *Sokan*

pertama adalah Okada Fumihide, yang kemudian digantikan oleh Yamazaki Iwao pada awal tahun 1944.

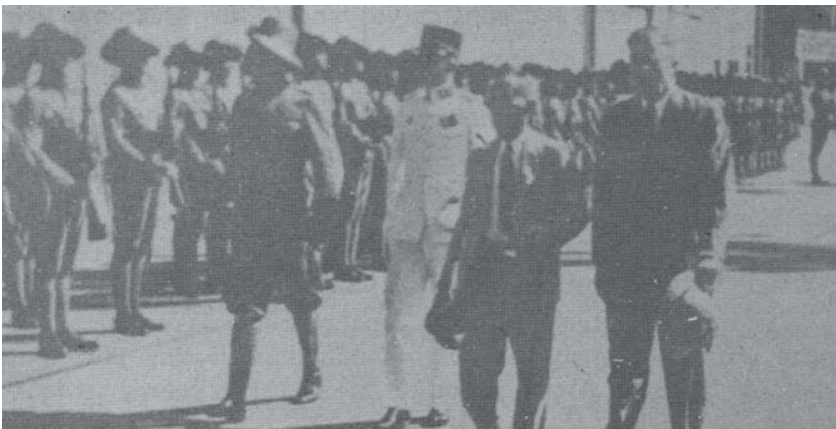
Di bawah *minseifu* terdapat tiga *minseibu*, yaitu Kalimantan (pusat pemerintahan di Pontianak, kemudian Balikpapan), Sulawesi, (pusat pemerintahan di Makassar) dan Sunda Kecil (pusat pemerintahan di Singaraja). Daerah-daerah *minseibu* ini kemudian dibagi lagi menjadi *shū*, *ken*, *bunken*, *gun*, dan *son*.

Misi Kobajasi. Misi diplomatik Jepang di bawah Menteri Perdagangan dan Industri Kobajasi Ichiro yang mengunjungi Batavia antara September hingga Oktober 1940. Tujuannya memengaruhi pemerintah Hindia Belanda agar mau bergabung ke dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia pimpinan Jepang serta meminta konsesi ekonomi, terutama peningkatan ekspor minyak ke Jepang. Belanda mengabaikan permintaan itu.

Di kalangan masyarakat Indonesia yang anti-kolonial, nama Kobajasi kemudian diartikan sebagai singkatan dari “Koloni Orang Belanda Akan Jepang Ambil Seantero Indonesia”.

Misi Yoshizawa. Misi diplomatik Jepang lanjutan dari Misi Kobajasi. Dipimpin oleh bekas menteri luar negeri Yoshizawa Kenkichi. Me-

H.J. van Mook mengantar kepulangan Yoshizawa di Tanjung Priok setelah delegasi Jepang itu gagal memaksa Hindia Belanda memberikan konsesi kepada Jepang.



nyampaikan tuntutan lebih keras daripada sebelumnya agar Belanda mendukung visi dan kebijakan Jepang di Asia Tenggara serta memberikan kepada Jepang hak tidak terbatas untuk mengeksploitasi bahan-bahan tambang di seluruh Hindia Belanda. Saat Belanda menolaknya, Jepang memutuskan untuk menyerbu Hindia Belanda guna mengamankan pasokan minyaknya yang diembargo Amerika Serikat dan Inggris. **Miyahira, Shusho (1904–1976).** Seorang tokoh Kristen Jepang yang telah berkarya di Indonesia sejak tahun 1927. Setelah bertugas di Minahasa dan bekerja di sebuah rumah sakit kusta di Surabaya, pada tahun 1936 ia mendirikan jemaat Kristen Jepang pertama di Indonesia. Dicurigai sebagai mata-mata Jepang, ia diusir keluar Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai sekretaris gubernur Indonesia Timur dan kepala jawatan agama di *Minseifu*. Ia pulang ke Jepang pada tahun 1946.

Moewardi (1907–1948). Seorang dokter, Moewardi aktif di berbagai gerakan pemuda dalam pergerakan selama zaman kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi pemimpin Barisan Pelopor untuk daerah Jakarta, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin organisasi itu di seluruh Jawa dan Madura.

Setelah proklamasi kemerdekaan, ia tetap memegang komando atas Barisan Pelopor, yang kemudian diganti namanya menjadi Barisan Banteng. Seorang yang anti-komunis, ia diculik dan dibunuh simpatisan PKI di Solo pada tahun 1948.

Mohamad Amir (1900–1949). Seorang dokter, pemimpin nasionalis,



dan tokoh kelompok Pudjangga Baroe, ia merupakan salah satu dari tiga anggota PPKI yang mewakili Sumatra. Setelah proklamasi kemerdekaan, Amir diangkat menjadi seorang menteri negara RI dan wakil gubernur Sumatra.

Selama revolusi sosial yang menggulingkan keluarga kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur, Amir sempat ditahan oleh kelompok radikal.

Pengalaman ini, dan fakta bahwa istrinya adalah seorang Belanda, kemudian membuatnya membelot ke pihak Belanda. Ia meninggal di Negeri Belanda.

Mohamad Hasjim Asj'ari (1875–1947). Pendiri Nahdatul Ulama, pada masa pendudukan Jepang ia sempat ditangkap karena mengkritik upacara *saikerei* yang diwajibkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Dibebaskan atas usaha anaknya, K.H. Wachid Hasjim. Secara resmi ditunjuk untuk memimpin Masjoemi, tetapi ia tetap tinggal di Jombang dan ketua efektif organisasi itu dipegang oleh putranya, K.H. Wachid Hasjim.

Mohamad Hoesni Thamrin (1894–1941). Tokoh nasionalis Indonesia dan anggota *Volksraad* yang sangat vokal mengkritik pemerintahan kolonial. Ia dengan berani membicarakan ramalan Jayabaya di dalam *Volksraad* mengenai pembebasan Indonesia oleh Jepang dan meramalkan masa depan Indonesia dengan menafsirkan singkatan pastiles Djintan: “Djepang Itu Nanti Taklukkan Antero Nederland.”

Pada bulan Januari 1941, Belanda menjatuhkan hukuman tahanan rumah terhadapnya dengan tuduhan Thamrin telah membicarakan kemungkinan suatu pemerintahan Indonesia dalam “Orde Baru”-nya Nippon dengan Jepang. Lima hari kemudian, Thamrin wafat karena sakit. Meskipun tidak ada bukti bahwa Belanda menganiayanya, kematiannya menimbulkan kecurigaan yang semakin mendalam terhadap pemerintah kolonial dan menurunkan dukungan rakyat Indonesia kepada Belanda untuk menghadapi ancaman Jepang.

Mohammad Djamil Djambek, Syekh (1862–1947). Seorang ulama reformis yang berasal dari sebuah keluarga bangsawan Minangkabau. Selama pendudukan Jepang, ia ditunjuk menjadi ketua *Sumatra Chokai*.

Mohammad Hasan, Teuku (1906–1997). Seorang sarjana hukum dan tokoh nasionalis sejak zaman kolonial Belanda dan ketua Ich-

wanus Safa Indonesia, pada masa pendudukan Jepang Mohammad Hasan bekerja sebagai penasihat *Syu Chokai* Sumatra Timur. Ia juga menjabat sebagai ketua Koperasi Ladang Pegawai negeri, Kepala Kantor Kemakmuran rakyat (*Kosei Kyoku*), dan Kantor Permohonan Rakyat kepada *Gunseibu*. Menjelang proklamasi, bersama Dr. M. Amir dan Mr. M. Abbas, ia diangkat menjadi anggota PPKI mewakili Sumatra.

Seorang yang saleh dan memiliki pengetahuan agama Islam yang baik, ia merupakan tokoh yang berhasil membujuk golongan Islam untuk menanggalkan isi Piagam Jakarta dari Pembukaan dan Isi UUD 1945. Ia aktif dalam pemerintahan RI hingga tahun 1960-an.

Mohammad Hatta (1902–1980). Tokoh nasionalis kawakan Indonesia, pada tahun 1942, saat Jepang hampir menguasai Indonesia, Hatta dikembalikan ke Jawa dari tempat pengasingannya di Banda. Sekalipun tidak menyukai fasisme, ia bersedia bekerja sama dengan Jepang untuk menyelamatkan diri sekaligus membantu perkembangan nasionalisme Indonesia.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Tojo mengundang Hatta beserta Soekarno dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang, di mana mereka diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar

Mohammad Hatta (kedua dari kiri) bersama anggota Empat Serangkai lainnya dalam suatu rapat.



memberikan Bintang Kekaisaran (Ratna Suci) kepada ketiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah pendudukan Jepang terkejut, karena itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia tersebut dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri dan tidak bisa diganggu-gugat. Padahal, *Kempeitai* sendiri bermaksud membunuh Hatta yang dianggap terlalu nasionalis dan memiliki kecenderungan pro-Barat.

Pada tahun 1943, Hatta aktif bekerja sebagai salah seorang pemimpin Poetera. Pada tahun 1945, ia ditunjuk sebagai anggota BPUPKI dan wakil pemimpin PPKI. Buah pikirannya banyak tertuang dalam pasal-pasal perekonomian dalam UUD 1945.

Sepulangnya dari suatu kunjungan ke Dalat, Hatta diculik bersama Soekarno oleh para pemuda karena menolak memproklamasikan kemerdekaan RI di luar jadwal yang dijanjikan oleh Jepang. Akhirnya, setelah dibebaskan, ia menjadi salah satu penanda tangan naskah proklamasi kemerdekaan RI. Ia kemudian menjadi wakil presiden RI pertama, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1956.

Mohammad Ibnu Sayuti Melik (1908-1989). Seorang tokoh pergerakan dari aliran Kiri, Sayuti Melik sempat dibuang ke Digul Atas oleh Belanda karena dituduh membantu PKI. Tuduhan yang sama juga sempat membuatnya dipenjarakan oleh Jepang pada tahun 1942. Ia baru dibebaskan menjelang Proklamasi dan diangkat menjadi anggota BPUPKI. Ia merupakan tokoh yang mengetik naskah Proklamasi.

Mohammad Noor, Pangeran (l. 1901). Seorang pegawai pekerjaan umum sejak zaman kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, ia memimpin Kantor Pengairan “Pekalen Sampean” di Bondowoso. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI. Setelah proklamasi, ia menjadi gubernur Kalimantan yang pertama.

Mohammad Yamin (1903–1962). Seorang pengacara dan tokoh pergerakan. Selama masa pendudukan Jepang, ia duduk dalam Majelis Pertimbangan Poetera dan menjadi penasihat *Sendenbu-sendenka*.

Pada tahun 1945, diangkat menjadi anggota BPUPKI. Gagasannya mengenai dasar falsafah negara, yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila, ikut mewarnai sidang-sidang dalam panitia tersebut. Demikian juga rumusan-rumusannya dalam penyusunan UUD 1945. Setelah kemerdekaan, ia aktif dalam pemerintahan RI. Ia juga dikenal sebagai seorang penyair dan penulis buku.

Mori, Kunizo (1890–1949). Memimpin garnisun Jepang di Makassar setelah Jepang menguasai kota itu, ia diangkat menjadi laksamana muda dan memimpin garnisun angkatan laut Jepang di Kepulauan Bonin. Setelah perang, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan militer AS karena mendorong praktik kanibalisme terhadap penerbang AS yang ditawan Jepang di Pasifik. Ia juga terlibat pembunuhan terhadap para tawanan perang di Kendari, di mana sebuah pengadilan militer Belanda di Makassar menjatuhkan hukuman gantung terhadapnya, yang dilaksanakan pada tahun 1949.

Mountbatten, Louis Francis Albert Victor Nicholas George (1900–1979). Laksamana dan negarawan Inggris. Pahlawan perang Inggris di Dunkirk dan Laut Tengah, pada akhir tahun 1943 ia diangkat menjadi panglima SEAC (Southeast Asian Command) yang membawahi seluruh pasukan Sekutu di Asia Tenggara. Ketika Jepang menyerah, komando yang dipimpinnyalah yang menerima penyerahan pasukan Jepang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ia tewas dibunuh oleh teroris IRA yang meledakkan perahu layarnya di Irlandia.

Muhammad Rasul (1879–1945). Memiliki nama lengkap Tuanku Syeikh Abdul Karim bin Amrullah, ia seorang pelopor gerakan pembaruan Islam di Minangkabau. Pada awal pendudukan Jepang, ia ditunjuk menjadi penasihat Shūmubu. Ia sangat menentang upacara *saikeirei*, yang dianggap perbuatan menyembah berhala karena menyamakan *Tenno Haika* dengan Tuhan. Dalam suatu pertemuan antara para ulama dari seluruh Jawa dengan wakil pemerintahan pendudukan Jepang di Bandung, Amrullah merupakan satu-satunya orang yang tidak mau

berdiri dan tetap duduk di kursinya ketika para hadirin yang lain berdiri untuk melakukan *saikeirei*. Namun pihak Jepang enggan menghukumnya karena khawatir menimbulkan masalah dengan kaum Muslim.

Muto, Akira (1892–1948). Salah seorang perwira Jepang yang berpandangan radikal, sebagai kepala intelijen Tentara Kwangtung, Muto diyakini berada di belakang insiden Jembatan Marco Polo yang menimbulkan pecahnya Perang Cina-Jepang Kedua. Ia kemudian menjadi wakil kepala staf Tentara Ekspedisi Wilayah Cina Tengah Jepang dan dituduh terlibat dalam pembantaian di Nanking.

Dikenal sebagai tangan kanan Jenderal Tojo, ia ditunjuk untuk memimpin Divisi Pengawal Kekaisaran ke-2 yang menyerang Singapura. Pada bulan Juni 1944, saat Sumatra dibentuk sebagai sebuah wilayah administrasi terpisah dari Singapura, Muto ditunjuk untuk memimpin pasukan Jepang di Sumatra.



Pada bulan Oktober 1944, Muto dikirimkan ke Filipina dan bertugas sebagai kepala staf Tentara ke-14 di bawah Jenderal Yamashita Tomoyuki. Setelah perang berakhir, diadili dengan tuduhan terlibat pembantaian terhadap penduduk sipil dan tawanan perang di Cina dan Filipina, ia dihukum mati pada tahun 1948.

Nani Wartabone (1907–1986). Seorang tokoh nasionalis dan ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Gorontalo, Nani Wartabone memimpin perebutan kekuasaan di Gorontalo saat Belanda berusaha melakukan pembumihangusan pada tanggal 23 Januari 1942. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Belanda, ia memproklamasikan pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo dan menjadi ketuanya.

Namun saat Jepang memasuki Gorontalo, Nani dicopot dari kedudukannya. Ia kemudian ditangkap dengan tuduhan mencoba

Nani Wartabone (kedua dari kanan) menyambut kedatangan pasukan Jepang setelah mengambil alih kekuasaan di Gorontalo dari tangan Belanda.



menentang Jepang dan dipenjarakan di Manado hingga menjelang penyerahan Jepang.

Saat Belanda berkuasa kembali di Gorontalo, Nani dipenjarakan karena peranannya dalam pemberontakan 23 Januari 1942 dan baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah itu, ia memegang berbagai jabatan penting dalam pemerintahan RI.

Nanpo Keihatsu Kenso. Perbendaharaan untuk Kemajuan Wilayah Selatan. Badan yang mengawasi operasi bank-bank Jepang di wilayah pendudukan dan bertanggung jawab mengeluarkan mata uang di sana. Kebijakannya untuk mencetak uang kertas dalam jumlah besar menyebabkan nilai mata uang terbitannya di Indonesia pun hancur. Akibatnya, inflasi naik, terutama sejak tahun 1943. Pada pertengahan 1945, mata uang Jepang begitu merosot nilainya hingga hanya sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya.

Nanseitai. *Lihat* Beppan.

Nippon Seishin. Bersemangat Jepang. Penanaman nilai-nilai Jepang, terutama yang berkaitan dengan pengorbanan diri terhadap kaisar, sikap pantang menyerah, dan bersedia bekerja keras.

Nippon Eigasha. Produksi film Jepang. Disebut juga *Nichi'ei*. Didirikan pada bulan April 1943.

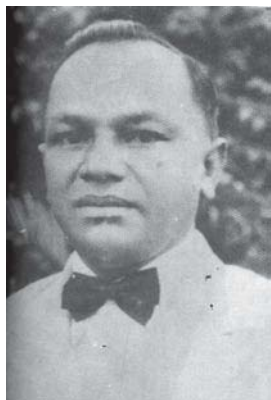
Nishijima, Shigetada. Seorang agen intelijen Angkatan Laut Jepang, sebelum pecahnya Perang Pasifik ia mengadakan hubungan dengan kaum nasionalis Indonesia dengan kedok sebagai seorang pegawai toko serba ada. Saat Perang pecah, ia ditangkap oleh Belanda dan dikirim ke Australia.

Ia kemudian kembali ke Jawa melalui suatu program pertukaran tawanan. Aktif dalam Asrama Indonesia Merdeka dan berpartisipasi dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda, Nishijima sempat ditahan sebagai seorang penjahat perang.

Nôgyô Senmon Gakkô. Sekolah Pertanian Menengah Tinggi. Sekolah yang didirikan Jepang untuk mendidik para ahli pertanian tingkat madya di Jawa. Ada dua sekolah seperti ini selama masa pendudukan Jepang, satu di Bogor sementara yang lain di Malang.

Nômin Dôjô. Kompleks asrama pendidikan bagi para petani muda yang dikelilingi ladang pertanian yang luas di mana para peserta pelatihan tinggal, belajar, dan bekerja bersama selama periode waktu tertentu. Didirikan di berbagai tempat di Jawa, di mana masing-masing memiliki kurikulum, peraturan, dan sifat yang berbeda-beda.

Nyak Arif, Teuku (1899–1946). Seorang bangsawan Aceh dan anggota *Volksraad* pada zaman kolonial, Teuku Nyak Arif memimpin perlawanan orang Aceh melawan penguasa Belanda menjelang penyerbuan Jepang ke Aceh. Ia kemudian diangkat Jepang sebagai ketua *Aceh Syu Sanji Kai* (Dewan Rakyat Daerah Aceh). Setelah itu ia menjadi wakil *Sumatera Chuo Sangi In*.



Pernah ditangkap *Kempeitai* karena mengkritik Jepang, tetapi kemudian dibebaskan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia menjadi residen pertama Aceh tetapi kemudian

digulingkan oleh golongan radikal.



Oey Tiang Tjoei (1893–1977). Seorang wartawan Tionghoa, pada tahun 1941 Oey Tiang Tjoei sempat ditahan penguasa Belanda karena sikapnya yang pro-Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, ia mengganti namanya menjadi Permana dan menjadi pimpinan surat kabar *Kung Yung Pao* yang pro-Jepang. Ia juga memimpin *Hua Ch'iao Chung-hui* (atau *Kakyo Sokai*) di Jakarta, sebuah wadah yang melebur berbagai organisasi dagang Tionghoa zaman Belanda. Selain menjadi anggota *Chuo Sang-In*, pada tahun 1945 ia dipilih menjadi anggota BPUPKI mewakili minoritas Tionghoa.

Oey Tjong Hau (l. 1904). Anak seorang pengusaha besar di Semarang, pada masa pendudukan Jepang ia diangkat menjadi anggota *Chuo Sang-In* mewakili golongan Tionghoa Jawa Tengah. Pada tahun 1945, ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

Okazaki, Seisaburo (1893–1979). Kepala Staf Tentara ke-16 dari bulan November 1941 hingga Juni 1943. Ia kemudian memimpin sebuah divisi Jepang yang bertempur di Birma. Sempat dipenjarakan sebagai penjahat perang, tetapi Okazaki kemudian dibebaskan.

Osamu. Kode pemerintahan militer Tentara ke-16 di Jawa.

Osamu Seirei. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan *Saiko Shikikan* di Jawa.

Osamu Kanrei. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan *Gunseikan* di Jawa.

Osamu Shudan. Tentara ke-16, dibentuk pada 5 November 1941 di bawah komando Kelompok Tentara Ekspedisi Selatan Jepang. Bertugas mengoordinasikan pasukan Jepang yang menyerbu Jawa. Kesatuan ini kemudian menjadi garnisun pendudukan di Jawa hingga berakhirnya Perang Pasifik.

Pada tanggal 27 Maret 1944, untuk menghadapi ancaman pendaratan Sekutu di Jawa, struktur organisasi Tentara Ekspedisi Selatan berubah dan Tentara ke-16 ditempatkan di bawah komando Tentara Kawasan Ketujuh Jepang. Markas besar Tentara ke-16 berada di Jakarta. Kesatuan ini didemobilisasi setelah penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945.

Oto Iskandardinata, R. (1897–1945). Tokoh nasionalis dan anggota *Volksraad*, selama pendudukan Jepang aktif dalam dunia kewartawanan dan menerbitkan surat kabar *Tjahaja*. Ia juga aktif dalam Poetera, *Jawa Hōkōkai*, dan *Cuo Sangi In*.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, ia duduk sebagai anggota PPKI dan turut menyusun UUD 1945. Setelah kemerdekaan, ia turut membentuk Badan Keamanan Rakyat dan menjadi menteri negara. Ia diculik dan dibunuh sebuah gerombolan bersenjata di Banten pada akhir tahun 1945.

Overakker, Roelof Theodorus (1890–1945). Panglima pasukan



KNIL di bagian tengah Sumatra. Sempat memimpin gerilya pasukan KNIL di Aceh pada awal pendudukan Jepang di Indonesia. Ia kemudian dihukum mati oleh Jepang karena dituduh mengorganisasikan gerakan bawah tanah di kamp-kamp tawanan di Sumatra.

Oyen, Ludolph Hendrik van (1889–1953). Panglima angkatan udara Belanda (ML-KNIL). Saat Perang Pasifik pecah, ia berada di Pearl Harbor, kembali dari misi pembelian pesawat terbang di AS, dan menyaksikan serangan Jepang ke pangkalan armada Pasifik AS itu. Lolos dari bencana kekalahan di Jawa pada bulan Maret 1942, ia kemudian memimpin tentara Belanda di Australia selama Perang Pasifik dan memimpin pasukan Belanda yang memasuki Indonesia kembali setelah penyerahan Jepang.

Ozawa, Jisaburo (1886–1966). Salah seorang laksamana terbaik Je-



pang selama Perang Pasifik, Ozawa memimpin Armada Selatan Jepang selama penyerbuan Jepang ke Indonesia dan memiliki peranan besar dalam penyerbuan ke Palembang. Pada bulan November 1942, ia memimpin armada kapal induk Jepang dan, sekalipun kalah, memperlihatkan ketangguhan dalam menghadapi armada laut Amerika Serikat dalam Pertempuran di Laut Filipina dan Teluk Leyte. Ozawa kemudian diangkat menjadi

panglima terakhir Armada Gabungan Jepang, yang saat itu boleh dikatakan tidak ada lagi.

P

Pandrah, Perang. Aksi penyerangan terhadap tangsi militer Jepang di Pandrah pada bulan April 1945. Serangan yang dilatari oleh ketidak-senangan terhadap kesewenangan Jepang itu dipimpin oleh Keuhik Johan dan panglima Perang Teuku Jacob. Serangan itu kemudian menyebar ke tempat pemusatan pasukan Jepang di Kampung Lheue Simpang. Dalam peristiwa itu, 43 orang Aceh dan 200 orang Jepang terbunuh. Jepang kemudian mengirimkan bala bantuan untuk menindas pemberontakan dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam penyerangan tersebut.

Pancasila. Falsafah negara yang diadopsi setelah pembahasan sidang pertama BPUPKI antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ada empat tokoh utama yang disebut-sebut telah mengajukan pandangannya mengenai dasar negara bagi negara Indonesia yang hendak dibentuk, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Prof. Mr. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, Yamin mengajukan lima usulan mengenai dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan; peri kemanusiaan; peri ketuhanan; peri kerakyatan; dan kesejahteraan rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagoes mengajukan usulan Islam sebagai dasar negara mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Landasan yang diajukannya mengandung empat dasar pokok: ajaran iman, kepercayaan kepada Allah; ajaran beribadah, berhikmat dan berbakti pada Allah; ajaran beramal salih, berbuat kebaikan; dan ajaran berjihad di jalan Allah, berjuang menegakkan kebenaran di jalan kebaikan.

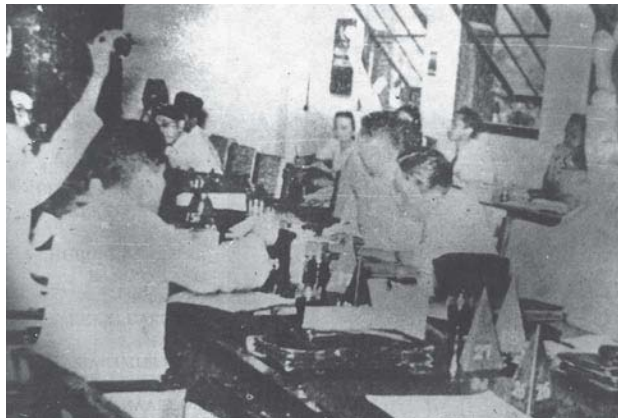
Pada hari yang sama, Soepomo mengajukan tiga usulan teori negara, yaitu teori perorangan; teori golongan; dan teori integralistik. Integralistik yang dimaksudkan oleh Soepomo adalah integralistik ketimuran dengan mengedepankan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat.

Ir. Soekarno, yang berbicara pada hari terakhir sidang BPUPKI, mengemukakan lima rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia; internasionalisme atau peri kemanusiaan; mufakat atau demokrasi; kesejahteraan sosial; dan ketuhanan. Ia menyebut usulan dasar negaranya dengan istilah Pancasila.

Pane, Armijn (1908-1970). Sastrawan dan wartawan, Pane menjabat sebagai kepala Bagian Kesusastraan di Pusat Kebudayaan Djakarta pada zaman pendudukan Jepang. Anggota Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia, ia sempat ditangkap *Kempeitai* karena dianggap membocorkan berita kekalahan Jepang di Morotai.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan dengan nama lain *Dokuritsu Zyunbi Inkai*, atau lebih dikenal dengan sebutan PPKI ini, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ini. Status PPKI berbeda dengan BPUPKI. Apabila BPUPKI ditetapkan oleh Panglima Tentara ke-16, PPKI ditetapkan oleh Penguasa Perang Tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Berkaitan dengan pengangkatan ini, Marsekal Terauchi,

Para peserta rapat pertama PPKI yang diadakan setelah penyerahan Jepang berlangsung dengan bersemangat.



memanggil Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat ke markas besarnya di Dalat, Vietnam Selatan, pada 9 Agustus 1945. Dalam pertemuan pada 12 Agustus 1945, Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Untuk pelaksanaannya dibentuk PPKI.

Badan baru ini beranggotakan 21 orang yang berasal dari berbagai pulau dan suku. Untuk mewakili Jawa dipilih 12 orang, Sumatra 3 orang, Sulawesi 2 orang, Maluku, Kalimantan, Sunda Kecil, dan wakil minoritas masing-masing diwakili satu orang. Sebagai ketua PPKI ditunjuk Soekarno, sementara Hatta diangkat menjadi wakilnya. Selain itu, Jepang menunjuk Achmad Soebardjo sebagai penasihat.

Sidang resmi PPKI baru diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Adapun ketetapan yang diambil oleh PPKI pada sidang tersebut adalah mengesahkan undang-undang dasar; memilih dan mengangkat Ir. Soekarno selaku presiden dan Drs. Mohammad Hatta selaku wakil presiden; dan membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden sebelum DPR/MPR terbentuk seperti yang ditetapkan oleh UUD.

Panitia Sembilan. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Beranggotakan Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, K.H. Wachid Hasjim, K.H. Abdoel Kahar Moezakir, Mr. A.A. Maramis, Abikoesho Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, dan Mr. Mohammad Yamin.

Panitia kecil ini menghasilkan suatu rancangan pembukaan undang-undang dasar yang berisi empat alinea. Alinea pertama memuat filosofi tentang kemerdekaan dan penjajahan. Alinea kedua memuat cita-cita nasional. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat memuat rumusan tugas pemerintah serta rumusan yang menjadi landasan dasar dalam menjalankan tugas tersebut. Rumusan ini oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan Jakarta

Charter atau Piagam Jakarta, sedangkan Dr. Sukiman menyebutnya sebagai Gentlemen Agreement.

Pekan Baru, Jalan Kereta Api. Jalan kereta api yang dibangun selama Perang Dunia II di Pulau Sumatra. Jalan kereta api sepanjang 220 kilometer ini menghubungkan Pekan Baru dan Muaro. Dibangun untuk mengangkut sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan bahan logam melalui darat sehingga dapat mengecilkan bahaya penenggelaman kapal Jepang oleh angkatan laut Sekutu jika bahan-bahan yang berharga itu diangkut melalui laut.

Untuk menyelesaikan proyek tersebut, Jepang mengerahkan 30.000 *romusha* serta 4.790 orang tawanan perang Sekutu, di mana kebanyakan adalah orang Belanda. Adapun proyek pembangunan jalan kereta api itu juga meliputi pendirian dan perbaikan lapangan terbang dan berbagai instalasi militer lainnya.

Proyek tersebut selesai pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun Jepang tidak pernah memakainya karena pada hari itu juga Jepang menyerah kepada Sekutu. Jalan kereta api itu sendiri kemudian terbengkalai dan tidak pernah dipakai siapa pun karena konstruksinya benar-benar buruk, baik akibat perencanaan pembangunan yang payah dari pihak Jepang maupun sabotase yang dilakukan oleh para tawanan Sekutu yang dipekerjakan di sana.

Proyek itu sendiri menelan korban jiwa yang sangat besar di antara para pekerja. Diperkirakan 700 orang tawanan Sekutu dan 25.000 orang *romusha* mati karena kelaparan, penyakit, dan penyiksaan selama mengerjakan proyek jalan kereta api itu.

Pematang Siantar, Pemberontakan Giyû-gun. Aksi pembangkangan yang dilakukan sebuah kompi *Giyû-gun* di Pematang Siantar yang dipimpin oleh Letnan Hopman Sitompul pada bulan Juli 1945. Peristiwa itu bermula dari pemukulan semena-mena yang dilakukan serdadu Jepang terhadap para prajurit *Giyûgun* di kamp pelatihan. Sebagai balasan, para pemberontak memasang sejumlah barikade dan menyusun pertahanan sebagai persiapan melawan Jepang. Namun pemberontakan

bisa diatasi tanpa pertumpahan darah. Para pemimpin pembangkangan itu kemudian hanya dipenjarakan dan tidak dihukum mati.

Pergaboengan Goeroe Islam Indonesia. Badan yang mengurus semua guru agama Islam di Jawa. Dibentuk pada bulan Mei 1943.

Perkumpulan Olah Raga Jawa. Didirikan pada 21 Agustus 1943, badan ini beranggotakan berbagai kalangan bangsa Indonesia, seperti pegawai kantor, pelajar, anggota *Keibodan*, *Seinendan*, dan sebagainya. Tujuannya untuk memperluas pendidikan dan gerakan olahraga di kalangan masyarakat. selain itu, juga diperkenalkan ilmu keprajuritan.

Dua cabang olahraga, bola keranjang dan lompat indah yang dipertandingkan dalam sebuah kejuaraan yang disponsori pemerintahan pendudukan Jepang.



Persiapan Persatoean Oemmat Islam. Sebuah jawatan dalam Gerakan 3A yang bertujuan untuk menyatukan kaum Muslim Indonesia menjadi sebuah badan tunggal. Dibentuk pada bulan Juli 1942 di bawah pemimpin PSII Abikoeso Tjokrosoejoso, yang juga bertindak sebagai juru bicara Islam Indonesia di Jawa yang disponsori oleh Jepang. Jawatan ini berusia pendek dan dibubarkan bersama-sama Gerakan 3A karena tidak mendapatkan banyak dukungan dari ormas-ormas Islam.

Peta (Pembela Tanah Air, atau Jawa Bo-ei Giyû-gun). Didirikan berdasarkan *Osamu Seirei No. 44* "Tentang Pembentukan Pasukan Sukarela untuk Membela Tanah Jawa" yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1943.

Sekalipun sejumlah tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soekarno dan Gatot Mangkoepradja, mengklaim diri sebagai otak pembentukan Peta, pendirian badan militer ini sebenarnya diarahkan oleh Markas Besar Umum Tentara Wilayah Selatan Jepang di Saigon, yang memerintahkan pembentukan *Kyodo Bo-ei Giyû-gun* (pasukan sukarela pembela tanah air) guna memperkuat pertahanan Jepang di Jawa dan Sumatra.

Perekrutan anggota Peta dilakukan oleh *Beppan*, yang memilih para sukarelawan karena alasan militer. Anggota Peta mengenakan seragam menurut model yang digunakan tentara Jepang, tetapi bahannya



Pelatihan fisik anggota Peta. Jepang lebih menekankan pelatihan berbaur semangat daripada pelatihan strategis kepada anggota Peta.

Pemberian pataka kepada para lulusan angkatan pertama sukarelawan Peta di Jakarta.



berasal dari gudang rampasan KNIL. Anggota nya mendapatkan pangkat berdasarkan jabatan mereka (komandan batalyon, komandan kompi, komandan peleton, dan komandan regu).

Tidak seperti *heiho*, Peta dipimpin oleh para perwira Indonesia. Para perwira Jepang di unit mereka hanya bertugas sebagai pelatih atau penasihat. Namun, Jepang selalu meragukan kesetiaan anggota Peta. Karena itu, mereka tidak membentuk sebuah komando bersama atas seluruh formasi Peta yang ada. Sebaliknya, Jepang membatasi unit utama Peta hingga tingkat *daidan*, atau batalyon.

Secara keseluruhan terdapat 66 *daidan* di Jawa dan tiga *daidan* lainnya di Bali. Total anggota Peta sendiri mencapai jumlah 38.000 orang.

Piagam Jakarta. Hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia. Dirumuskan oleh Panitia Sembilan BPUPKI dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum nasionalis.

Berisi lima butir pernyataan yang kelak menjadi Pancasila, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan *Muqaddimah* dari UUD. Pada tanggal 18 Agustus 1945, saat PPKI mengesahkan UUD '45, istilah *Muqaddimah* diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama itu dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh-tokoh Islam itu sendiri menganggap kalimat tersebut sebagai kalimat tauhid sehingga menerima kalimat tersebut sebagai kompromi.

PID (Politieke Inlichtingen Dienst). Sebuah jawatan dari kepolisian pada zaman kolonial Belanda dan tersebar di seluruh Indonesia. Selama pendudukan Jepang, PID berada di bawah komando *Kempeitai*. Mereka terutama bertugas memonitor siaran radio gelap, meniupkan desas-desus, melacak mata-mata musuh dan kepemilikan benda-benda yang terlarang (seperti senjata api ilegal) serta mengukur semangat dan pikiran rakyat—terutama jika Jepang mengeluarkan suatu kebijakan baru. Banyak pula anggotanya yang menjadi algojo Jepang.

Poetjoek Pimpinan Pemerintahan Gorontalo. Dibentuk oleh kelompok Komite Dua Belas pimpinan Nani Wartabone, yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan aparaturnya Belanda menjelang kedatangan Jepang di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Komite ini kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang usianya singkat. Setelah kedatangan Jepang, Poetjoek Pimpinan Pemerintahan Gorontalo dibubarkan dan para pemimpinnya diserap ke dalam administrasi lokal yang berada di bawah pengawasan Jepang.

Poerbonegoro Soemitro Kolopaking, Raden Adipati Arya (l. 1887). Keturunan bangsawan Jawa, Kolopaking merupakan bupati Banjarnegara sejak tahun 1927. Jabatan itu tetap dipegangnya selama masa pendudukan Jepang dengan sebutan Banjarnegara *Ken Cho*. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Poeroebojo, Bando Pangeran Hario (l. 1906). Seorang bangsawan Yogyakarta. Ia merupakan *Giin Chuō Sang-In* Jakarta dan penasihat *Yogya Ken Seinendan* pada masa pendudukan Jepang. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI pada tahun 1945.

Poetera. Singkatan dari Poesat Tenaga Rakjat, sebuah organisasi yang didirikan Jepang di Jawa pada 1 Maret 1943. Dipimpin oleh Empat Serangkai Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur, organisasi ini dimaksudkan Jepang untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Sekalipun sebenarnya di tingkat daerah Poetera tidak dapat berkembang dengan baik, tetapi para tokoh organisasi ini berhasil membakar semangat nasionalisme Indonesia dalam rapat-rapat raksasa maupun media komunikasi massa yang disponsori Jepang. Akibatnya, Poetera kemudian dibubarkan oleh pemerintahan militer Jepang, yang menggantinya dengan *Djawa Hōkōkai*.

Poorten, Hein ter (1887–1968). Seorang perwira karier, Hein ter



Poorten membantu mendirikan kesatuan udara KNIL. Setelah menjadi pengajar di akademi militer di Belanda, pada tahun 1939 ia diangkat menjadi kepala staf umum KNIL. Ia kemudian menjadi panglima KNIL menggantikan Letnan Jenderal Berenschot yang tewas dalam kecelakaan terbang pada tahun 1941.

Pada bulan Januari 1942, setelah Perang Pasifik pecah, ia ditunjuk untuk memimpin pasukan darat ABDACOM. Pada bulan Maret,

ia secara *de facto* memimpin semua pasukan Sekutu di Jawa setelah pembubaran ABDACOM dan meningkatnya ancaman Jepang. Ter Poorten adalah orang yang menandatangani penyerahan tanpa syarat pasukan Sekutu di Hindia Belanda. Ia kemudian ditawan oleh Jepang di berbagai kamp tawanan. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Belanda.

Poros (Axis). Setelah berhasil mengadakan Pakta Anti-Komintern, yang pada awalnya ditandatangani dengan Jepang pada tahun 1936 dan kemudian dengan Italia pada tahun berikutnya, Hitler menyarankan suatu aliansi Berlin-Tokyo-Roma, untuk mengimbangi kemaharajaan kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda. Jepang baru menandatangani pada bulan Mei 1939 setelah terbentuknya Poros Berlin-Roma.

Pada bulan September 1940, sebuah pakta tripartite Poros ditandatangani. Selain ketiga negara di atas, kekuatan Poros juga terdiri atas Hongaria, Bulgaria, Rumania, Slovakia, Kroasia, Siam, dan Manchukuo. Selain itu, beberapa negara lainnya seperti Prancis Vichy, Finlandia, dan Spanyol juga bersikap pro-Poros. Lawan dari pihak Poros adalah Sekutu.

Proklamasi Kemerdekaan. Setelah Soekarno dan Hatta dipulangkan dari Rengasdengklok oleh para pemuda yang menculik mereka, keduanya, dengan didampingi oleh Laksamana Maeda, kemudian menemui *Somubuco* Mayor Jenderal Nishimura untuk mengetahui sikap Jepang tentang proklamasi kemerdekaan.

Sekalipun Soekarno-Hatta menekankan bahwa Marsekal Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan kepada PPKI, Nishimura melarang dilakukannya proklamasi kemerdekaan. Alasannya, setelah menyerahnya Jepang, mereka mendapat perintah untuk menjaga *status quo*. Dari pertemuan itu, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara sepihak.



Ir. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sementara Drs. Mohammad Hatta mengamatinya.

Di bawah perlindungan Maeda, kedua tokoh tersebut bersama para anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda merumuskan naskah proklamasi di rumah sang laksamana.

Setelah rumusan teks proklamasi tersusun, Soekarno menyerahkan konsep naskah proklamasi kemerdekaan itu kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah selesai diketik, naskah itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.

Pembacaan naskah proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur No. 56 pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.30 waktu Jawa (10.00 WIB). Setelah itu acara disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih. Secara spontan dan tanpa dipimpin, massa mengiringinya dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.

Pupella, Eliza Urbanus (1910–1996). Seorang aktivis Sarekat Ambon pada masa kolonial, Pupella diangkat oleh pemerintah militer Jepang untuk mengatur masyarakat Ambon karena ia mempunyai wibawa

baik terhadap masyarakat Kristen maupun Islam. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia membantu melikwidasi Negara Indonesia Timur dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia.

PUSA (Persatuan Oelama-oelama Seloeroeh Aceh). Didirikan pada tahun 1939, organisasi ini dimaksudkan untuk mempertahankan Islam dan mendorong modernisasi sekolah-sekolah Islam. Sangat menentang pejabat *uleebalang* yang didukung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada saat penyerbuan Jepang, bekerja sama dengan *F-Kikan* untuk memerangi sisa-sisa aparaturnya dan militer Belanda di Aceh. Sejumlah tokohnya memegang peranan penting dalam administrasi lokal selama pendudukan Jepang.

Q, R

Radjiman Wedyodiningrat, Kanjeng Raden Toemenggoeng (1879–1952). Seorang dokter dan tokoh Boedi Oetomo yang pernah menjadi anggota *Volksraad*, ia diangkat Jepang sebagai anggota *Chuo Sangi-In*. Saat BPUPKI dibentuk, ia diangkat menjadi ketuanya. Ia kemudian ikut bersama Soekarno dan Hatta untuk menghadap Marsekal Terauchi di Dalat menjelang penyerahan Jepang. Setelah kemerdekaan, ia dilantik menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dan bertugas sebagai anggota DPA maupun DPR.

RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees). Sebuah jawatan militer Sekutu yang bertanggung jawab melacak kamp-kamp tawanan perang dan interniran serta membantu pemulihan dan pemulangan bekas tawanan perang dan interniran Sekutu. Tim-tim RAPWI memiliki kontak dengan Jepang dan berbagai jawatan Indonesia untuk memperlancar tugasnya.

Namun kehadiran orang Belanda dalam RAPWI membuat jawatan Sekutu itu dicurigai pihak Indonesia sebagai pelopor usaha NICA Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Akibatnya, di beberapa tempat terjadi bentrokan antara para pemuda dan pasukan Sekutu yang mewakili RAPWI.

Rasuna Said, Hj. (1910–1965). Seorang tokoh pergerakan, selama masa pendudukan Jepang ikut mendirikan organisasi Pemuda Nippon Raja di Padang. Tujuannya untuk menggembelng para pemuda dalam usaha mencapai kemerdekaan. Akibatnya, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan, Rasuna Said aktif dalam pemerintahan RI.

Ratulangie, Gerungan Saul Samuel Jacob (1890–1949). Seorang



jurnalis, ilmuwan, dan politisi, ia pernah memimpin Indische Vereniging dan mempropagandakan tuntutan otonomi bagi Indonesia sebagai jalan menuju kemerdekaan. Ia juga pernah menjadi anggota Volksraad mewakili rakyat Minahasa.

Dengan pengalamannya sebagai jurnalis dan pelaku pergerakan politik, Ratulangie menerbitkan sebuah buku berjudul *Indonesia in den Pacific* pada Juni 1937, di mana ia memperingatkan ancaman militerisme Jepang

dan kemungkinan Jepang menyerbu Indonesia karena berlimpahnya sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Jepang. Dalam buku itu, ia juga menulis peran penting yang bisa dimainkan oleh Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara di kawasan cekungan Pasifik.

Pada awal masa pendudukan Jepang, ia mendirikan organisasi Badan Penolong Korban Perang Sulawesi dan pernah menjadi anggota Poetera. Pada tahun 1944, ia diangkat menjadi penasihat Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar. Saat Jepang membentuk organisasi Sudara di Sulawesi, ia ditunjuk menjadi wakil ketuanya.

Ketika PPKI dibentuk, Ratulangie ditunjuk menjadi salah satu wakil Sulawesi untuk mengikuti sidang PPKI. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia ditunjuk menjadi gubernur Sulawesi pertama, tetapi kemudian ditangkap Belanda dan diusir keluar Sulawesi. Ia meninggal dunia di Jakarta sebagai seorang tahanan politik Belanda.

Rengasdengklok, Peristiwa. Perbedaan pendapat antara kaum muda, terutama dari kalangan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, dengan kaum tua seperti Soekarno-Hatta mengenai pembentukan Indonesia merdeka sudah mulai terlihat sejak bulan Juli 1945. Pada saat itu, tidak ada satu pun pemuda yang tergabung dalam organisasi itu yang bersedia menduduki kursi yang sudah disediakan bagi mereka dalam *Djawa Hokokai*. Demikian pula saat Soekarno mencoba memasukkan

wakil-wakil pemuda menjadi anggota baru dalam susunan anggota PPKI.

Saat Soekarno dan Hatta menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah penyerahan Jepang, perbedaan pandangan itu akhirnya mendorong para pemuda 'menculik' keduanya. Keputusan untuk menculik kedua tokoh tersebut diambil dalam rapat tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Bapeppi Cikini No.71, Jakarta Pusat. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Soekarno, Joesoef Koento, dr. Moewardi dari Barisan Pelopor, dan Shudanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta Syu. Tugas penculikan itu akhirnya diberikan kepada Singgih.

Penculikan terhadap kedua tokoh nasionalis Indonesia dilakukan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka kemudian dibawa ke Rengasdengklok di daerah Karawang. Rengasdengklok dipilih sebagai tempat menyembunyikan kedua tokoh itu karena pertimbangan keamanan. Jaraknya hanya sekitar 15 kilometer dari Kedunggede, tempat pos penjagaan Peta di kawasan itu. Jadi, setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok dapat dengan cepat diketahui.

Kedua tokoh kharismatik itu berada di Rengasdengklok selama seharian penuh. Para pemuda sendiri berusaha menekan mereka agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya keterkaitan dengan Jepang.

Akhirnya, di Jakarta tercapai kesepakatan antara Ahmad Soebardjo dari golongan tua dan Wikana dari kalangan pemuda mengenai isu bahwa proklamasi kemerdekaan harus diadakan di Jakarta. Sebagai persyaratannya, Soebardjo meminta agar para pemuda segera memulangkan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Sebagai jaminannya Soebardjo menjanjikan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan segera dikumandangkan tanpa keterlibatan Jepang.

Akhirnya, setelah mendengar jaminan dari Ahmad Soebardjo bahwa proklamasi selambat-lambatnya akan dikumandangkan pada pukul 12.00 keesokan harinya (17 Agustus 1945), para pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta.

Resei Seimo Tyosa In. Badan bayangan yang bertugas menjadi penasihat *Borneo Minseibu*.

Roeslan Wongsokoesoemo, Raden (l. 1901). Seorang jurnalis yang pernah menjadi penerjemah Asosiasi Perdagangan Jepang di Surabaya sebelum Perang Pasifik, ia bekerja sebagai pembantu kantor cabang *Asia Raja* dan *Djawa Shimbun* di Surabaya selama masa pendudukan Jepang. Ia juga menjabat sebagai wakil ketua Perserikatan Tanggung Jiwa “Boemipoetera” daerah Jawa Timur. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Romusha. “Serdadu Pekerja”, merupakan nama puitis bagi buruh kasar yang berada di bawah pengawasan militer dan direkrut dari penduduk lokal yang berada di wilayah kekuasaan Jepang. Awalnya, tenaga *romusha* bersifat sukarela, tetapi kemudian bersifat paksaan. Mereka harus bekerja berat tanpa mengenal batas waktu dengan ransum yang sangat minim untuk membuat berbagai instalasi militer. Banyak yang tewas karena kelaparan dan penyakit, dibunuh oleh Jepang setelah menyelesaikan instalasi rahasia atau terkena bom Sekutu. Diperkirakan 200-500 ribu orang Indonesia dijadikan *romusha*, di mana tidak lebih dari 70 ribu orang saja yang tetap hidup hingga akhir perang.



Rooseno Soerjohadikoesoemo, Raden (l. 1908). Seorang pegawai pekerjaan umum, ia memimpin distrik II pejabatan pengairan Jawa Timur pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.



Saikeirei. Pemberian hormat setiap pagi kepada *Tenno Heika* (Kaisar Jepang) dengan cara menundukkan kepala ke arah Tokyo. Sekalipun ditentang banyak kaum Muslim, upacara ini tetap dipaksakan untuk diikuti dalam sesi-sesi pelatihan para kyai dan ulama yang dibina oleh Jepang. Baru menjelang kekalahan Jepang Tokyo mengubah kebijakan ini untuk menarik dukungan kaum Muslim Indonesia.



Saiko Sikikan. Panglima Tertinggi Tentara.

Saito, Masatoshi (1885–1953). Memimpin Tentara ke-25 Jepang antara bulan Juli 1942-April 1943, Saito kemudian dipindahkan ke Jawa dan bertugas sebagai kepala staf Tentara ke-16. Pada bulan Maret 1944, ia disertai tanggung jawab untuk mengelola kamp tawanan perang di Malaya. Kebijakan sewenang-wenangnya terhadap para tawanan membuatnya diadili sebagai penjahat perang setelah penyerahan Jepang. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum mati.

Samsi Sastrawidagda (l. 1894). Pemimpin kantor partikelir tata usaha dan pajak di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, ia pernah duduk sebagai anggota dalam Majelis Pertimbangan Poetera

serta *Giin Chuo Sangi-in*, Jakarta. Setelah menjadi anggota BPUPKI, ia kemudian bertugas sebagai menteri keuangan RI pertama.

Samsuudin, Raden, Mr. (l. 1908). Seorang tokoh pergerakan Parindra sebelum runtuhnya Hindia Belanda. Saat Jepang menguasai Indonesia, ia diangkat menjadi pegawai *Sendenbu* dan ditugaskan untuk menjadi ketua umum Gerakan 3A. Setelah pembubaran organisasi tersebut, ia bekerja di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta dan menjadi kepala Bagian Keselatan Umum di kantor pusat Poetera di Jakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.



Sandakan, Barisan Maut. Peristiwa yang berlangsung antara bulan Januari hingga Juni 1945 ini merupakan serangkaian aksi berbaris yang dipaksakan oleh tentara Jepang terhadap ribuan *romusha* Indonesia asal Jawa dan tawanan perang Sekutu di Kalimantan Utara. Pada mulanya, para *romusha* dan tawanan perang dipekerjakan untuk membangun lapangan terbang di Sandakan. Karena khawatir Sekutu mendarat di sana, Jepang memaksa mereka berjalan dari Sandakan ke Ranau, yang jauhnya 260 kilometer di wilayah pedalaman.

Dalam perjalanan itu, 3.600 orang *romusha* dan 2.400 orang tawanan Sekutu tewas akibat kelelahan, penyakit, kelaparan, dan dibunuh oleh Jepang untuk menghilangkan bukti kejahatan perang. Hanya tiga orang tawanan yang selamat dari perjalanan maut tersebut karena berhasil melarikan diri. Mereka kemudian memberikan kesaksian dalam pengadilan kejahatan perang di Tokyo dan Rabaul. Tiga orang perwira Jepang yang bertanggung jawab atas peristiwa itu kemudian dieksekusi pada tahun 1946.

Sartono, Raden Mas (l. 1900). Advokat dan anggota Panitia Hukum Adat dan Tata Negara serta *Giin Chuo Sang-In* di Jakarta. Pada tahun 1945, ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

Sastromoeljono, Raden (l. 1898). Seorang tokoh pergerakan, selama masa pendudukan Jepang ia menjadi hakim di wilayah Tangerang dan Jakarta. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945.

Seinen Dojo. Tempat pelatihan militer pertama di Tangerang yang memberikan latihan militer penuh kepada para pemuda Indonesia. Diawasi oleh Kapten Yanagawa dari *Beppan*.

Seinendan. Barisan Pemuda yang beranggotakan para pemuda yang berusia 14 hingga 20 tahun. Tugasnya adalah sebagai barisan cadangan untuk mengamankan garis belakang. *Seinendan* memiliki cabang di setiap tingkatan wilayah administratif, yaitu dari tingkat *Si* hingga *Shu*. Selain itu, di pabrik-pabrik dibentuk pula *Seinendan Kōjō* sementara di daerah perkebunan dibentuk *Seinendan Jigyōjo*. *Seinendan* juga memiliki cabang yang beranggotakan kaum wanita yang disebut *Josyi Seinendan* (*Seinendan Putri*). Jumlah *Seinendan* di Jawa kira-kira setengah juta orang

Parade anggota barisan Seinendan dengan memanggul bambu runcing di depan para petinggi militer Jepang..



Seinenkurenscho. Organisasi pemuda yang bersifat militer pada masa awal pendudukan Jepang di Jawa. Dibubarkan setelah Peta didirikan.

Sekolah Tonil. Didirikan Seksi Propaganda *Sendenbu* di Jakarta pada bulan Juni 1942. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas seni sandiwarra modern Indonesia berdasarkan semangat ketimuran. Dipimpin oleh tiga ahli seni dari Jepang, yaitu R. Takeda, K. Jasoeda, dan Sakoema, serta seorang sutradara Indonesia, R. Ariffien. Sekolah ini menjadi semacam pusat pimpinan dari semua pertunjukan tonil atau sandiwarra dan kesenian di seluruh Jawa.

Sendenbu. Departemen Propaganda yang dibentuk di bawah *Gunseikanbu* di Jawa pada bulan Agustus 1942. Bertanggung jawab atas propaganda dan informasi yang menyangkut pemerintah sipil. Sekalipun kegiatannya terbatas pada urusan sipil, *Sendenbu* selalu dikepalai oleh seorang perwira angkatan darat. Jawatan ini memiliki tiga seksi, yaitu Seksi Administrasi, Seksi Berita dan Pers, serta Seksi Propaganda.

Shi. Kotapraja.

Shibata, Yaichiro (?). Panglima Armada Ekspedisi Selatan ke-2 sejak Januari 1945 dan perwira AL Jepang senior di Indonesia. Ia sangat menentang keberadaan organisasi-organisasi politik di wilayah kekuasaan Angkatan Laut di Indonesia, sehingga semua organisasi politik maupun organisasi yang memiliki kecenderungan nasionalis dibatasi. Setelah penyerahan Jepang, ia berbalik mendukung RI dan memberikan akses persenjataan Jepang kepada para pemuda di Surabaya.

Shimizu, Hitoshi (?). Propagandis profesional Jepang yang memulai kariernya sebagai propagandis di Jepang pada tahun 1930-an. Shimizu ditunjuk menjadi atase sipil yang bertugas sebagai militer dan bertanggung jawab atas propaganda oleh Tentara ke-16 selama pendudukan Jepang di Indonesia. Ia adalah otak pembentukan Gerakan 3A.



Shimizu dekat dengan orang-orang Indonesia, baik kalangan pemuda maupun tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta. Ia ikut mendirikan Asrama Angkatan Muda di Menteng 31 dan memberikan rumah di Pegangsaan Timur 56 dan mobil limusin Buick—kelak menjadi mobil kepresidenan—untuk Soekarno. Menjelang proklamasi, ia membantu mencari kain merah putih untuk bahan Fatmawati membuat bendera.

Ketika Jepang menyerah, ia membentuk kelompok rahasia Kipas Hitam untuk menyebarkan teror dan kebencian terha-

dap orang kulit putih di Indonesia. Ia ditangkap Sekutu pada akhir tahun 1945.

Shimizu tetap menjalin kontak dengan Indonesia. Ia membentuk Asosiasi Kebudayaan Jepang-Indonesia dan, setelah tahun 1964, berusaha menghubungkan perkumpulan kebudayaannya dengan Lembaga Persahabatan Indonesia-Jepang, yang diketuai Ratna Sari Dewi.

Shodan. Peleton.

Shodanco. Pangkat dalam Peta yang mengacu pada komandan peleton.

Shōdansō. Kantor studio radio di kabupaten. Kantor ini adalah satu-satunya badan yang diizinkan Jepang untuk melakukan reparasi, servis, dan penyegelan radio.

Shūmubu. Kantor Urusan Agama, didirikan pada bulan Maret 1942. Dipimpin oleh Kolonel Horie Choso dan memiliki sejumlah staf yang terdiri atas orang-orang Muslim Jepang. Bertugas memelihara kerja sama dengan para ulama dan pemimpin Islam lainnya serta mengawasi mereka. Setelah tahun 1944, kepemimpinan *Shūmubu*

mulai dipegang oleh para tokoh Muslim Indonesia, termasuk jabatan ketuanya yang dipegang oleh Profesor Hoesein Djajadiningrat.

Shumuka. Kantor cabang *Shūmubu*.

Shu Sangi-kai. Dewan Penasihat Residen. Sebuah dewan yang dibentuk pada bulan November 1943 di setiap residen di daerah pendudukan Jepang di Sumatra. Tugasnya adalah memberikan nasihat kepada Residen (*Shu-Cokan*).

Sinar. Surat kabar dwimingguan khusus yang dibagikan kepada para ulama di Jawa oleh *Shūmubu*. Ditulis dalam bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda dengan menggunakan aksara Arab.

Sinar Baroe. Surat kabar yang beredar di Semarang selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh Parada Harahap. Memiliki oplah 7.000 eksemplar.

Sinar Matahari. Surat kabar yang beredar di Yogyakarta selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh R. Soedjito. Memiliki oplah 5.000 eksemplar.

Singgih, Raden Pandji (l. 1894). Seorang tokoh pergerakan, pada zaman Jepang ia menjadi Pembantu Umum Naimubu Koseika Tyoo Jakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Siti Soekaptinah Mangoenpoespito, Raden Nganten (l. 1907).



Seorang guru Taman Siswa dan anggota *Gemeente Raad* Semarang pada zaman kolonial, Siti Soekaptinah ditunjuk oleh Jepang untuk mengepalai Bagian Wanita Kantor Pusat *Djawa Hooko Kai* pada tahun 1944. Ia juga bertugas sebagai ketua pengurus *Fujinkai*. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.



Soeara Asia. Surat kabar yang beredar di Surabaya selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh R. Tukul Surohadinoto. Memiliki oplah 23.000 eksemplar.

Soeara Moeslimin Indonesia. Surat kabar milik Masjoemi. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin dan ditujukan bagi para cendekiawan Muslim perkotaan. Berada di bawah pengawasan *Shūmubu*.

Soedara (Soember Darah Rakjat). Disebut juga dengan nama *Kenkaku Dasi*, organisasi ini dipimpin oleh seorang perwira Jepang, Kimura. Ketuanya Andi Mappanjuki, Raja Bone, dan wakilnya G.S.S.J. Ratulangie. Usianya pendek tetapi menjadi dasar dari Poesat Keselamatan Rakjat pada masa revolusi.

Soedirman (1915–1950). Seorang guru Muhammadiyah dan HIS pada zaman kolonial, saat Perang Pasifik pecah ia bergabung dengan Dinas Peringatan Serangan Udara Belanda di Cilacap. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota *sangikai* Banyumas Syu

dan bergabung dengan Peta sebagai seorang *daidanchō*. Ia kemudian menjadi panglima TNI selama Perang Kemerdekaan.

Soedirman, Raden (l. 1890). Seorang tokoh pergerakan, ia bekerja sebagai *Fuku Kaityō Syuu Hookō Kai* dan *Gityō Surabaya Syuu Sangi Kai*. Ia merupakan salah satu anggota BPUPKI dan sebagai residen Surabaya kemudian aktif dalam usaha perebutan senjata dari pasukan Jepang di kota itu setelah Proklamasi.

Soedjono, Raden (l. 1912). Lahir dari sebuah keluarga bangsawan Jawa, Soedjono mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden. Ia kemudian memperoleh beasiswa untuk belajar di Tokyo, di mana ia mengajar bahasa Indonesia bagi para perwira Jepang dan menjadi seorang komentator radio. Ia kembali ke Jawa dengan pasukan Jenderal Imamura sebagai seorang kolonel Jepang dan bertugas sebagai penerjemah mereka.



Pada masa pendudukan Jepang, setelah pangkat militernya dicabut, Soedjono bekerja sebagai seorang staf sipil pemerintahan militer Jepang di Jawa. Ia sempat ditahan oleh Belanda setelah penyerahan Jepang. Ia kemudian aktif dalam dunia diplomasi dan sempat menjadi duta besar RI di Tokyo.

Soekardjo Wirjopranoto, Raden (1903–1962). Tokoh nasionalis Indonesia yang aktif dalam sejumlah organisasi pergerakan sejak zaman kolonial Belanda. Pernah menjadi anggota Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya serta sekretaris Gabungan politik Indonesia (GAPI). Pada masa pendudukan Jepang, bekerja sebagai

kepala editor surat kabar *Asia Raja*. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI. Setelah kemerdekaan Indonesia, aktif di bidang diplomasi.

Soekarni (1916–1971). Seorang tokoh pergerakan pemuda, pada



masa pendudukan Jepang ia bekerja sebagai wartawan di kantor berita *Domei*. Ia kemudian ditugaskan untuk memimpin Asrama Men-teng 31 yang berfungsi sebagai tempat penggemblengan para pemuda sebagai kader nasionalis. Saat Jepang menyerah, ia menjadi salah satu motor penggerak usaha penculikan Soekarno-Hatta untuk memaksa kedua tokoh itu untuk memproklamasikan kemerdekaan RI sesegera mungkin.

Soekarno (1901–1970). Salah seorang tokoh nasionalis Indonesia yang terkemuka, Soekarno dibebaskan oleh pasukan Jepang dari tempat pengasingannya di Bengkulu dan kemudian dipulangkan ke Jawa setelah penyerahan Hindia Belanda.

Pada awalnya, ia diangkat menjadi anggota Panitia Adat dan Tata Negara. Saat Gerakan 3A mengalami kegagalan, ia ditunjuk untuk memimpin Poetera bersama-sama Hatta, K.H. Mas Mansoer, dan Ki Hadjar Dewantara. Sementara Soekarno dkk menggunakan Poetera untuk menyemai jiwa nasionalisme di kalangan orang Indonesia di Jawa dan Madura, Jepang menggunakan kemampuan orator tokoh nasionalis ini untuk kepentingan perangnya, termasuk merekrut para *romusha*. Akibatnya, ada banyak kritikan yang diarahkan kepadanya mengenai aktivitasnya tersebut, baik dari kalangan Sekutu maupun lawan-lawan politiknya di kemudian hari.

Setelah Poetera dibubarkan, ia diangkat menjadi ketua kantor pusat *Djawa Hoko Kai*. Selain itu, selama beberapa waktu ia juga memimpin *Chuo Sangi-in*, di mana sebagai ketuanya ia memimpin sebuah delegasi Indonesia yang berkunjung ke Tokyo.

Pada tahun 1945, Soekarno ditunjuk menjadi anggota BPUPKI. Kharismanya segera menonjol di antara para anggota badan tersebut, terutama setelah ia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara baru yang hendak dibentuk dalam sebuah pidato yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk menenangkan para tokoh Islam, ia kemudian membentuk sebuah panitia khusus yang disebut sebagai Panitia Sembilan, di mana suatu kompromi yang disebut Piagam Jakarta disetujui.

Menjelang penyerahan Jepang, Soekarno, bersama Hatta dan Radjiman, pergi ke Saigon untuk menemui Marsekal Terauchi, panglima Tentara Wilayah Selatan Jepang. Di sana Terauchi melantik Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

Ketika penyerahan Jepang diketahui, pada mulanya Soekarno menolak



permintaan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan RI tanpa melalui kerangka PPKI sebagai badan perwakilan yang berbicara bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun sikapnya ini tidak disukai oleh para pemuda, yang kemudian menculik dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok.

Setelah dibebaskan para pemuda, Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mendapatkan jaminan keselamatan dari Laksamana Maeda. Soekarno kemudian diangkat menjadi presiden pertama RI, suatu jabatan yang dipegangnya selama 20 tahun berikutnya.

Soekarno wafat pada tahun 1970 dalam keadaan diasingkan setelah kekuasaannya diambil alih oleh Jenderal Soeharto.

Soekiman, Wirjosandjojo (l. 1896). Seorang dokter dan tokoh MIAI, pada tahun 1945 ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

Soeleiman Effendi Koesoemaatmadja, Raden, Dr. (1898). Seorang pegawai kehakiman pada zaman kolonial Belanda, Koesoemaatmadja diangkat oleh Jepang menjadi ketua *Tihoo Hooin* Semarang dan Pemimpin Kehakiman Jawa Tengah. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

Soematera Chuo Sangi-in. Badan Penasihat Pusat yang sifatnya konsultatif untuk Pulau Sumatra. Didirikan pada bulan Maret 1945 oleh Tentara ke-25, lembaga yang dipimpin oleh Moehammad Sjafei itu hanya mengadakan satu kali pertemuan di Bukittinggi sebelum berakhirnya perang.

Soeprijadi (1923–1945?). Lulusan pelatihan pemuda (*Seimendojo*) di Tangerang ini bergabung dengan Peta saat pemerintahan militer Jepang mendirikan organisasi kemiliteran itu. Tamat dari pendidikan Peta, Soeprijadi diangkat menjadi *shodancho* Peta di Blitar. Sedih dengan penderitaan *romusha* yang diawasinya, ia kemudian memimpin pemberontakan Peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas Jepang dan sejumlah pemimpinnya diadili dan dihukum mati atau penjara. Namun Soeprijadi tidak ikut diadili dan diperkirakan dibunuh oleh Jepang secara rahasia.



Soepomo, Raden (1903-1958). Seorang ahli hukum adat, pada masa pendudukan Jepang ia bekerja sebagai Kepala Kantor Perundang-undangan (*Kooki Kyoku Cho*) di Departemen Justisi. Ia juga bertugas sebagai anggota Mahkamah Agung (*Saiko Hooin*) dan

Panitia Hukum Adat dan Tata Negara. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Departemen Justisi. Pada tahun 1945, ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, di mana ia merupakan Ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia sempat menjadi menteri kehakiman. Ia juga membantu perumusan UUD RIS maupun UUDS 1950.

Soerio, Raden Mas Toemenggoeng Aria (1895-1948). Lulusan pendidikan kepolisian di Sukabumi, Soerjo sempat menjadi bupati di Magetan dari tahun 1938 hingga Jepang berkuasa di Indonesia. Pada saat pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi residen di Bojonegoro, suatu jabatan yang jarang dipegang oleh orang Indonesia. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi gubernur Jawa Timur dan memiliki peran besar dalam mengobarkan perlawanan penduduk Surabaya terhadap Sekutu. Ia dibunuh oleh PKI selama pemberontakan tahun 1948.

Soerjohamidjoyo, Raden Kanjeng Pangeran Aria (l. 1905). Ajudan Sultan Solo, pada tahun 1945, ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.

Soeroso, Raden Pandji (1893–1981). Seorang wartawan dan tokoh Serikat Islam, pada tahun 1942 ia merupakan anggota pengurus besar Parindra. Selama masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai *Fuku Kaityoo Syu Hokokai Malang*. Ia kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua BPUPKI dan anggota PPKI. Setelah Proklamasi, ia menjadi gubernur Jawa Tengah yang pertama dan pernah menjadi menteri pekerjaan umum RI.

Soetan Sjahrir (1909–1966). Tokoh nasionalis Indonesia, menjelang jatuhnya Hindia Belanda Soetan Sjahrir dipulangkan bersama M. Hatta ke Jawa oleh Belanda dari tempat pengasingan mereka di Banda Neira. Selama pendudukan Jepang, ia menolak bekerja sama dengan mereka dan memilih membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis.

Dimotori oleh para kader PNI Baru dan para mahasiswa progresif, kelompok Sjahrir terutama memonitor berita dari stasiun



radio luar negeri yang terlarang selama sembunyi-sembunyi. Berita-berita yang diperolehnya kemudian disampaikan kepada Hatta, termasuk berita penyerahan Jepang, yang kemudian dijadikan alasan para pemuda untuk mendorong Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan RI.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjahrir ditunjuk menjadi perdana menteri RI. Karena dinilai bersih dari noda kolaborasi dengan penguasa pendudukan

Jepang, Sjahrir diterima dengan baik oleh Inggris maupun Belanda sebagai juru runding RI selama masa awal kemerdekaan. Namun, ia kemudian berseberangan dengan Soekarno dalam hal kepemimpinan, yang diungkapkannya dalam tulisannya yang berjudul *Perjuangan Kita*. Dalam tulisannya itu, ia menyerang gaya kepemimpinan Soekarno yang sangat terobsesi pada masalah persatuan dan kesatuan dibangun di atas solidaritas hierarkis dan feodalistis, yang menurutnya tidak lebih dari gaya lain fasisme.

Sikap Sjahrir yang secara tidak langsung mengkritik Soekarno sebagai kolaborator Jepang membuatnya tidak populer di kalangan TNI dan maupun laskar-laskar. Mereka menganggap bahwa kritikan itu secara tidak langsung juga diarahkan terhadap mereka, karena sebagian besar dari mereka merupakan produk pendidikan militer Jepang. Akibatnya, Sjahrir kemudian diculik oleh sekelompok perwira radikal. Namun atas perintah Soekarno, ia kemudian dibebaskan. Sekalipun demikian, perselisihan politiknya dengan Soekarno berlanjut dan Sjahrir hidup dalam pengasingan di Swiss hingga akhir hayatnya.

Soerachman Tjokroadisoerjo, Raden Mas Panji (l. 1894). Seorang tokoh dan aktivis kerajinan rakyat, pada masa pendudukan Jepang

menjabat sebagai Pemimpin *Kogjo Tyoo Djimuso* (kantor Pusat Kerajinan) dan jawatan Tera di Jakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Soerastri Karma Trimurti (1912–2008). Lebih dikenal dengan sebutan S.K. Trimurti. Seorang guru dan wartawati, ia dan suaminya, Sayuti Melik, sempat ditahan *Kempeitai* karena dicurigai berhubungan dengan kaum komunis. Dibebaskan berkat campur tangan Soekarno, ia kemudian bekerja di kantor pusat Poetera. Setelah proklamasi, ia sempat bertugas sebagai menteri perburuhan dalam kabinet Amir Sjarifoeddin.

Soesanto Tirtoprodjo, Mas (l. 1900). Seorang sarjana hukum dan tokoh Parindra, pada masa pendudukan Jepang ia menjabat sebagai *Madiun Sityoo*. Ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Raden (1890–1976). Seorang tokoh nasionalis dan anggota *Volksraad*, Soetardjo Kartohadikoesoemo terkenal dengan Petisi Soetardjo yang menuntut agar Indonesia dimerdekakan dalam lingkup persemakmuran dengan Belanda pada tahun 1936. Dengan kemampuan dan pengalaman pemerintahan yang dimiliki sebagai seorang aparatur kolonial, ia diangkat sebagai pemimpin *Sanyoo Naimubu* (Departemen Dalam Negeri) pada masa pendudukan Jepang. Setelah itu, Soetardjo juga diangkat oleh *Gunseikan* sebagai *Syuyutyookan* dari daerah Jakarta.



Pada masa akhir kekuasaan Jepang, ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI-PPKI. Ia juga menjadi anggota tim kecil perumus Pembukaan UUD sebelum kemudian diubah oleh Soekarno menjadi Tim Sembilan.

Sebagai penguasa daerah Jakarta, Soetardjo terlibat dalam proses perumusan Proklamasi, mulai dari peristiwa Rengasdengklok hingga penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Ia juga hadir dalam upacara pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Soewandi, Raden (l. 1898). Seorang tenaga pendidik profesional, pada awal pendudukan Jepang ia duduk sebagai anggota Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945.

Sokan. Inspektur jenderal, jabatan kepala pemerintahan *Minseifu*.

Son. Kecamatan.

Sonei, Kenichi (m. 1946). Komandan Kamp Interniran Tjideng, Jakarta. Selama kepemimpinannya, penghuni kamp meningkat dari 5.286 orang menjadi 10.300. Ia dikenal sebagai orang yang kejam, terutama saat bulan purnama. Ia sering ‘menjemur’ para tawanan, termasuk orang sakit, selama berjam-jam di bawah sinar matahari yang terik; mengurangi jatah makan mereka; serta melakukan siksaan fisik terhadap orang-orang tersebut. Setelah perang, sebuah pengadilan militer Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ia dieksekusi pada bulan Desember 1946.

Sosrodiningrat, Kanjeng Raden Mas Hario (l. 1902). Seorang birokrat, pada masa pendudukan Jepang ia menjabat sebagai *Giin Tyuuoo Sangi In Jakarta* sebelum diangkat menjadi *Solo Kooti Soomu Tyookan*. Ia kemudian ditunjuk menjadi anggota BPUPKI.

S.S. Siap Sedia. Sebuah organisasi bawah tanah Melayu yang bertujuan untuk melindungi identitas penduduk asli dan membangun otonomi politik Sumatra Timur. Dipimpin oleh Tengku Rahmat dan Datuk Hafiz Haberham, gerakan ini merupakan jawaban atas kebijakan Jepang yang mendorong kaum nasionalis dan para pendatang untuk memusuhi kerajaan-kerajaan lokal. Memiliki jaringan di Langkat,

Serdang, Deli, dan Asahan, S.S. diperkirakan memiliki ribuan orang anggota dan mendapat dukungan masyarakat Sumatra Timur, terutama dari golongan bangsawan. Tanda anggotanya adalah huruf “V”, yang diambil dari simbol “Victory” (kemenangan) Sekutu atau simbol “Vreie” (bebas) milik Belanda.

Sparow Force. Pasukan ekspedisi Australia di bawah Brigadir Jenderal W.G.D. Vale yang membantu mempertahankan Pulau Timor dari serangan Jepang. Sekalipun gagal mempertahankan Timor, pasukan ini, bersama sebuah kontingen KNIL, berhasil melakukan perang gerilya melawan Jepang dengan bantuan penduduk lokal hingga saat mereka diungsikan ke Australia dengan kapal-kapal perang Sekutu antara bulan Desember 1942 dan Januari 1943.



Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1912–

1988). Penguasa Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menolak tawaran Belanda untuk mengungsi ke luar negeri saat Jepang menyerang Indonesia karena ingin tetap berada di dekat rakyatnya. Selama pendudukan Jepang, Kesultanan Yogyakarta berstatus daerah istimewa yang memiliki pemerintahan otonom. Ia berusaha keras untuk menghindarkan rakyatnya dari penugasan *romusha* dan berhasil meminta Jepang mengalihkan tenaga mereka untuk

membangun saluran air demi kepentingan penduduk lokal.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, ia memihak Republik. Ia menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan RI, termasuk menjadi wakil presiden kedua RI.

Stadswacht. Pengawal Kota. Organisasi teritorial paruh waktu dan paramiliter yang berada di luar struktur KNIL tetapi berada di bawah komandonya. Stadswacht memiliki garis suplai dan perlengkapan yang terpisah. Anggotanya terdiri atas para wajib militer Eropa (Militie dan

Landstorm), penduduk Tionghoa, dan orang Indonesia, yang bertugas untuk melakukan penjagaan atau perlindungan lokal, terutama di kota-kota besar. Dipersenjatai dengan senapan dan senapan mesin standar militer, di beberapa tempat seperti di Medan mereka dikerahkan sebagai prajurit infanteri reguler. Bahkan di Jakarta terdapat sebuah detasemen Angkatan Laut Stadwacht.



Starkenborgh-Statchouwer, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van (1888–1978). Gubernur-Jenderal Hindia Belanda terakhir, Tjarda adalah seorang diplomat ulung Belanda. Setelah menjadi gubernur Provinsi Groningen dan duta besar di Brussel, pada tahun 1936 ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia-Belanda ke-66.

Menjelang penyerahan Hindia Belanda, ia berhasil mengelak untuk menandatangani penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang dengan menyerahkan kepemimpinan militer yang biasanya dipegang gubernur jenderal kepada panglima KNIL. Sebagai gantinya, Jepang hanya memperoleh penandatanganan suatu penyerahan militer dari Letnan Jenderal ter Poorten. Sekalipun secara *de facto* tidak mengubah apa-apa, secara *de jure* tindakannya membuat Belanda dapat mengklaim bahwa Hindia Belanda tidak pernah menyerah karena penyerahan di Kalijati hanya bersifat militer. Tjarda sendiri kemudian ditawan di kamp tawanan di Taiwan.

Setelah Perang Pasifik usai, Tjarda pulang ke Belanda. Ia menolak menjadi gubernur jenderal kembali saat Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia.

Suishintai. Lihat Barisan Pelopor.

Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (1895–1944). Penguasa Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif dituduh sebagai otak persekongkolan anti-

Jepang oleh *Tokkeitai* dan ditangkap bersama sejumlah pembantunya. Mereka dibawa ke Krekot dan dieksekusi dalam peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Mandor.

Sumatra Hokokai. Perhimpunan Kebaktian Rakyat Sumatra. Diketahui oleh Mohammad Sjafei, badan yang dibentuk pada tahun 1944 ini merupakan penasihat tetap gubernur Jepang di Sumatra.

Sutan Takdir Alisjahbana (1908–1994). Seorang pujangga, saat pemerintah pendudukan Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada 20 Oktober 1942, Takdir duduk sebagai penulis ahli. Pada tahun 1943, ia mendirikan kantor bahasa yang bertugas menyusun, menentukan, serta menyeragamkan istilah-istilah ilmu yang diajarkan di sekolah. Ia juga aktif menulis di sejumlah media yang dikontrol pemerintah pendudukan Jepang.

Sumera. Tarikh Jepang. Digunakan di Jawa sejak tanggal 29 April 1942, yang dalam tahun *Sumera* sama dengan tahun 2602 *Sumera*.

Syonan Gomu Kumia. Badan yang bertugas mengoordinasikan semua hasil perkebunan di Sumatra. Jawatan yang bermarkas di Singapura ini sendiri mengklaim bahwa seluruh tanah perkebunan adalah milik Kekaisaran Jepang, sehingga hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa tradisional dan hak sewa tanah, sebagaimana diatur dalam hukum kolonial Belanda, dihapuskan. Jawatan ini kemudian dibubarkan pada tahun 1944 dan digantikan oleh Badan Pengurusan Pertanian.

Syu. Keresidenan.



Talapeta. Taman Latihan Petani. Program pelatihan pertanian, indoktrinasi dan militer yang didirikan kepala polisi militer Jepang Inoue Tesuro dan Gerindo, pendahulu Mokutai dan Barisan Harimau Liar.

Tanabe, Moritake (1889–1949). Letnan jenderal dan bekas kepala Staf Umum Angkatan Darat Jepang, pada bulan April 1943 Tanabe diberikan tugas memimpin Tentara ke-25 Jepang yang berpusat di Bukittinggi. Ia memegang jabatan itu hingga perang berakhir. Ia dieksekusi oleh Sekutu sebagai seorang penjahat perang pada tahun 1949.

Tan Eng Hoa (l. 1907). Seorang tokoh Tionghoa yang berlatar sarjana hukum. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Tawanan Perang. Sebutan bagi anggota militer yang ditawan. Di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, sebagian besar tawanan perang terdiri atas orang-orang Belanda, Indo, dan Indonesia, serta sejumlah orang Inggris, Australia, Amerika, dan anggota militer Sekutu lainnya.

Kebanyakan anggota KNIL yang berasal dari suku Jawa, Sumatra, dan Timor yang ditawan Jepang dibebaskan tidak lama setelah Hindia Belanda menyerah. Sebaliknya, orang Ambon dan Manado, yang dicap pro-Belanda, kebanyakan tetap ditawan bersama-sama para perwira dan bintara pribumi KNIL.

Pada mulanya, para tawanan perang ditempatkan di kamp-kamp di dekat tempat mereka menyerah. Namun tidak lama kemudian—

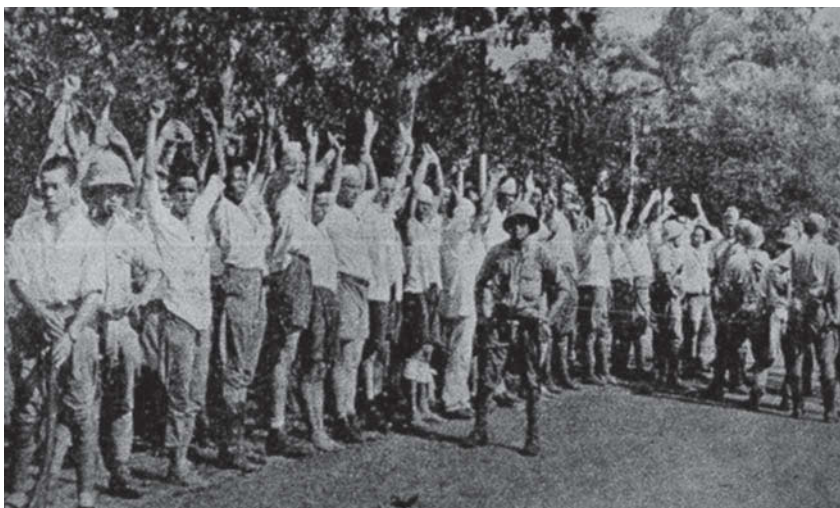
pada bulan Mei 1942 di Sumatra, dan Oktober 1942 di Jawa—para tawanan dipindahkan hingga ke tempat-tempat yang jauh, kadang kala hingga sejauh Jepang atau Manchuria.

Penghuni kamp tawanan dibedakan menurut garis pangkat, kebangsaan, dan rasial (Asia atau non-Asia). Biasanya, para tawanan perang Belanda totok dan Indo ditempatkan di kamp yang sama, meskipun di sebuah kamp di Cimahi kedua kelompok itu dipisahkan selama beberapa bulan pada tahun 1942. Di Kamp Lawesigalaga di Sumatra Utara, para tawanan Indo dan pribumi KNIL dicampur bersama-sama.

Berlawanan dengan hukum internasional, Jepang mengerahkan banyak tawanan perang untuk bekerja di proyek-proyek militer mereka. Sebagai contoh, lebih dari 6.000 orang tawanan dipaksa membangun lapangan-lapangan terbang di Maluku dan Flores, sementara 5.000 orang dikerahkan untuk membangun sebuah jalan kereta api dari Pekanbaru ke Muaro di Sumatra. Lebih dari 2.100 orang lainnya digunakan untuk membangun lapangan-lapangan terbang di dekat Palembang.

Sekitar 18.000 orang tawanan Belanda dan Indo dikirimkan ke daratan Asia dan dipaksa mengerjakan jalur kereta api Birma-Siam

Pasukan Jepang berpose bersama sekelompok tawanan perang KNIL yang ditangkanya di suatu tempat di Indonesia.



yang terkenal itu. Lebih dari 8.000 orang, termasuk ribuan orang yang selamat dari proyek maut rel kereta api itu, akhirnya berakhir di Jepang.

Jepang juga melanggar hukum internasional dengan memaksa banyak tawanan KNIL dari kalangan pribumi dan Indo untuk bergabung dengan *Heiho* dan mengirimkan mereka ke garis depan.

Mentalitas Jepang yang memandang penyerahan sebagai suatu aib menimbulkan penderitaan bagi tawanan perang Sekutu. Ratusan orang tawanan dilaporkan dibunuh tentara Jepang, terutama pada hari-hari pertama penyerbuan Jepang ke Indonesia. Ribuan lainnya dibiarkan mati akibat wabah penyakit, kelaparan, dan kelelahan.

Kebijakan Jepang yang menempatkan tawanan perang di dekat objek-objek militer mereka membuat orang-orang malang tersebut rentan terhadap serangan Sekutu. Contohnya, diperkirakan 15.000 orang tawanan perang Sekutu, termasuk 3.600 orang Belanda dan Indo, tewas akibat serangan Sekutu terhadap kapal-kapal pengangkut Jepang. Salah satu contoh terkenal dari insiden ini adalah ditenggelamkannya kapal *Junyo Maru* di dekat Bengkulu pada bulan September 1944.

Pada awalnya, Jepang enggan membiarkan para tawanan perang dan interniran pria dibebaskan jika mereka berada di wilayah operasi militer Jepang dan memberikan wewenang bagi para komandan lokal, jika perlu, untuk mengambil “tindakan luar biasa” terhadap mereka, termasuk membunuh mereka.

Namun kemudian Kementerian Peperangan Jepang membatalkan kebijakan tersebut dan memerintahkan agar para tawanan boleh dibebaskan jika Jepang kesulitan memindahkan mereka dari zona operasi militer. Bahkan mereka harus disediakan bahan pangan minimum jika memang terpaksa dibebaskan. Sekalipun demikian, perintah itu juga mencantumkan “tindakan darurat” yang harus diperbuat jika terjadi pemberontakan di antara para tawanan.

Pembebasan tawanan perang Belanda tidak berlangsung secara serentak. Orang-orang yang ditawan di luar negeri, seperti di Jepang, Birma, Thailand, dan Singapura relatif lebih cepat dibebaskan. Demikian pula dengan orang-orang yang ditawan di Sumatra dan Indonesia Timur. Kesulitan muncul terutama di Jawa, di mana usaha

untuk memulangkan para tawanan dan interniran Sekutu mendapatkan perlawanan di beberapa tempat dari para pejuang Indonesia.

Banyak di antara para tawanan yang dibebaskan dan dianggap memiliki kesehatan yang cukup baik sendiri kemudian segera digabungkan ke dalam KNIL yang dibentuk kembali dan menjadi alat Belanda untuk menjajah Indonesia lagi. Namun sekitar 8.200 orang di antara mereka tidak berhasil selamat dari penawanan.

Tencōsetsu. Hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Terauchi, Hisaichi (1879–1946) Anak sulung bekas Perdana Menteri Terauchi Masatake, ia bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun 1900 dan berpartisipasi dalam Perang Rusia-Jepang. Setelah menjadi atase militer di Jerman dan bekerja sebagai pengajar di Akademi Militer, ia menjadi panglima Angkatan Darat di Korea dan, kemudian, di Taiwan. Pada tahun 1936, Terauchi menjadi Menteri Peperangan Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Koki Hirota.



Selama Perang Cina-Jepang Kedua, ia memimpin tentara Jepang di Cina Utara. Pada tahun 1941, ia diangkat sebagai panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan dan menyusun rencana penyerbuan Jepang di Asia Pasifik bersama Laksamana Yamamoto Isoroku. Setelah memimpin kampanye militer di Asia Tenggara pada tahun 1941-1942, ia diangkat menjadi Marsekal Mandala dan Panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan yang bermarkas besar di Dalat, Indocina.

Beberapa hari menjelang penyerahan Jepang, Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan dr. Radjiman ke Dalat serta menyampaikan keputusan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Terauchi sendiri meninggal sebagai tawanan perang di Malaya setelah menyerahkan diri kepada tentara Inggris.

Tjahaja. Surat kabar yang diterbitkan di Bandung selama masa pendudukan Jepang. Pemimpin umumnya adalah R. Oto Iskandardinata. Memiliki oplah 8.000 eksemplar.

Tojo, Hideki (1884–1948). Seorang perwira radikal, Tojo diangkat menjadi menteri peperangan Jepang pada tahun 1940 dan mendorong Jepang bergabung dengan Aliansi Poros Jerman Nazi-Italia Fasis. Pada tahun berikutnya, ia menjadi perdana menteri Jepang dan membawa negerinya mengobarkan Perang Pasifik.

Pada bulan Juli 1943, Tojo mengunjungi Jawa dan menjanjikan akan memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negeri di Jawa. Namun usulnya untuk memerdekakan Indonesia ditolak oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

Pada tahun 1944, setelah kekalahan Jepang di Saipan, Tojo mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Setelah perang, ia mencoba bunuh diri tetapi gagal. Ia kemudian diadili sebagai penjahat perang oleh Sekutu dan dijatuhi hukuman mati.



Tokkeitai. Singkatan dari *Kaigun Tokubetsu Keisatsu Tai*, atau Korps Polisi Khusus Angkatan Laut. Didirikan pada tanggal 18 Juli 1942 dengan penunjukan para perwira Polisi Khusus Angkatan Laut oleh Menteri Angkatan Laut Jepang, *Tokkeitai* hanya bertugas di wilayah Indonesia yang diduduki oleh Angkatan Laut Jepang.

Berbeda dengan *Kempeitai*, *Tokkeitai* masih baru dalam kegiatan kepolisian. Cara penyelidikan mereka sangat kasar dan sering kali menangkap orang yang tidak bersalah. *Tokkeitai* bertanggung jawab atas pembunuhan besar-besaran di Kalimantan antara bulan Oktober 1943 hingga Juni 1944 dan terlibat dalam kegiatan pemaksaan terhadap para wanita Indonesia untuk dijadikan budak seks di kawasan timur Indonesia.

Tokubetsu Keibotai. Pasukan Pengawal Istimewa, unit elite *Keibōdan*. Anggotanya terdiri dari para pemuda pilihan.

Tokubetsu Shi. Kotapraja istimewa. Hanya mengacu pada Jakarta.

Tomi Shudan. Tentara ke-25 Jepang, dibentuk pada tanggal 5 Juli 1941 di bawah Markas Besar Umum Kekaisaran. Ditempatkan di bawah kontrol Kelompok Tentara Ekspedisi Selatan Jepang. pada 6 November 1941.

Terkenal karena menaklukkan Malaya dan Singapura, Tentara ke-25 kemudian bertugas sebagai garnisun penjaga wilayah pendudukan Malaya, Singapura, dan Sumatra. Untuk menghadapi ancaman Sekutu, pada pertengahan 1945, Tentara ke-25 ditempatkan di bawah Tentara Kawasan Ketujuh Jepang dan markas besarnya dipindahkan ke Bukittinggi di Sumatra Barat. Mereka menduduki Sumatra hingga penyerahan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Tonarigumi. Cikal bakal dari rukun tetangga (RT). Secara resmi diperkenalkan di Jawa pada bulan Januari 1944. Terdiri atas 10 atau 20 rumah tangga dan digunakan untuk memperketat cengkeraman pemerintah atas penduduk serta untuk meningkatkan komunikasi dengan mereka. Lima atau enam *tonarigumi* kemudian digabungkan ke dalam *Chokai* (rukun kampung). Jumlah total tonarigumi di Jawa adalah 508.745 dan jumlah total rumah tangganya adalah 8.967.320.

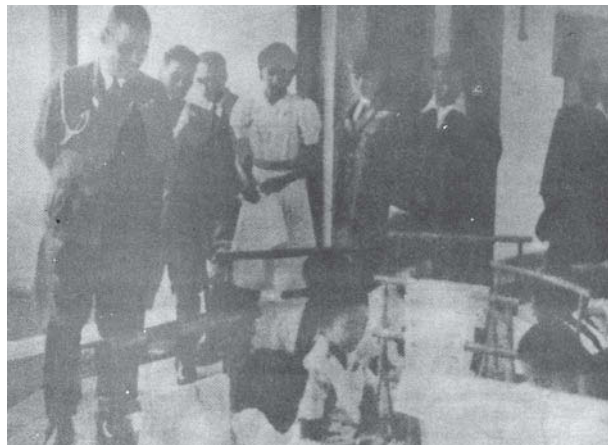
U, V, W

Vrijwilige Oefen Corps. Korps Pertahanan Sukarela, disingkat VOC. Jawatan pertahanan sipil yang didirikan menjelang serbuan Jepang ini mendapatkan kritikan luas dari kaum nasionalis Indonesia yang menganggap Belanda kurang sensitif dengan memakai singkatan “VOC” karena nama tersebut kurang enak bagi Indonesia. Dengan demikian, sementara orang Belanda memilih nama dari bagian sejarah bangsa mereka yang gemilang bagi organisasi pertahanan sipilnya, orang Indonesia merasa terhina olehnya.

Vrouwelijke Automobiel Corps. Korps Mobil Wanita, disingkat VAC. Jawatan pembantu militer KNIL yang beranggotakan wanita, terutama di bidang medis.

Wakaba. Sekolah Kepandaian Poeteri. Sebuah sekolah yang diawasi oleh pemerintah militer di seluruh Jawa. Dipimpin oleh Nona Azisah,

Pejabat pemerintahan militer Jepang di Jawa menginspeksi murid-murid di sebuah sekolah Wakaba.



sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan kewanitaan kepada anak-anak perempuan Indonesia serta mengindoktrinasi mereka dengan berbagai pemikiran Jepang.

Warta Syū. Warta daerah untuk setiap *syū* di wilayah pendudukan Tentara ke-16 Jepang. Menggunakan bahasa-bahasa daerah yang bersangkutan.

Wavell, Sir Archibald Percival (1883–1950). Seorang marsekal mandala Inggris, Wavell terkenal karena mengalahkan pasukan Italia di Afrika Utara dan Timur pada awal Perang Dunia II. Ia kemudian dikirimkan ke India, sebelum akhirnya ditunjuk untuk memimpin ABDACOM dan mempertahankan Birma, Malaya, Hindia Belanda, dan Filipina. Sekalipun jenderal yang tangguh, tetapi Wavell tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk mempertahankan kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tanggal 23 Februari 1943, saat Malaya jatuh ke tangan Jepang dan Jawa serta Sumatra terancam musuh, ABDACOM dibubarkan dan Wavell serta stafnya diperintahkan meninggalkan Jawa. Ia kemudian menghabiskan sisa masa perang dengan menjabat sebagai gubernur jenderal dan raja muda di India.

Wikana (1914–?). Seorang anggota PKI Bawah Tanah yang dilarang pemerintah kolonial Belanda, Wikana aktif sebagai anggota Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan Rakyat Baroe pada zaman pendudukan Jepang.



Ia ikut terlibat dalam penculikan terhadap Soekarno dan Hatta, yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok, yang menuntut agar kedua tokoh itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah penyerahan Jepang. Berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang,

perumusan teks proklamasi bisa dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Sempat menjadi seorang menteri dan anggota MPRS, setelah peristiwa G-30-S ia ditangkap dan dibawa pergi tentara, dan nasibnya tidak pernah diketahui rimbanya.

Wiranatakoesoema V, Raden Adipati Aria (1888–1965). Seorang pejabat kolonial pada masa Belanda dan pernah menjabat sebagai bupati Cianjur, Wiranatakoesoema bertugas sebagai bupati Bandung pada zaman pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Ia kemudian menjadi menteri dalam negeri RI pertama dan pernah menjabat sebagai Wali Negara Pasundan, salah satu negara federal RIS.

Woerjaningrat, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng (l. 1885). Seorang tokoh Boedi Oetomo dan Parindra, ia juga merupakan pegawai Keraton Solo. Selama pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai Bupati Nayoko Kaprah Tengen dalam Keraton Solo. Ia diangkat menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945.

Wongsonagoro, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng (l. 1897). Seorang tokoh Boedi Oetomo dan Parindra, pada masa pendudukan Jepang ia menjadi bupati Sragen. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Yamamoto, Moichiro (1898–1978). Setelah bertugas sebagai



Kepala Bagian Umum, Inspektorat Pemerintahan Militer, Tentara ke-16, Yamamoto diangkat sebagai *Gunseikan* di Jawa pada bulan November 1944. Jabatan itu dipegangnya hingga Jepang menyerah. Ia kemudian diangkat menjadi anggota parlemen Jepang di tahun 1965. Pada tahun 1979, ia menerbitkan memoar yang berjudul *Watakushi no Indonesia: Dai Jūrokugun Jidai no Kaisō* (Indonesiaku: Mengenang Masa-masa bersama Tentara ke-16).

Yamashita, Tomoyuki (1885–1946). Jenderal Jepang paling terkenal karena berhasil menaklukkan wilayah jajahan Inggris di Malaya dan Singapura, yang membuatnya dijuluki sebagai “Macan Malaya”. Sempat memimpin Tentara ke-25 yang membawahi Malaya, Singapura, dan Sumatra, ia kemudian memimpin pasukan Jepang yang mempertahankan Filipina dari serangan Amerika Serikat.

Ia menyerah kepada pasukan Amerika di Luzon setelah perang berakhir. Ia dijatuhi hukuman mati karena dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap tawanan Sekutu dan penduduk sipil di Singapura dan Manila.

Yanagawa Motoshige (1914–1986). Lulusan sekolah intelijen Nakano, sebagai seorang perwira *Beppan* ia bertugas sebagai komandan *Seinen Dojo* di Tangerang. Ia kemudian memainkan peranan penting dalam pembentukan Peta dan barisan Hizbullah.

Yap Tjwan Bing (1910–1988). Seorang sarjana Farmasi dan apoteker, Yap Tjwan Bing giat dalam gerakan kebangsaan pemuda mewakili golongan Tionghoa. Ia menghadiri rapat pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan Rakjat Baroe pada masa pendudukan Jepang.

Pada tahun 1945, ia terpilih menjadi salah satu anggota BPUPKI dan PPKI yang mewakili masyarakat Tionghoa. Ia menghadiri pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Yoshizumi, Tomegoro (1911–1946). Editor surat kabar Jepang *Tohindo Nippon* di Batavia sebelum Perang, ia sebenarnya seorang perwira intelijen Angkatan Laut Jepang. Saat kedoknya terbuka, Belanda mendeportasinya, tetapi ia kemudian kembali lagi ke Indonesia. Ia kembali ditangkap dan kemudian dikirim ke Australia saat Perang Pasifik pecah.

Kembali ke Jawa melalui suatu program pertukaran tawanan, ia aktif di Asrama Indonesia Merdeka. Sebelum perang ia seorang nasionalis sayap kanan Jepang, tetapi perlakuan buruk Sekutu terhadapnya saat ia ditawan dan interaksinya dengan para pemuda Indonesia membuatnya menjadi seorang Marxis.

Saat Jepang menyerah, ingin terus membantu perjuangan bangsa Indonesia dan khawatir akan ditahan Sekutu lagi, ia melarikan diri ke Jawa Timur. Ia wafat di Blitar pada tahun 1946 dan dimakamkan dengan nama Indonesia, Arief.

Z

Zainal Moestofa, K.H. (1907–1944). Bernama asli Umri alias Hudaemi, ia menggunakan nama K.H. Zainal Mustofa setelah naik haji. Pendiri dan pemimpin Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya ini pada masa pendudukan Jepang mengemukakan sejumlah kebijakan Jepang yang dianggap menyengsarakan rakyat dan merendahkan umat Islam. Jepang kemudian menyerang pesantrennya dan menangkap Zainal beserta sejumlah pengikutnya. Dinyatakan bersalah, ia dieksekusi Jepang di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944.



Zainoel Arifin, K.H. (1909–1963). Seorang tokoh NU, selama pendudukan Jepang, Zainoel Arifin aktif dalam Masjoemi serta menduduki jabatan sebagai kepala bagian umum dalam organisasi itu. Ia kemudian diangkat menjadi panglima Hizbullah di seluruh Indonesia setelah Jepang membentuk barisan ini.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Hizbullah akhirnya digabungkan ke dalam TNI. Zainoel Arifin sendiri aktif berkarya dalam kehidupan parlementer selama masa pemerintahan Soekarno.

Zaman Edan. Julukan yang diberikan terhadap masa pendudukan Jepang, berlawanan dengan masa kolonial Belanda yang disebut sebagai “zaman normal”. Merupakan ungkapan protes terhadap

berbagai kekurangan dan tindak kekejaman yang dialami penduduk Indonesia akibat kebijakan sewenang-wenang Jepang.

Zanchi Yugekitai. Satuan pasukan cadangan. Sebuah unit gerilya yang beranggotakan sekitar 400 orang Sumatra yang dipersiapkan untuk misi “kontra-spionase” guna menangkal penyusupan mata-mata Sekutu. Satuan ini beroperasi hingga ke desa-desa pedalaman di Sumatra untuk memantau gerakan anti-Jepang.



SUMBER FOTO

30 Tahun Indonesia Merdeka: 87, 96; *Album Perjuangan Kemerdekaan, 1945–1950*: 4 (bawah), 6, 16, 17, 21, 37, 63, 70, 99, 110, 126; *Album Pahlawan Kemerdekaan*, 131; *Archipel*: 19; *Asia Raja*: 9, 38; *Buana Minggu*: 34; *Di Bawah Cengkeraman Dai Nippon*: 33, 66, 80, 106, 102; *Djawa Baroe*: xii, 11, 23, 24, 28, 30, 31, 53, 76, 90, 103, 104, 107, 111, 115, 123, 125; *HNMS De Ruyter*: 64; *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda*: 57, 73, 118; *Het Pantje van Oliman*: 52; *Intisari*: 26, 49; *Kembali ke Filipina*: 85; *Klemen Luzar*: xi, 39, 43, 44, 61, 84, 94, 101, 129; *Mr. Soedjono*: 109; *Pandji Poestaka*: i, xiv, 12, 41, 54, 62, 91, 92, 121; *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945–19 Agustus 1945*: 11; *Runtuhnya Hindia Belanda*: 1; *Sejarah Nasional Indonesia*: 15, 112; *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial*: 55, 68; *Sjamaun Gaharu*: 29, 82; *Soeara Asia*: 108; *Takhta untuk Rakyat*: 117; *Tempo*: 47, 74; *Warta Bogor-Shu*: 46; *Wikipedia*: 4 (atas), 13, 40, 58, 79, 114, 124; *www.brigaspad.com*: 3; *www.dpr.go.id*.: 5..

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams*. New York: Bobbs-Merril, 1965.
- Anderson, Benedict R.O., *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. London: Equinox Publishing, 2005.
- Askin, Kelly Dawn. *War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff Publishers, 1997.
- Aziz, Muhammad A. *Japan's Colonialism and Indonesia*. 's Gravenhage: Nijhoff, 1955.
- Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1958.
- Bigalke, Terance William. *Tana Toraja: A Social History of An Indonesian People*. Singapura: NUS Press, 2005.
- Bijkerk, J.C. *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik*, terj. Mochardanus. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1988.
- Davidson, Jamie S. "'Primitive Politics': The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia". *ARI Working Paper* No. 9, 2003.
- De Jong, Louis. *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, jil. 11a: Nederlands-Indie I, bag. 1. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1984.
- . *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, jil. 11b: Nederlands-Indie I, bag. 1. S'Gravenhage: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1985.
- . *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, jil. 11b: Nederlands-Indie I, bag. 2. S'Gravenhage: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1985.
- Friend, Theodore. *The Blue-Eyed Enemy: Japan against the West in 1942-1945*. New Jersey: Princeton University Press, 1988.
- Fuller, Richard. *Shokan: Hirohito's Samurai*. London: Arms and Armor, 1992.

- I Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial, 1915-1950*, terj. Peusy S.I. Paath. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- "Indonesia: Moonlight." *Time*, 16 Desember 1946.
- Iwaichi, Fujiwara. *F-Kikan*, terj. Gyani Buditjahya. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Keat Gin Ooi. *The Japanese Occupation of Borneo, 1941-45*. Singapura: Taylor & Francis, 2011.
- Kratoska, Paul H. *Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire*. London: Routledge, 2002.
- Lebra, Joyce C. *Tentara Gemblengan Jepang*, terj. Pamudji. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Mercado, Stephen C. *The Shadow Warriors of Nakano: A History Of the Imperial Japanese Army's Elite Intelligence School*. Dulles, VA: Potomac Books, Inc., 2002.
- Musa, Th. A., et.al. *Perjuangan Rakyat di Daerah Gorontalo*. Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942 dan IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo, 1982.
- Nagazumi, Akira (ed.). *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Mochtar Pabotinggi dll. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jil. 1. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa, 1977.
- N. Hidayat. *Di Bawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia, 1942-45*. Jakarta: Nilia Pustaka, 2007.
- Nino Oktorino. *Dalam Cengkeraman Dai Nippon*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- . *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- O'Hara, Vincent P. *The U.S. Navy against the Axis: Surface Combat, 1941-1945*. Annapolis: Naval Institute Press, 2007.
- Poesponegoro, Marwati D., dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*, jil. 6. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Reid, Anthony J.S. "The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942". *Journal of Asian Studies*, No. 1 Vol. XXXV, Januari 1975.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Russell of Liverpool, Lord. *The Knights of Bushido*. New York: Berkley Medallion Books, 1959.
- Sam Setyautama dan Suma Mihardja. *Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

- Sigarlaki, A., *et.al. Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Tarling, Nicholas. *A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941-1945*. London: C. Hurst & Co. Publishers, 2001.
- Touwen-Bouwsma, E. "Japanese Minority Policy: The Eurasians on Java and the Dilemma of Ethnic Loyalty", dalam *Japan, Indonesia and the War Myths and Realities*. Leiden: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 152 no: 4, 1996.
- Tucker, Spencer. *Who's Who in Twentieth Century Warfare*. London: Routledge, 2001.
- Weitjens, J., dan Th. van den End. *Ragi Carita: Sejarah Gereja di Indonesia*, Jilid 2. Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 1999.

Surat Kabar Sezaman

- Asia Raja, 1942–1945
 Borneo Simboen, 1943–1945
 Djawa Baroe, 1943–1945
 Pandji Poestaka, 1942–1945
 Soeara M.I.A.I., 1943

Situs Internet

- Axis History Forum
 East Indies Camp Archive
 The Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941-1942
 Pacific War 1941-1945 Forum
 Wikipedia



**KONFLIK
BERSEJARAH**

ENSIKLOPEDI

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Buku ini memberikan informasi lengkap mengenai zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Di antara hal-hal yang tercantum di dalamnya adalah:

- Ikhtisar sejarah pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945);
- Tokoh-tokoh Indonesia, Jepang, dan Sekutu yang memainkan peranan penting selama kurun waktu pendudukan Jepang di Indonesia;
- Peristiwa-peristiwa penting di seputar zaman pendudukan Jepang di Indonesia;
- Berbagai instansi dan organisasi bentukan Jepang di Indonesia;
- Perlawanan Indonesia;
- Kejahatan perang Jepang di Indonesia.

Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bahan berharga bagi para pelajar maupun khalayak umum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu periode penting yang membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia ini.

Beberapa judul lain dalam seri ini yang telah terbit:



Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3214
Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

SEJARAH

ISBN 978-602-02-2872-3



9 786020 228723

777132537